



BerAKHLAK **#** bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani
bangsa bangsa

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Tahun 2023



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah subhanawata'ala, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) pada Tahun 2023 dengan baik. Laporan ini merupakan laporan hasil capaian tahun keempat pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2020-2024, yang mana panduan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berlandaskan Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun

2020-2024 (Perubahan) dengan dasar Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 2264/SEKJEN/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekjen DPR RI 2020-2024.

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Setjen DPR RI telah melakukan berbagai upaya perbaikan, terutama pada sasaran RB General dan RB Tematik, demi terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB Setjen DPR RI juga telah dilakukan sebagai upaya mengawal kegiatan RB agar dilakukan pada jalur yang telah ditetapkan.

Secara garis besar, seluruh program kerja RB Setjen DPR RI Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik dan telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Road Map RB Setjen DPR RI 2020-2024 (Perubahan) dan Rencana Aksi Tahunan RB Setjen DPR RI Tahun 2023.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif pelaksanaan RB Tahun 2023 dan saran tindak lanjut yang dapat dijadikan bahan acuan dan *feed back* guna mendukung pelaksanaan evaluasi internal dan evaluasi eksternal serta penyusunan rencana kerja pelaksanaan RB di tahun berikutnya.

Terlaksananya RB Setjen DPR RI dan tersusunya laporan ini tidak lepas dari kerja keras dan kerja sama yang terjalin antar unit kerja dan Tim RB Setjen DPR RI Tahun 2023. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kontribusi yang telah diberikan. Disadari bahwa Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 ini masih banyak kekurangannya. Oleh karen itu, saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan RB ke depannya.

Jakarta, Desember 2023

Ketua Tim Reformasi Birokrasi 2023



Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



NOMOR: 1536 /SEKJEN/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1024/SEKJEN/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023**


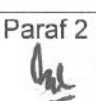
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu mengubah Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1024/SEKJEN/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6396);

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1024/SEKJEN/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memperhatikan : Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA 002.01.1.001012/2023 tanggal 30 November 2022;

Paraf 1	Paraf 2
	



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1024/SEKJEN/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023.

PERTAMA : Mengubah Lampiran I Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1024/SEKJEN/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023, menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Kepala Biro/Pusat: Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif, Teknologi Informasi, Analisis Keparlemenan, Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur 1 dan Inspektur 2, Sumber Daya Manusia Aparatur, Perencanaan dan Organisasi, Keuangan, Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Umum, Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Kepala Bagian/Bidang: Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Administrasi Keuangan, Perencanaan, Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum, serta Arsip Sekretariat Jenderal DPR RI;
4. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS JENDERAL,



INDRA ISKANDAR



Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1536 /SEKJEN/2023
TANGGAL : 3 JULI 2023



SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP/GOL.	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si	196611141997031001/IV	Sekretaris Jenderal DPR RI	Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Organisasi
	Pengarah			
2.	Ir. Sumariyandono, MPM.	196506181988111001/IV	Deputi Bidang Administrasi	Penanggung Jawab Capaian Sasaran Strategis RB General
	Pengarah			
3.	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H.	196507101990031007/IV	Kepala Badan Keahlian	Penanggung Jawab Capaian Sasaran Strategis RB Tematik
	Pengarah			
4.	Suprihartini, S.IP., M.Si	197101061990032001/IV	Deputi Bidang Persidangan	Penanggung Jawab Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB General
	Pengarah			
5.	Drs. Nana Sudjana, M.M.	65030634/IV	Inspektur Utama	Penanggung Jawab Capaian Strategis Pelaksanaan RB General dan Pembangunan Zona Integritas (ZI)
	Pengarah			
6.	Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.	197205111999031003/IV	Kepala Pusat Analisis Keparlemenan	Ketua Tim Kerja dan Penanggung Jawab SKM
	Ketua			
7.	Endang Suryastuti, S.H., M.Si.	196908011994032001/IV	Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Wakil Ketua Tim Kerja dan Koordinator Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel dan
	Wakil Ketua			

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



NO	NAMA	NIP/GOL.	JABATAN	KETERANGAN
				Penanggungjawab pada nilai pengelolaan pengaduan masyarakat (LAPOR), Indeks Kualitas Kebijakan/IKK, dan ZI Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
8.	Drs. Helmizar, M.E. Anggota	196407191991031001/IV	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Koordinator Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel, Penanggung Jawab Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Nilai Reformasi Birokrasi
9.	Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si. Anggota	196507051991031003/IV	Kepala Pusat Teknologi dan Informasi	Koordinator Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel, Penanggungjawab nilai kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Digitalisasi Pelayanan Publik (<i>Digital Services</i>),

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



NO	NAMA	NIP/GOL.	JABATAN	KETERANGAN
				Tingkat Kemampuan Data Statistik Sektoral dan ZI Pustekinfo
10.	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.	197109111997031005/IV	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur,	Koordinator Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional dan Penanggungjawab penguatan Indeks Sistem Merit, nilai Indeks Profesional ASN, nilai survei Indeks BerAKHLAK, nilai survei Employer Branding dan ZI Biro SDMA dan Pusbangkom SDM Legislatif
	Anggota		Plt. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif	
11.	Rahmad Budiaji, S.IP., M.Si.	197008011996031001/IV	Kepala Biro Keuangan	Penanggung Jawab pada nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
	Anggota			
12.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.	196902131993021001/IV	Kepala Biro Umum	Penanggung Jawab pada nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
	Anggota			
13.	Drs. Suratna, M.Si	196405221991031001/IV	Kepala Biro Protokol dan Humas	Penanggung Jawab pada nilai tata kelola kearsipan dan Indeks Pelayanan Publik
	Anggota			
14.	Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.	197004291998032001/IV	Kepala Pusat Perancangan	Penanggungjawab pada nilai Indeks

Paraf 1

Paraf 2



NO	NAMA	NIP/GOL.	JABATAN	KETERANGAN
	Anggota		Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia	Reformasi Hukum (IRH)
15.	Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn. Anggota	196811251993022001/IV	Inspektur II	Penanggung Jawab pada nilai kualitas pengawasan (pembangunan Zona Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP, Survei Penilaian Integritas/SPI)
16.	Drs. Mohammad Djazuli, M.Si. Anggota	196510311994031002/IV	Inspektorat I	Penanggung Jawab pada nilai kualitas pengawasan (pembangunan Zona Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP, Survei Penilaian Integritas/SPI)
17.	Arini Wijayanti, S.H., M.H. Anggota	197105181998032010/IV	Kepala Biro Persidangan I	Penanggungjawab Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan ZI Biro Persidangan I
18.	Chairil Patria, S.IP., M.Si. Anggota	197111051998031002/IV	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	Penanggung Jawab Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan ZI Biro Set. Pimp.
19.	Endah Tjahjani Dwirini T., S.S., M.Phil. Anggota	196804021993022001/IV	Kepala Biro Kerjasama Antar dan Organisasi Internasional	Penanggung Jawab Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan ZI BKSAP dan OI

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--





NO	NAMA	NIP/GOL.	JABATAN	KETERANGAN
20.	Setyanto Priambodo, SE., M.Si.	196610081994031003/IV	Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Penanggung Jawab Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Anggota			
21.	Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.	197111171998031004/IV	Kepala Biro Pemberitaan Parlemen	Penanggung Jawab Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Anggota			
22.	Dra. Tanti Sumartini, M.Si.	196310011988032001/IV	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Penanggung Jawab RB Tematik
	Anggota			
23.	Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.	197007061998031005/IV	Kepala Biro Persidangan II	Penanggung Jawab SKM dan ZI Biro Persidangan II
	Anggota			
24.	Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.	197901192002122002/IV	Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggungjawab pada nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH)
	Anggota			
25.	Dr. Ari Muliarta Ginting, S.E., M.S.E.	198105022009121002/IV	Analisis Legislatif Ahli Madya/Plh. Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	Penanggungjawab RB Tematik
	Anggota			
26.	Koko Surya Dharma, A.K.S., M.Si.	197307221998031001/IV	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	PIC Nilai Indeks Kelembagaan, Sistem Kerja ASN
	Anggota			
27.	Dedy Bagus Prakasa, S.E., M.Ak.	198404232009121003/III	Kepala Bagian Perencanaan	PIC Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	Anggota			
28.	Murni Elok Pertiwi, S.E., M.A.B	198006032005022003/IV	Kepala Bagian Manajemen Kinerja Dan Informasi ASN	PIC Tingkat Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel dan Tingkat Implementasi
	Anggota			

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



NO	NAMA	NIP/GOL.	JABATAN	KETERANGAN
				Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN
29.	Hernadi, S.IP., M.Si. Anggota	196908021990031002/IV	Kepala Bidang Pelatihan Teknis	PIC Agen Perubahan, nilai survei Indeks BerAKHLAK, dan nilai survei <i>Employer Branding</i>
30.	Ni'mah Wahyu Purnami, S.E. Anggota	198605242009122002/III	Kepala Subbagian Organisasi	PIC Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
31.	Dwita Amelia Fitriani, S.E. Anggota	198705292009122004/III	Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	PIC Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
32.	Ratna Puspita Sari, S.E., M.Ak Anggota	198409052009122003/III	Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran	PIC Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Agen Perubahan Biro Organisasi dan Perencanaan
33.	Sam Karya Nugraha, S.E., M.Ak. Anggota	198803212009121001/III	Kepala Subbagian Pelaporan Keuangan	PIC Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Opini BPK
34.	Darmadi Hayu Prasiddha, S.Kom Anggota	197109061997031003/IV	Analisis Tata Usaha	PIC Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP)
35.	Weda Herdyotanto Pramu Wardhana, S.E. Anggota	198112142009121003/III	Kepala Subbagian Pelaporan BMN	PIC Indeks Pengelolaan Aset (IPA)
36.	Vita Fathiyah Yuniati, S.E., M.Ak Anggota	198106082009122001/III	Kepala Subbagian Tindak Lanjut Dan Pelaporan Inspektorat Utama	PIC Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Indeks Perencanaan Pembangunan
37.	Rahayu Yuni Susanti, S.T., M.T.I. Anggota	198506102009122003/III	Pranata Komputer Ahli Muda	PIC Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Tingkat

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



NO	NAMA	NIP/GOL.	JABATAN	KETERANGAN
				Implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE, Tingkat Kematangan Data Statistik Sektoral dan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
38.	Nana Maulana, S.A.P Anggota	197902052005021002/II	Arsiparis Terampil	PIC Tingkat Digitalisasi Arsip
39.	Zoel Arief Iskandar, S.I.Kom., M.A. Anggota	198607262014021003/III	Pranata Humas Ahli Muda	PIC Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>) dan Indeks Pelayanan Publik
40.	Laksmi Harundani, S.H., M.Kn Anggota	198504142009122002/III	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	PIC Indeks Reformasi Hukum (IRH)
41.	Denny Ramadan, S.E., QIA, QGIA Anggota	198605312009121003 /III	Auditor Ahli Muda	PIC Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, Tingkat Maturitas SPIP dan Survey Penilaian Integritas
42.	Dr. Ariesty Tri Mauleny, S.Si., M.E. Anggota	197503262009122002/III	Analisis Legislatif Ahli Muda	PIC Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
43.	Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E. Anggota	198306032018012002/III	Analisis Legislatif Ahli Pertama	
44.	Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si Anggota	197212031998032003/IV	Kepala Bagian Perencanaan Dan Pola Karier ASN	PIC Indeks Sistem Merit
45.	Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM. Anggota	198806212014022001/III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	PIC RB Tematik Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Investasi
46.	Anih Sri Suryani, S.Si., M.T. Anggota	197510142009122001/IV	Analisis Legislatif Ahli Madya	PIC RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--





NO	NAMA	NIP/GOL.	JABATAN	KETERANGAN
47.	Hendra Gunawan Anggota	197305031999031002/III	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PIC RB Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Agen Perubahan Biro Umum
48.	Afniwaty Tanjung, S.E., M.E. Sekretaris	196901201998032003/IV	Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Sekretaris Tim Kerja
49.	Izzaty, S.T., M.E. Anggota	197712052009122001/III	Widyaiswara Ahli Muda	Agen Perubahan Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif
50.	Fariza Emra, S.T., M.Sc. Anggota	198001082009121001/IV	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi	Agen Perubahan Pustekinfo
51.	Nofia Dewita, S.S., M.Si. Anggota	196711081996032001/IV	Kepala Subbagian Rapat Persidangan Paripurna	Agen Perubahan Rosid I
52.	Nina Herlina, S.H. Anggota	197910152005022001/III	Kepala Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga	Agen Perubahan Rosid II
53.	Beny Rahbandiyosa Sabri, S.E. Anggota	198306282009121001/III	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional	Agen Perubahan Biro KSAP dan OI
54.	Erna Agustina, S.Sos. Anggota	196808161988032002/IV	Kepala Bagian Sekretariat Badan Musyawarah	Agen Perubahan Biro Set Pimpinan
55.	M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H. Anggota	197202292002121001/IV	Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen	Agen Perubahan Biro Pemberitaan Parlemen
56.	Bima Widiatiaga, S.Hum. Anggota	199402102019031003/III	Pamong Budaya Ahli Pertama	Agen Perubahan Biro Protokol dan Humas
57.	Kurnia Dwi Rachman, SH Anggota	199501062019031001/III	Analisis Hukum	Agen Perubahan Biro Hukum dan Dumas

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



NO	NAMA	NIP/GOL.	JABATAN	KETERANGAN
58.	Rusmanto, S.H., M.H. Anggota	197112121997031001/IV	Kepala Bagian Manajemen SDM Non ASN	Agen Perubahan Biro SDMA
59.	Timbang Supriyanto, S.Sos. Anggota	196811301988031001/IV	Kepala Bagian Administrasi Barang Milik Negara (BMN)	Agen Perubahan Biro Keuangan
60.	Eko Riswanto, S.E. Anggota	197106011998031004/IV	Kepala Bagian Pengelolaan Wisma DPR	Agen Perubahan Biro PBW
61.	Noval Ali Muchtar, S.H. Anggota	199508252018031001/III	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Pertama	Agen Perubahan Pusat PUU Bidang Politik dan Hak Asasi Manusia
62.	Ade Nurul Aida, S.E., M.E. Anggota	198702092014022003/III	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	Agen Perubahan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara
63.	Nova Manda Sari, S.H., M.H. Anggota	198811112014022003/III	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Muda	Agen Perubahan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat
64.	T. Ade Surya, S.T., M.M. Anggota	198103242009121001/III	Analisis Legislatif Ahli Muda	Agen Perubahan Pusat Penelitian
65.	Ira Chandra Puspita, S.HI.,M.H. Anggota	198810032018012001/III	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang- undangan Legislatif Ahli Muda	Agen Perubahan Pusat Panlak UU
66.	Muhammad Naufal Nasution, A.Md.Ak Anggota	199907202021011001/III	Auditor Terampil	Agen Perubahan Inspektorat I
67.	Dyah Citra Ariwidyasari, S.A.B., M.E., QGIA., CRMP Anggota	197911262002122003/III	Auditor Ahli Muda	Agen Perubahan Inspektorat II
68.	Raka Pamungkas, AK., CA.	196605131987031001/IV	Analisis Kebijakan Madya pada	Tim Evaluator

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--



NO	NAMA	NIP/GOL.	JABATAN	KETERANGAN
			Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan & Evaluasi Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB)	
69.	Suciati, S.Sos. Anggota	197207201994032002/III	Kepala Subbagian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat
70.	Annissa Putri Nasyi'ah, S.E. Anggota	198512302009122004/III	Analisis Kinerja	Sekretariat
71.	Mulyana, S.Sos Anggota	197608271998032001/III	Analisis Kinerja	Sekretariat
72.	Erick Wahyu Erdiansyah , S.Sos. Anggota	198108082003121001/III	Analisis Kinerja	Sekretariat
73.	Harno, S.AP. Anggota	198105292003031001/III	Analisis Manajemen Resiko	Sekretariat
74.	Niswan, S.IP. Anggota	197008171996031002/III	Pengelola Akuntabilitas	Sekretariat
75.	Nur Rochman Anggota	198508212009111001/II	Pengadministrasi Umum	Sekretariat

SEKRETARIS JENDERAL,



INDRA ISKANDAR

Paraf 1 	Paraf 2 
--	--

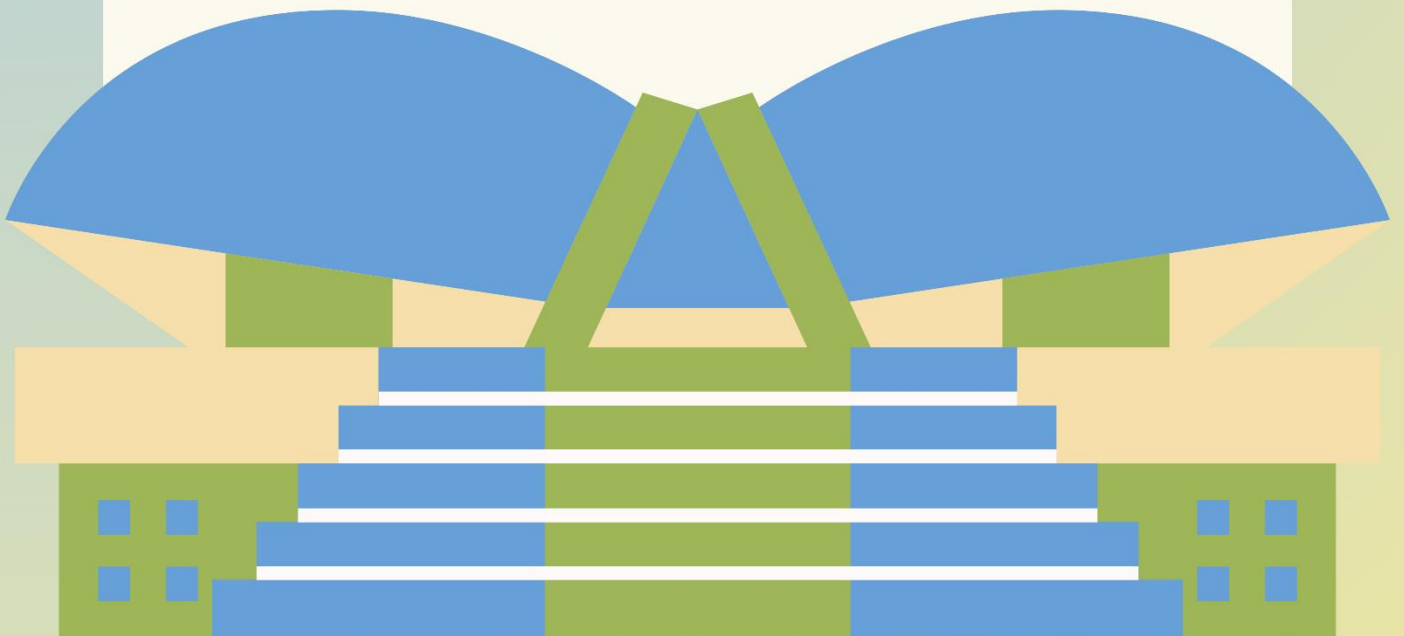


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	17
PENDAHULUAN	18
Latar Belakang	19
Tujuan dan Sasaran	20
Dasar Hukum	20
Sistematika Laporan	20
REFORMASI BIROKRASI SETJEN DPR RI	21
Profil	22
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Dan Struktur Organisasi	22
Road Map	26
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022	29
Capaian Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2023	34
Reformasi Birokrasi General	34
Reformasi Birokrasi Tematik	72
PENUTUP	81
Kesimpulan	81
Rekomendasi	81
PENGHARGAAN	83
LAMPIRAN	84

PENDAHULUAN

Bab I



A. Latar Belakang



Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah instrument alat dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus pemerintah. Arahan Presiden terkait RB, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Atas dasar tersebut, maka dilakukan berbagai upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan. Salah satunya adalah adanya perubahan peraturan terkait pelaksanaan RB nasional, dimana adanya penajaman aspek utama untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

Pelaksanaan RB Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam PermenPANRB tersebut, pelaksanaan RB bukan lagi berfokus pada 8 area perubahan, akan tetapi fokus RB telah dibagi menjadi 2, yakni RB General dan RB Tematik. Sasaran RB General yaitu 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, dan 2) Terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional. Adapun Sasaran RB Tematik adalah meningkatnya kualitas tata kelola dan hasil tema prioritas RB Tematik, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, penggunaan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi.

Pelaksanaan RB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ketiga yaitu Tahun 2020-2024, agar pelaksanaan reformasi birokrasi bisa berjalan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan di dalam Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauhmana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun berikutnya.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan objektif, maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan, baik dari segi kebijakan maupun dari segi implementasi.

Dalam rangka mendapatkan masukan dan penyempurnaan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI tersebut, maka

dipandang perlu melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI guna perbaikan dan peningkatan capaian pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Setjen DPR RI ke depannya menjadi lebih baik.

B. Tujuan dan Sasaran

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Setjen DPR RI, sebagai bahan evaluasi program-program Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan, dan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan strategi di tahun berikutnya, sehingga akan diketahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dari target – target dalam program Reformasi Birokrasi yang sudah dilaksanakan selama Thun 2023.

Adapun sasaran penyusunan laporan ini adalah:

1. Teridentifikasi capaian sasaran dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023;
2. Teridentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dan upaya perbaikannya dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahap berikutnya;
3. Teridentifikasinya dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
4. Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 2264/SEKJEN/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekjen DPR RI 2020-2024.

D. Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

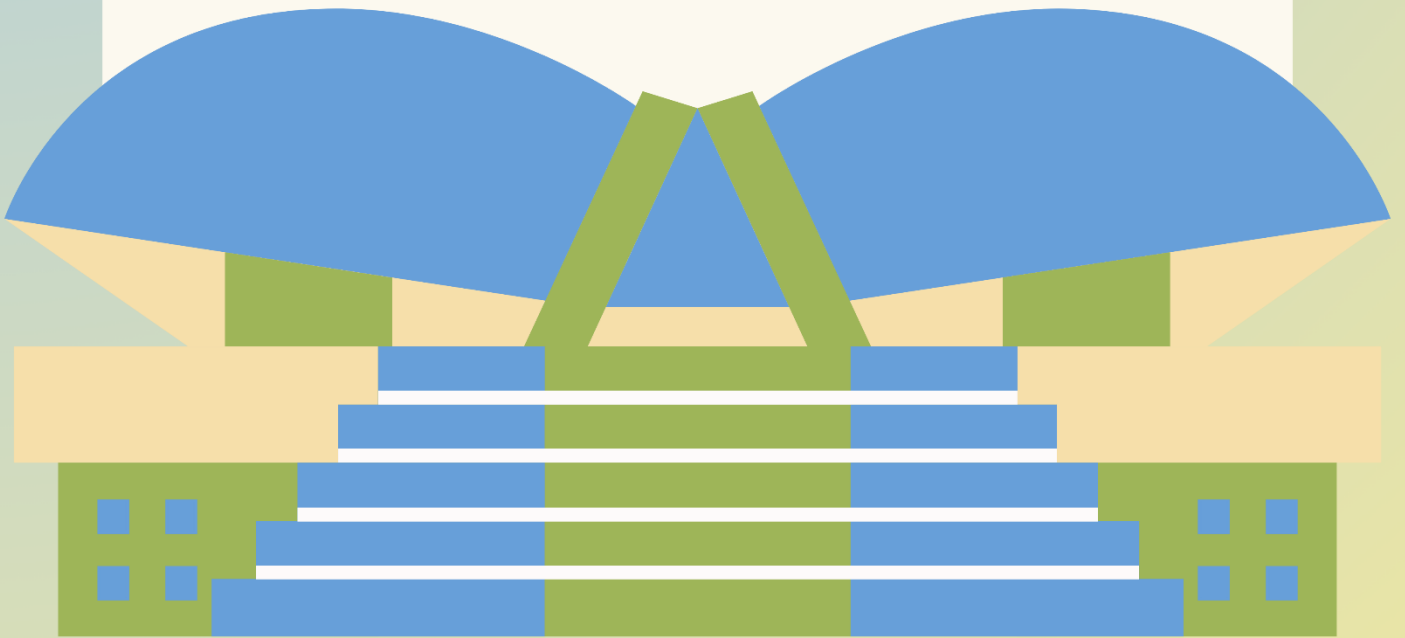
Bab II Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI

Bab III Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2023

Bab IV Penutup

REFORMASI BIROKRASI SETJEN DPR RI

B a b I I



A. PROFIL

Visi Setjen DPR:

“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”



Misi Setjen DPR RI:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI;
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintah yang profesional, baik dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Menyajikan data lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI.

Sasaran Program:

1. Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik.



Tujuan:

1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih;
3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

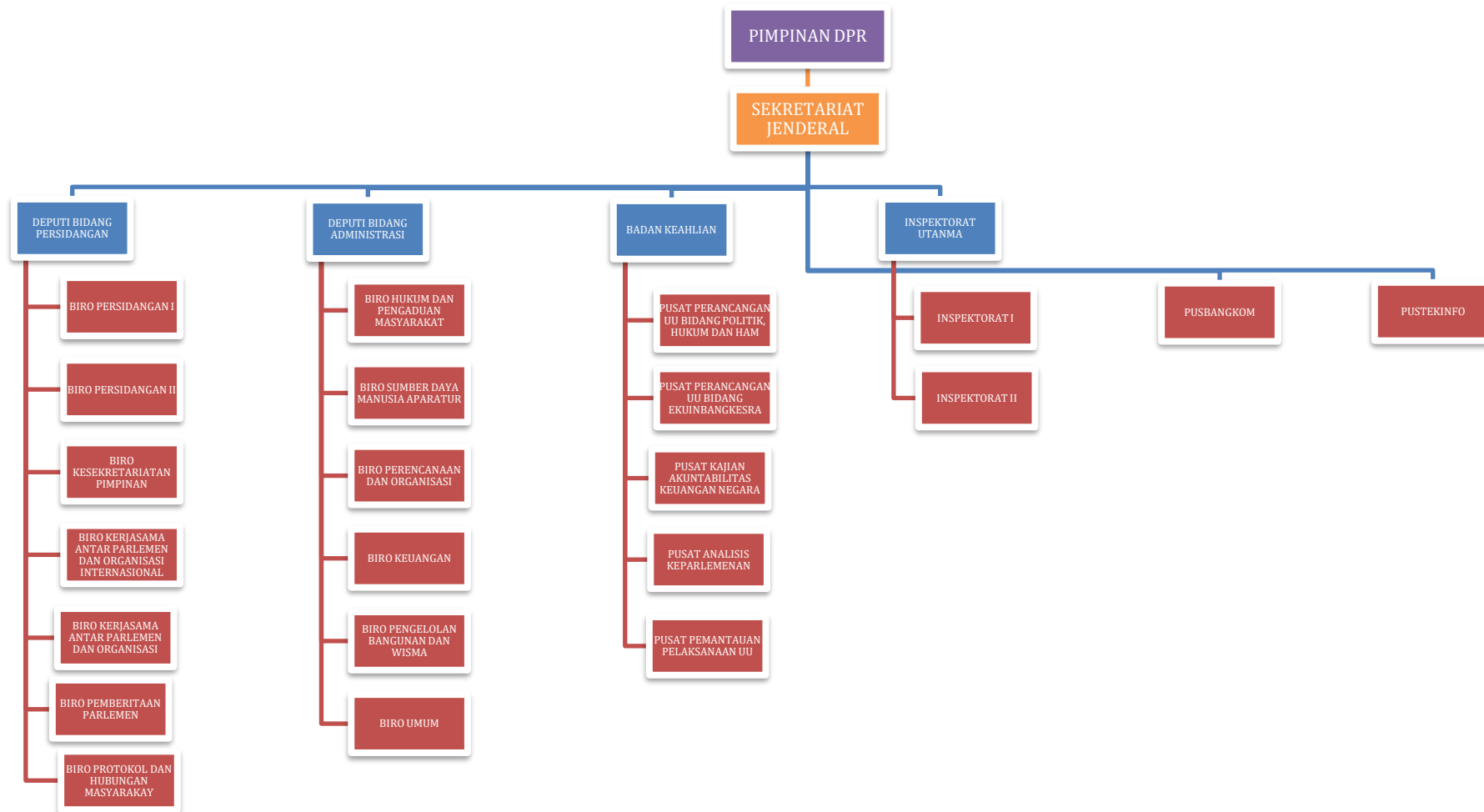
- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Setjen DPR RI;
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Setjen DPR RI;
- c. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPR RI;
- d. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada DPR RI;
- e. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada DPR RI;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Setjen DPR RI;
- g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional, serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPR RI;
- h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh DPR RI; dan
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada DPR RI.



Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Deputi Bidang Persidangan;
- b. Deputi Bidang Administrasi;
- c. Badan Keahlian; dan
- d. Inspektorat Utama.

Struktur Organisasi



C. ROAD MAP

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 (Perubahan) dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2264/SEKJEN/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekjen DPR RI 2020-2024. Tabel 2 dan 3 berikut ini adalah Road Map Reformasi Birokrasi Sekjen DPR RI untuk tahun 2023.

Tabel 2. Penetapan Target Kegiatan RB General Tahun 2023 dalam Road Map RB 2020-2024

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan	2022	2023	2024	Koordinator
1. Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	4	8,24	-	Biro Perencanaan dan Organisasi
2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	-	3	3	Biro Perencanaan dan Organisasi
3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	a. Indeks SPBE	2,95	3,5	3,6	Pusat Teknologi Informasi
	b. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	-	5	5	Pusat Teknologi Informasi
4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Nilai SAKIP	67,28	75	76	Biro Perencanaan dan Organisasi
5. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	4 unit	5 unit	6 unit	Inspektorat I dan II
6. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,185)	Level 3 (3,228)	Level 3 (3,24)	Inspektorat II

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan	2022	2023	2024	Koordinator
7. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%	Biro Hukum dan Dumas
8. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	77,43	78,9	80	Inspektorat I dan II
9. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	34,82	75	76	Biro Hukum dan Dumas
10. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	-	75	76	Biro Hukum dan Dumas
11. Pelaksanaan Arsip Digital	Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	77,99	87	88	Biro Protokol dan Humas
12. Pelaksanaan Data Statistik Sektor	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	-	2,46	2,6	Pusat Teknologi Informasi
13. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	9,9	71	72	Biro Umum
14. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,66	95	96	Biro Keuangan; Biro Perencanaan dan Organisasi
	b. Indeks Pengelolaan Aset	3,60	3,65	3,70	Biro Keuangan
	c. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Biro Keuangan
	d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	86,75%	94,61%	95,00%	Inspektorat Utama
15. Penguatan Sistem Merit, Manajemen Talenta, Kinerja Pegawai dan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	345,5	355,5	360	Biro SDMA
16. Pelaksanaan core values ASN	Indeks BerAkhhlak	60,7%	75%	76%	Pusbangkom SDM Legislatif
17. Pelaksanaan pelayanan publik prima	a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	82,75 (3,31)	93,00 (3,72)	93,50 (3,74)	Pusat Analisis Keparlemenan
	b. Indeks Pelayanan Publik	4,31	4,33	4,35	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Tabel 3. Penetapan Target Kegiatan RB Tematik Tahun 2023 dalam Road Map RB 2020-2024

Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target	
			2023	2024
Pengentasan Kemiskinan				
Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait pengentasan kemiskinan	Persentase Naskah Akademik dan RUU, UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU yang terkait pengentasan kemiskinan	100%	100%	100%
Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	Jumlah analisis/kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	4	5	6
Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan pengentasan kemiskinan	Jumlah analisis/kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah	21	23	24
Peningkatan Investasi				
Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait investasi	Persentase Naskah Akademik dan RUU, UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU yang terkait investasi	100%	100%	100%
Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait investasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	Jumlah analisis/kajian terkait investasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	3	4	5
Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan investasi	Jumlah analisis/kajian terkait investasi dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah	12	14	16
Pengendalian Inflasi				
Tersedianya dukungan Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait inflasi	Persentase UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU yang terkait inflasi	100%	100%	100%
Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait inflasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	Jumlah analisis/kajian terkait inflasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	2	3	4

Sasaran Tematik	Indikator	Baselin	Target	
		e (2022)	2023	2024
Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan inflasi	Jumlah analisis/kajian terkait inflasi dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah	12	15	18
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan				
Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait digitalisasi administrasi pemerintahan	Persentase Naskah Akademik dan RUU, UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU yang terkait digitalisasi administrasi pemerintahan	100%	100%	100%
Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	Jumlah analisis/kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	2	3	4
Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintahan	Jumlah analisis/kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah	4	5	6
Tersedianya layanan teknologi informasi pendukung fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang terintegrasi	Indeks Kepuasan DPR RI atas layanan teknologi informasi	3,31	3,50	3,55
Tersedianya anggaran belanja barang/jasa minimal 40% untuk penggunaan produk dalam negeri	Persentase penggunaan produk dalam negeri	40%	40%	40%

D. HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022

Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dilakukan dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1536/SEKJEN/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 1024/SEKJEN/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk Tahun 2022. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan

Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI.

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri PANRB melalui surat Nomor B/710/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, nilai evaluasi RB adalah **78,05** dengan kategori **“BB”** dengan rincian hasil evaluasi sebagaimana terlihat pada tabel 3 di bawah.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
I.	Pemenuhan	20.00	18.32	18.33
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10.00	5.76	6.80
III.	Reform	30.00	21.10	20.64
	Total Komponen Pengungkit	60.00	45.18	45.77
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10.00	7.54	7.71
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10.00	8.57	9.90
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10.00	8.49	8.27
4.	Kinerja Organisasi	10.00	7.41	6.40
	Total Komponen Hasil	40.00	32.01	32.28
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100.00	77.19	78.05

Tabel 4. Kategori Penilaian RB dan Interpretasi

No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi
2.	A	>80-90	Memuaskan	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.

No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
5.	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

*PermenPANRB No.26 Tahun 2020

Sedangkan hasil antara area perubahan pada Setjen DPR RI dapat dilihat pada tabel di bawah dimana sebanyak 10 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*.

Tabel 5. Penilaian Hasil Antara Setjen DPR RI Tahun 2022

No	Hasil Antara	Skala	2021	2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	291.50	345.5	Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	3.17	3.60	Kementerian Keuangan
3.	ASN Profesional	0-100	40.54	64.54	Badan Kepegawaian Negara
4.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2.84	2.95	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	20.00	9.90	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Republik Indonesia
6.	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-10	88.10	94.26	Kementerian Keuangan
7.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3.35	4.31	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
8.	Kapabilitas APIP	0-5	2+	2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	73.08	77.99	Arsip Nasional Republik Indonesia

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan kualitas pada sebagian besar hasil antara. Dari 10 hasil antara yang dinilai, hanya penilaian terhadap Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang mengalami penurunan pada Tahun 2022.

Penilaian terhadap komponen hasil juga dilakukan oleh instansi lain sebagai *leading sector* dengan komponen sebagai berikut:

Tabel 6. Penilaian Atas Komponen Hasil Setjen DPR RI Tahun 2022

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	67.28	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	99.00	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	82.71	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	80.11	SPI Internal oleh KPK

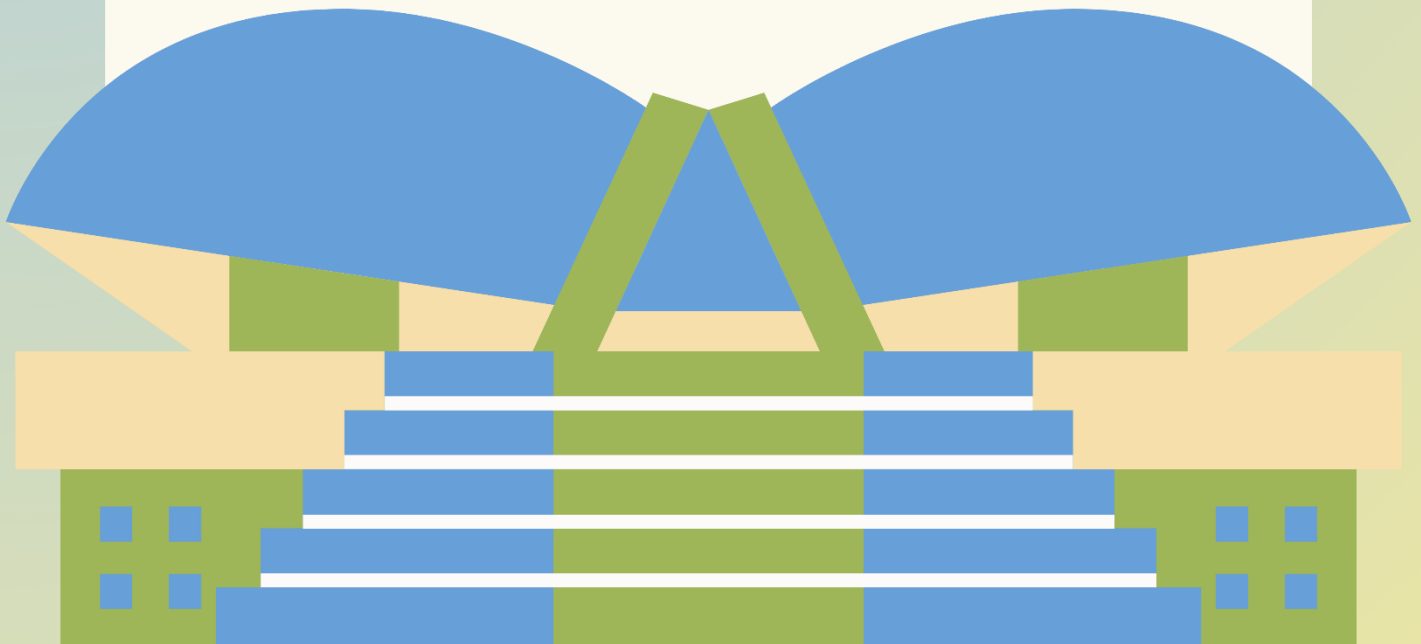
Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, KemenPANRB memberikan rekomendasi atas pelaksanaan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI yaitu:

1. Melakukan evaluasi berkala terhadap rencana aksi Agen Perubahan, sehingga proyek perubahan yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan, dan Mekanisme dalam memberikan penghargaan bagi Agen Perubahan yang telah berhasil membangun atau yang telah sesuai dengan target rencana kerjanya;
2. Menetapkan pedoman *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dalam regulasi yang baku sehingga dapat diterapkan pada proses penyusunan seluruh naskah akademik peraturan perundang-undangan di lingkungan Setjen DPR RI;
3. Melanjutkan proses integrasi berbagai aplikasi yang telah dibangun secara mandiri maupun aplikasi umum berbagi pakai yang ada, dan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penggunaan aplikasi yang telah dibangun secara mandiri maupun aplikasi umum berbagi pakai;
4. Melakukan penyesuaian proses bisnis sesuai dengan struktur organisasi hasil penyederhanaan, menuangkan proses bisnis sesuai dengan struktur organisasi ke dalam SOP Setjen DPR RI, dan monitoring dan evaluasi terhadap SOP yang telah disusun untuk memastikan bahwa SOP masih relevan;
5. Memanfaatkan hasil asesmen serta pemetaan talenta yang telah dilakukan sebagai dasar pemetaan mutasi, rotasi pegawai, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan penempatan pegawai dalam jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan;
6. Meningkatkan kapasitas dan peran Tim Penilai Internal (TPI) agar mampu memberikan saran perbaikan bagi unit kerja dalam membangun Zona Integritas, menuju WBK/WBBM;
7. Meningkatkan kapasitas dan peran Tim Penilai Internal (TPI) agar mampu memberikan saran perbaikan bagi unit kerja dalam membangun Zona Integritas, menuju WBK/WBBM.

CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SETJENDPR RI TAHUN 2023

Bab III



A. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023

A. Reformasi Birokrasi General

RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran Road Map RB setelah penajaman. Pada tingkatan instansional/level mikro, dalam hal ini Setjen DPR RI, pelaksanaan RB mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso serta program inovasi RB yang diperlukan untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB. Dalam Road Map RB Nasional setelah penajaman, terdapat 21 Kegiatan Utama Level Mikro beserta indikatornya. Berikut ini adalah monev atas rencana aksi RB General dan capaiannya Tahun 2023.

1. Penyederhanaan Birokrasi: Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
KemenPANRB	4	8,24	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Penyusunan kajian penyederhanaan birokrasi	Jumlah kajian penyederhanaan birokrasi		1			Telah Terlaksana kajian penyederhanaan birokrasi
Penyampaian usulan penyederhanaan birokrasi	Jumlah surat usulan penyederhanaan birokrasi		1			Telah Terlaksana surat usulan
Penetapan struktur organisasi berdasarkan surat persetujuan penataan organisasi	Jumlah peraturan sekjen ttg perubahan persekjen OTK			1		Telah Terlaksana peraturan sekjen ttg perubahan persekjen OTK

Pada tanggal 23 Mei 2023, telah dikirim Surat Sekjen DPR RI Nomor: B/6160/OT.01/05/2023, perihal : Usulan Penyederhanaan Birokrasi Setjen DPR RI Tahap 2. Pada 23 Agustus telah dilakukan expose usulan berdasarkan undangan KemenPANRB dan dihadiri oleh unit kerja yang akan dilakukan penyederhanaan birokrasi. Pembahasan konsep Persekjen dilakukan pada tanggal 7 September dengan KemenPANRB dan Biro Hukum dan Dumas. Surat persetujuan dari MenPANRB diterbitkan dengan Surat MenPANRB Nomor B/1067/M.KT.01/2023 perihal Persetujuan Penyederhanaan Birokrasi Setjen DPR RI Tahap 2 pada tanggal 14 September 2023.

Unit kerja yang dilakukan penyederhanaan struktur organisasi yaitu unit kerja yang dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh jabatan fungsional dan telah tercantum dalam peta jabatan. Unit kerja yang tidak dilakukan penyederhanaan

struktur organisasi yaitu unit kerja yang dalam pelaksanaan tugasnya belum memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional, beban dan kompleksitas pekerjaan yang tinggi dalam melayani 575 Anggota DPR RI dan 25 Alat Kelengkapan Dewan. Unit kerja yang melaksanakan layanan Pengadaan Barang/Jasa kerja termasuk unit yang tidak dilakukan penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2021.

Berikut ini adalah Unit Kerja Setjen DPR RI Tahap 2 yang disederhanakan:

1. Subbagian Perumusan Produk Hukum
2. Subbagian Evaluasi Produk Hukum
3. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum
4. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
5. Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat I
6. Subbagian Analisis Pengaduan Masyarakat II
7. Subbagian Kas dan Pembukuan
8. Subbagian Penggajian
9. Subbagian Pelaporan Keuangan

Pada Tanggal 27 September 2023, telah dilakukan pengisian Penyederhanaan Struktur Organisasi ke dalam tautan <https://evinbalaks.spbe.go.id> sesuai dengan SE MenPANRB Nomor 15 tahun 2023.

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/C2DMMBcnnGYmx8y>

2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
KemenPANRB	-	3	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Menyusun Keputusan Sekjen terkait Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel Bagi Pegawai ASN	Jumlah Surat Keputusan terkait Sistem Kerja Baru			1		Telah Terlaksana Surat Keputusan terkait Sistem Kerja Baru

Pada tanggal 27 September 2023 telah dilakukan pengisian dalam aplikasi KemenPANRB. Selain itu Setjen DPR RI telah menetapkan Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 2194 Tahun 2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/NiywodH2bPoY32E>

3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional:

a. Indeks SPBE

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
KemenPANRB	2,95	3,5	Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Evaluasi kebijakan Keamanan Informasi	Jumlah dokumen Persekjen tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai ISO 27001:2022	1	-	-	-	
Penyusunan Grand Desain Keamanan Informasi	Persentase terbentuknya Grand Desain Keamanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	50 %	50 %	Telah Terlaksana Dokumen terkait penyusunan GDKI:
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Aplikasi	Jumlah dokumen Persekjen tentang Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI-	-	-	1	-	Telah Terlaksana Dokumen terkait Kebijakan Pengelolaan Aplikasi:
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan terkait Infrastruktur, dan Pusat Data	Jumlah dokumen Persekjen tentang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pusat Data	-	-	-	1	Masih Dalam Proses Dokumen terkait Kebijakan Infrastruktur dan Pusat Data:
Pelaksanaan Audit TIK Eksternal	Jumlah kegiatan Audit Teknologi Informasi	-	-	1	-	Telah Terlaksana Dokumen Audit TIK
Pembangunan Portal Satu Data DPR dan Open Data DPR	Persentase tersedianya Portal Satu Data DPR	10%	30 %	30 %	30 %	Masih Dalam Proses Dokumen terkait pembangunan Portal Satu Data DPR:

Penilaian Mandiri sudah disubmit dengan hasil 3,9. Telah dilakukan verifikasi lapangan secara online oleh KemenPAN RB pada tanggal 22 September 2023.

Progres pelaksanaan indeks SPBE:

- Telah ditetapkan Persekjen Nomor 4 Tahun 2023 tentang SMKI DPR RI;
- Layanan TI Pustekinfo telah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2022 keamanan informasi;
- Telah ditetapkan Persekjen No. 4 Tahun 2023 tentang SMKI DPR RI;

- d. Telah ditetapkan SK Pedoman Pengelolaan Aplikasi dan Petunjuk Teknis Pembangunan/Pengembangan Aplikasi;
- e. Telah selesai dilakukan penerapan dan sinkronisasi Arsitektur SPBE Setjen DPR RI ke aplikasi SIA SPBE KemenPANRB.

b. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
KemenPANRB	-	5	Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Penyusunan Arsitektur SPBE dan input pada aplikasi SIA SPBE	Jumlah Laporan Arsitektur SPBE Setjen DPR RI			1		Telah Terlaksana Laporan Arsitektur SPBE Setjen DPR RI

Perkembangan indikator tingkat implementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE sampai dengan triwulan 3 yaitu telah selesai dilakukan input dan sinkronisasi data Arsitektur SPBE pada aplikasi SIA SPBE KemenPANRB dari arsitektur As-Is telah dikembangkan menjadi arsitektur To-Be dengan domain sebagai berikut :

- 15 Arsitektur Proses Bisnis
- 81 Arsitektur Layanan
- 309 Arsitektur Data dan Informasi
- 107 Arsitektur Aplikasi
- 136 Arsitektur Infrastruktur
- 27 Arsitektur Keamanan

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/yoDyFXKc9TCTCxt>

4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai SAKIP

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
KemenPANRB	67,28	75	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Penguatan Perencanaan Kinerja						
Penyusunan Renja 2024	Jumlah dokumen Renja 2024	1				Telah Terlaksana Rekapitulasi KL - KRISNA 2024 Rekapitulasi Program - KRISNA 2024

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA 2024 kepada seluruh unit kerja	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA 2024	2				Telah Terlaksana Bimtek Penyusunan RKA dan Capaian Output Anggaran
Pembangunan Aplikasi e-SAKIP	Jumlah Aplikasi e-SAKIP				1	Tahap pembangunan ss aplikasi e-sakip ss website e-sakip
Pembuatan crosscutting dan pohon kinerja	Jumlah dokumen crosscutting dan pohon kinerja			1		Telah Terlaksana POHON KINERJA SETJEN DPR RI 2023
Penyusunan Laporan Reviu Perubahan Indikator dan Target Kinerja PK 2023 berdasarkan perubahan struktur organisasi dan tindaklanjut rekomendasi AKIP	Jumlah Laporan Reviu Perubahan Indikator dan Target Kinerja PK 2023		1			Telah Terlaksana Laporan Reviu Perubahan Indikator dan Target Kinerja PK 2023
Penguatan Pengukuran Kinerja						
Pelaksanaan bimtek pengisian capaian kinerja unit kerja pada aplikasi DigitAll	Jumlah bimtek pengisian capaian kinerja unit kerja pada aplikasi DigitAll	1				Telah Terlaksana Bimtek Penyusunan RKA dan Capaian Output Anggaran
Melakukan pemantauan progres realisasi anggaran dan capaian output unit kerja	Jumlah laporan monev pelaksanaan kinerja dan anggaran TA 2023	1	1	1	1	Telah terlaksana monev semester 1 Laporan Monev Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran TA 2023 Monitoring Kinerja Anggaran
Penguatan Pelaporan Kinerja						
Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022 untuk seluruh unit Eselon I dan II dan dilaporkan melalui esr.menpan.go.id dan rb.dpr.go.id	Jumlah LKj Setjen DPR RI tahun 2022 dan mengunggahnya ke esr.menpan dan rb.dpr.go.id	26				Telah Terlaksana LKj Setjen DPR RI Tahun 2022
Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektorat untuk memastikan kualitas laporan kinerja sesuai dengan PerMenpan Nomor 53 Tahun 2014 dan	Jumlah reviu atas Laporan Kinerja oleh Inspektorat untuk memastikan kualitas laporan kinerja sesuai dengan PerMenpan Nomor 53 Tahun 2014 dan	1				Telah Terlaksana Hasil reviu Laporan Kinerja Setjen DPR RI

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pemanfaatan laporan kinerja dalam menyusun dokumen Perencanaan Kinerja	Jumlah dokumen PK berdasarkan hasil capaian dalam laporan kinerja			1		Telah Terlaksana ss executive summary dan PK sekjen terbaru
Penguatan Evaluasi Kinerja Internal						
Pelaksanaan Evaluasi AKIP di tingkat Instansi, Eselon I dan Eselon II	Jumlah kegiatan Evaluasi AKIP di tingkat Instansi, Eselon I dan Eselon II			5		Telah Terlaksana Laporan evaluasi SAKIP internal 2023
Pemberian reward atas implementasi SAKIP unit kerja tahun 2023	Jumlah kegiatan Pemberian reward atas implementasi SAKIP unit kerja tahun 2023			1		Telah Terlaksana PERINGKAT SAKIP ESELON II Reward Implementasi SAKIP Tahun 2023
Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP internal	Jumlah Pelaksanaan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP internal	1				Telah Terlaksana Laporan pemantauan tindak lanjut

Progres yang telah dilakukan:

a. Perencanaan Kinerja

1. Telah dilakukan reviu atas penetapan target kinerja Tahun 2023 dan menyesuaikan target kinerja sesuai capaian kinerja Tahun 2022;
2. Melakukan revisi dokumen perencanaan kinerja, yakni:
 - Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 (revisi ke 2 perubahan struktur organisasi);
 - Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (perubahan struktur organisasi);
 - Kamus Indikator Kinerja Utama (perubahan);
 - Penyusunan pohon kinerja yang telah memperhatikan *Critical Success Factor* berdasarkan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021;
 - Menyusun Rencana Aksi Eselon I dan II terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
 - Memperbaiki target kinerja menjadi lebih SMART.
3. Perubahan dokumen perencanaan kinerja juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari perubahan struktur organisasi.

b. Pengukuran Kinerja

1. e-Kinerja

Setjen DPR RI menjadi pilot project aplikasi e-Kinerja BKN. Penyusunan Renaksi, SKP, pengukuran, pengumpulan data kinerja individu dan penilaian kinerja sudah dilakukan melalui aplikasi e-Kinerja setiap periode 3 bulanan.

2. DigitAll

Pengukuran kinerja unit kerja dilakukan melalui aplikasi DigitAll setiap bulan, dan dapat dilakukan pemantauan terhadap capaian output dan realisasi anggaran.

3. MONEV

Pelaksanaan monev kinerja dan anggaran dilakukan oleh BURT dan Pimpinan Setjen DPR RI setiap semester.

4. e-SAKIP

Dalam rangka peningkatan kualitas AKIP dan pengintegrasian proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dalam satu platform, sedang dikembangkan aplikasi e-SAKIP.

c. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja telah disusun dari tingkat instansi, eselon I dan II, dan direviu APIP utk memastikan Laporan Kinerja sesuai dengan Persekjen No. 2 Tahun 2019.

2. Laporan Kinerja tahun 2022 telah digunakan sebagai dasar penetapan target kinerja pada dokumen Revisi Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 dan dokumen Revisi Perjanjian Kinerja 2023, diharapkan terjadi peningkatan capaian kinerja yg berkelanjutan

3. Evaluasi Internal

4. Ittama telah melaksanakan perannya sbg evaluator mulai dari proses perencanaan sampai kepada proses pelaporan kinerja

5. Telah memiliki Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Setjen DPR RI sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi SAKIP

6. Pemberian reward kepada unit kerja dgn penilaian SAKIP terbaik yg dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai evaluator internal

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Gk4ykTkTEd3CdWM>

laporan tindak lanjut atas rekomendasi terdapat di link <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/36RSSfSRpLFS85q>

5. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
KemenPANRB	4 unit	5 unit	Inspektorat I dan II



Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Penetapan unit kerja pembangunan ZI pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Jumlah SK pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	1				Telah Terlaksana SK pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Pendampingan pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama	Jumlah Laporan Pendampingan ZI		5			Telah Terlaksana Laporan Pendampingan ZI
Penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi ZI	Jumlah LKE Unit ZI		5			Telah Terlaksana LKE Unit ZI
Evaluasi pembangunan ZI oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk diajukan ke TPN	Jumlah Surat Pengajuan Unit Kerja menuju WBK		1			Telah Terlaksana Surat pengajuan unit kerja menuju WBK
Proses evaluasi oleh TPN	1. Jumlah Surat Undangan wawancara			1		Telah Terlaksana
	2. Jumlah Surat permintaan validasi survei ZI			1		Telah Terlaksana
	3. Jumlah Verifikasi lapangan unit ZI			1		Telah Terlaksana
	4. Jumlah LHE Kemen PAN RB				1	Menunggu LHE diterbitkan eviden

Tahun 2023, Setjen DPR mengusulkan 5 Unit kerja eselon II untuk dinilai sebagai unit predikat WBK yakni Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Persidangan I, Biro SDMA, Biro Hukum dan Dumas dan Pustekinfo. Dari 5 usulan tersebut, 2 unit kerja telah lolos administrasi (Biro Kesekretariatan Pimpinan dan Biro Persidangan I), 2 unit kerja lolos administrasi dengan catatan (Biro Hukum dan Dumas dan Pustekinfo), dan 1 unit kerja tidak lolos administrasi (Biro SDMA). Sudah dilakukan validasi data utk 2 unit kerja yang lolos administrasi dengan catatan dan sudah dilakukan verifikasi lapangan oleh KemenPANRB pada tanggal 19 September pada Biro Hukum dan Dumas serta Pustekinfo.

Pada tanggal 28 November 2023, Setjen DPR RI menerima undangan untuk menghadiri Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023, dimana Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dinobatkan sebagai penerima Anugerah Zona Integritas di Setjen DPR RI dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi.



Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Cy4ebt25mBwmTJT>

6. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
BPKP	Level 3 (3,185)	Level 3 (3,228)	Inspektorat II

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Penyesuaian dokumen perencanaan kinerja karena adanya perubahan struktur organisasi dan tindak lanjut rekomendasi AKIP oleh KemenPAN RB	Jumlah Laporan Reviu Perubahan Indikator dan Target Kinerja PK 2023		1			Telah Terlaksana Laporan Reviu Perubahan Indikator dan Target Kinerja PK 2023
Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022 untuk seluruh unit Eselon I dan II dan dilaporkan melalui esr.menpan.go.id dan rb.dpr.go.id	Jumlah laporan kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022	26				Telah Terlaksana LKj Setjen DPR RI Tahun 2022
	Jumlah pengunggahan laporan kinerja dalam esr.menpan.go.id dan rb.dpr.go.id	1				Telah terlaksana Ss esr.menpan.go.id dan website rb.dpr.go.id
Pelaksanaan identifikasi dan analisis risiko serta rencana tindak pengendaliannya diseluruh eselon II, eselon I dan tingkat Setjen DPR RI	Jumlah Risk register unit kerja eselon II, eselon I dan Setjen DPR RI				26	Telah Terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	Jumlah LMPR sesuai Persekjen 10 tahun 2021				1	Telah Terlaksana
Penyusunan pedoman <i>Fraud Control Plan</i> dan pedoman turunannya	Jumlah dokumen Pedoman, peta proses bisnis dan SOP				3	Telah Terlaksana

Penilaian mandiri SPIP terintegrasi Tahun 2022 telah terbit dengan surat BPKP Nomor PE.09.02/SP-166/D2/02/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022. Berdasarkan surat tersebut, berikut ini hasil evaluasi:

a. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D (skor **95,69%**), sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Evaluasi atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

No	Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Rata-Rata Tertimbang
1	Persiapan	92,08%	20,00%	18,42%
2	Pelaksanaan	100,00%	60,00%	60,00%
3	Penyusunan Laporan Penilaian	86,36%	20,00%	17,27%
Rata-rata Skor				95,69%

b. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik / (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,328	3,239	(0,089)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,364	3,350	(0,014)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	4,322	3,432	(0,890)

Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi 2023 telah dilaksanakan dan evaluasi sudah dilakukan oleh BPKP sebagai *leading sector*. Nilai Evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2023 Setjen DPR RI memperoleh nilai 3,27. Saat ini Setjen DPR RI telah melakukan pembangunan *Fraud Control Plan* dalam rangka peningkatan implementasi SPIP di Setjen DPR RI.

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/wGRCpabSFki8tya>

7. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR)

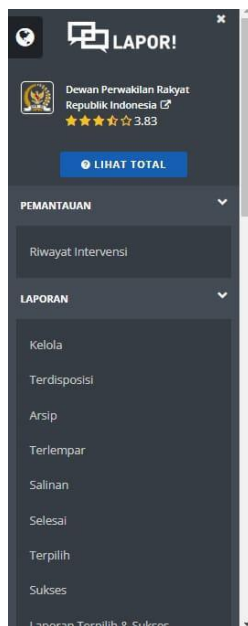
Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
KemenPANRB	100%	100%	Biro Hukum dan Dumas

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Optimalisasi Pemanfaatan Data dan Aplikasi	Jumlah laporan survei	1				Telah Terlaksana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi
	Jumlah notulensi/laporan hasil rapat pengelolaan pengaduan yang dapat diakses oleh unit-unit kerja pengelola pengaduan.	3	3	3	3	Telah Terlaksana TW 1 : 1. Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat TW 2 : 1. Rapat Integrasi Aplikasi SIDUMAS dan SP4N-LAPOR! Pengaduan Masyarakat DPR RI dengan Kemenpan RB RI 2. Focus Group Discussion Pembahasan Aplikasi SP4N-LAPOR! dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 3. Rapat Penyelesaian Surat-Surat Aspirasi/Pengaduan Masyarakat dengan Set, Pimpinan, dan Set Komisi TW 3 :

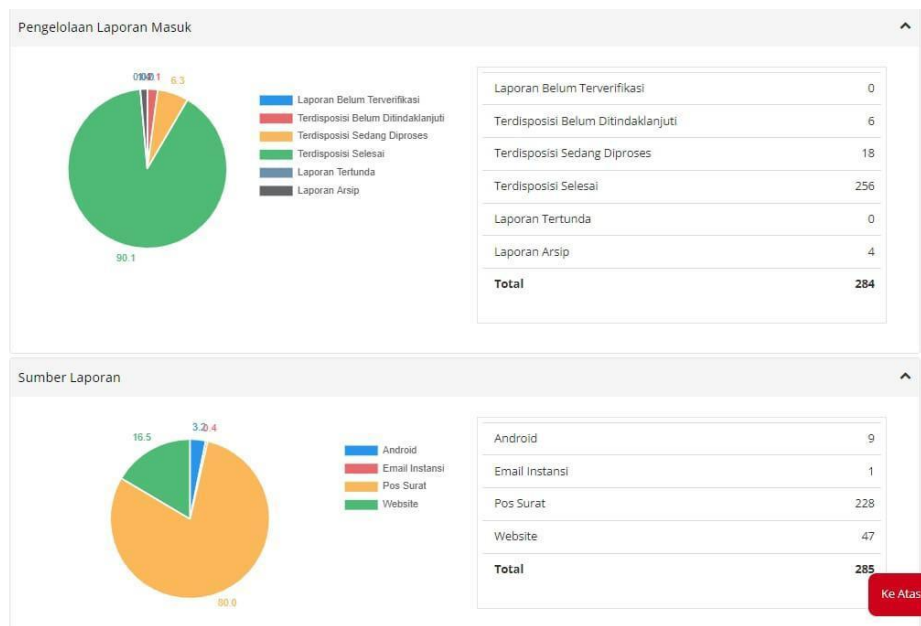
Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						1. Rapat Integrasi Aplikasi SIDUMAS dan SP4N-LAPOR! Pengaduan Masyarakat DPR RI dengan Kominfo RI
Penguatan Sumber Daya Manusia	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi teknis pengelola SP4N LAPOR!	1	1	1		<p>Telah Terlaksana</p> <p>TW 1 :</p> <p>Sosialisasi Persekjen No. 22 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat kepada DPR RI (Narsum Kemenpan RB, Dumas Setjen DPR RI, Pustekinfo DPR RI)</p> <p>TW 2 :</p> <p>1. Focus Group Discussion Pembahasan Aplikasi SP4N-LAPOR! dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Narsum Kemenpan RB, Kominfo)</p> <p>TW 3 :</p> <p>1. Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SP4N-LAPOR! (Narsum Kemenpan RB, Kominfo, dan Pustekinfo Setjen DPR RI)</p>
Peningkatan Partisipasi Pemangku Kepentingan	Jumlah publikasi kanal dan mekanisme pengaduan DPR RI dengan media sosial	2			1	<p>Telah Terlaksana</p> <p>TW 1 :</p> <p>1. Infografis Teknis Pengelolaan Pengaduan/Aspirasi Masyarakat</p>

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						<p>2. Video Pengaduan Masyarakat</p> <p>TW 4 : Publikasi Kanal SP4N-LAPOR</p>
	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat yang ditangani oleh pengelola SP4N-LAPOR!				100 %	Telah Terlaksana Statistik SP4N-LAPOR! TW 4 Tahun 2023
Penguatan Kelembagaan	SK Tim Pengelolaan Pengaduan masyarakat, SK Penunjukan ADMIN LAPOR!	1				<p>Telah Terlaksana</p> <p>TW 1 : SK Tim SP4N LAPOR!</p> <p>TW 2 : SK Tim SP4N – LAPOR diperbarui karena adanya mutasi pegawai di lingkungan Setjen DPR RI, penunjukan Admin dan Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR dilakukan atas dasar komitmen dalam penguatan kelembagaan.</p> <p>TW 3 : SK Tim SP4N-LAPOR! Perubahan</p>
Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi	Jumlah rapat koordinasi pembahasan tindak lanjut pengaduan dengan unit kerja yang dituju & Tim kerja Integrasi pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat	3	3	3	3	<p>Telah Terlaksana</p> <p>TW 1 : Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</p> <p>Sosialisasi Persekjen No. 22 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan</p>

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						<p>Masyarakat kepada DPR RI</p> <p>TW 2 :</p> <p>Focus Group Discussion Pembahasan Aplikasi SP4N-LAPOR! dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</p> <p>Rapat Penyelesaian Surat-Surat Aspirasi/Pengaduan Masyarakat dengan Set, Pimpinan, dan Set Komisi</p> <p>TW 3:</p> <p>Rapat Integrasi SIDUMAS dan SP4N-LAPOR! Dengan Kominfo</p> <p>Bimtek SP4N-LAPOR!</p> <p>Rapat Penyelesaian Pengaduan</p>



The screenshot shows the LAPOR! mobile application interface. At the top, there is a header with the LAPOR! logo and the text 'Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia' with a 3.83 star rating. Below this is a 'LIHAT TOTAL' button. The main menu is divided into two sections: 'PEMANTAUAN' (Monitoring) with 'Riwayat Intervensi' and 'LAPORAN' (Reports) with 'Kelola', 'Terdisposisi', 'Arsip', 'Terlempar', 'Salinan', 'Selesai', 'Terpilih', and 'Sukses'. At the bottom, there is a 'Laporan Terpilih & Sukses' option.



The screenshot shows the LAPOR! web dashboard. The top section is 'Pengelolaan Laporan Masuk' (Incoming Report Management), featuring a pie chart and a table. The pie chart shows the distribution of reports by status: 90.1% (green, Terdisposisi Selesai), 6.3% (orange, Terdisposisi Sedang Diproses), 1.1% (red, Terdisposisi Belum Ditindaklanjuti), 0.0% (blue, Laporan Belum Terverifikasi), and 2.5% (grey, Laporan Arsip). The table below lists the counts for each status.

Status	Jumlah
Laporan Belum Terverifikasi	0
Terdisposisi Belum Ditindaklanjuti	6
Terdisposisi Sedang Diproses	18
Terdisposisi Selesai	256
Laporan Tertunda	0
Laporan Arsip	4
Total	284

The bottom section is 'Sumber Laporan' (Report Sources), featuring another pie chart and a table. The pie chart shows the distribution of reports by source: 80.0% (orange, Pos Surat), 16.5% (green, Website), 3.2% (blue, Android), and 0.4% (red, Email Instansi). The table below lists the counts for each source.

Sumber	Jumlah
Android	9
Email Instansi	1
Pos Surat	228
Website	47
Total	285





Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6y6ibjcwL65MaY>

8. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
KemenPANRB	77,43	78,9	Inspektorat I dan II

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Penyusunan matrik tindak lanjut hasil SPI KPK tahun 2022	Jumlah Laporan matrik tindak lanjut SPI		1			Telah terlaksana Laporan matrik tindak lanjut SPI
Pengumpulan data responden SPI KPK untuk internal, eksternal dan eksper	Jumlah dokumen daftar responden SPI KPK baik internal, external dan eksper		1			Telah terlaksana Daftar nama responden Responden tambahan
Monitoring penyebaran survei kepada responden internal, eksternal dan eksper	Jumlah dokumen monitoring penyebaran survei kepada responden internal, eksternal dan eksper				1	Ss monitoring perolehan responden

Hasil Penilaian SPI Setjen DPR RI tahun 2022 sebesar 77,43. Untuk tahun 2023 pelaksanaan survei ini berlangsung bulan Juli sampai Oktober 2023. Hasil SPI Tahun 2023 Setjen DPR RI adalah 59,7.

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/W2WQy7xfpWT5NjG>

9. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik: Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
Lembaga Administrasi Negara	34,82	75	Biro Hukum dan Dumas

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Melaksanakan Pemetaan Kebijakan dalam bentuk Peraturan Sekjen DPR RI	Jumlah dokumen peta keberlakuan Persekjen DPR RI				1	Data dinamis terus berjalan Peta keberlakuan Peraturan Sekjen DPR RI
Menyelenggarakan evaluasi terhadap Peraturan Sekjen DPR RI	Jumlah dokumen naskah laporan hasil evaluasi Peraturan Sekjen DPR RI			1		Telah Terlaksana Evaluasi Peraturan Sekjen DPR RI terkait Jabatan Fungsional Perisalah dan Asisten Perisalah yang merupakan kebijakan masuk kriteria penilaian Nota dinas penyampaian naskah
Menyelenggarakan Identifikasi dan analisis kebutuhan Peraturan Sekjen DPR RI untuk Prolegset Tahun 2024	Jumlah dokumen naskah laporan hasil identifikasi dan analisis kebutuhan Peraturan Sekjen DPR RI				1	Dalam proses menunggu usulan masuk Identifikasi dan analisis diawali dengan permintaan usulan Peraturan Sekjen DPR RI

Pelaksanaan IKK dilakukan dengan menyusun kebijakan atau Persekjen yang pengaturannya bersifat eksternal. Sudah diajukan 3 kebijakan untuk dilakukan evaluasi, dan disetujui 2. Sudah diajukan 2 orang enumerator agar dapat diberikan akses untuk pengisian LKE dalam aplikasi. Batas akhir penyelesaian LKE pada tanggal 10 Oktober 2023.

Selain itu, telah dilakukan pembentukan Tim Pemantauan Kemanfaatan Kebijakan dan kegiatan *Focus Group Discussion* dengan Lembaga Administrasi Negara.

Link Eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JeB72x5tLoRDbom>

10. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
Kementerian Hukum dan HAM	-	75	Biro Hukum dan Dumas

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Melaksanakan FGD dengan Kemenkumham terkait dengan aspek penilaian dalam IRH dan pendampingan dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi	Jumlah laporan singkat FGD dengan Kemenkumham terkait dengan aspek penilaian dalam IRH dan pendampingan		1			Telah Terlaksana Dokumentasi FGD

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi					
Pembentukan Tim Kerja dan Tim Asesor	Jumlah SK keaggotaan tim kerja dan tim asesor	2				Telah Terlaksana Keputusan Sekretaris Jenderal
Membuat surat pernyataan atas aspek penilaian yang tidak dilaksanakan Setjen DPR RI	Jumlah Surat pernyataan Sekjen atas aspek penilaian yang tidak dilaksanakan Setjen DPR RI			1		Telah terlaksana Surat pernyataan yang ditujukan kepada Tim Penilai Nasional dan Koordinator Wilayah IV
Kegiatan pengisian lembar kerja evaluasi serta pemenuhan data dukung	Jumlah Lapsing kegiatan pengisian LKE serta pemenuhan data dukung			2		Telah Terlaksana Dokumentasi pengisian LKE IRH
Membuat surat pernyataan atas aspek penilaian yang tidak dilaksanakan Setjen DPR RI	Jumlah Berita Acara atas Hasil Penilaian Mandiri oleh tim asesor			1		Telah Terlaksana Berita Acara Penilaian Surat pernyataan yang ditujukan kepada Tim Penilai Nasional dan Koordinator Wilayah IV

Pelaksanaan pengisian LKE IRH telah dilakukan dan telah dinilai mandiri oleh tim asesor yang dibentuk dan telah dilakukan submit pada tgl 31 Agustus 2023, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan surat B/9775/OT.05.01/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal Surat Pernyataan.

Adapun kelemahan aspek penilaian:

- a. Proses harmonisasi;
- b. Proses deregulasi dan reregulasi pemantauan undang-undang;
- c. Legal Drafter (belum disiapkan anggaran khusus peningkatan kompetensi).

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/KRFy6H2cBHJoo6Q>

11. Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
ANRI	77,99	85	Biro Protokol dan Humas

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Melakukan pendataan jenis arsip dari unit kerja yang akan di digitalisasi	Jumlah Daftar arsip usul alih media	1				Telah Terlaksana Daftar arsip usul alih media
Menentukan kriteria arsip yang akan di digitalisasi	Jumlah Surat Keterangan Rekomendasi alih media		1			Telah Terlaksana Surat rekomendasi
Pelaksanaan proses digitalisasi/alih media	Jumlah Laporan digitalisasi			1	1	Telah Terlaksana Surat Keterangan Rekomendasi alih media
Memverifikasi hasil digitalisasi	Jumlah Berita acara				1	Telah Terlaksana Berita acara

Pelaksanaan arsip digital ini merupakan salah satu aspek dalam penilaian pengawasan arsip. Pengawasan arsip sudah dilakukan kepada unit kerja eselon II. Penilaian dari ANRI sudah dilakukan dan sudah diverifikasi, dan hasil penilaian arsip digital Setjen DPR RI yaitu 98,38.

Alih Media (Digitalisasi) difokuskan kepada:

1. Personal File Anggota dan Pegawai,
2. Rancangan Undang Undang,
3. Kaset, Mini DV, CD dan DVD.

Arsip Yang Telah Dialih Mediakan (Digital)			
No.	Jenis Arsip	Jumlah	(%)
1	Arsip Konvensional	6.089 Berkas	20% dari total 227.932
2	Kaset Rekaman Suara	10.686 Kaset	berkas/kaset
3	Kaset Mini DV	1.620 Kaset	

Setjen DPR RI terus melakukan upaya pemantapan penggunaan Aplikasi SRIKANDI untuk mensukseskan Digitalisasi Arsip melalui:

- Penyusunan Buku Panduan Aplikasi SRIKANDI dan telah disosialisasikan di Portal Pegawai Setjen DPR RI;
- Penetapan SK dan SE Sekjen DPR RI terkait penggunaan Aplikasi SRIKANDI;
- Penguatan jaringan Internal dan kapasitas pengelola dengan melaksanakan pembelajaran ke beberapa instansi (ANRI, MPR, BPOM);
- Melaksanakan uji coba di 10 unit eselon I dan II pada bulan Maret sampai dengan Mei 2023.

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/s6Y6GRA3BL3KZNA>

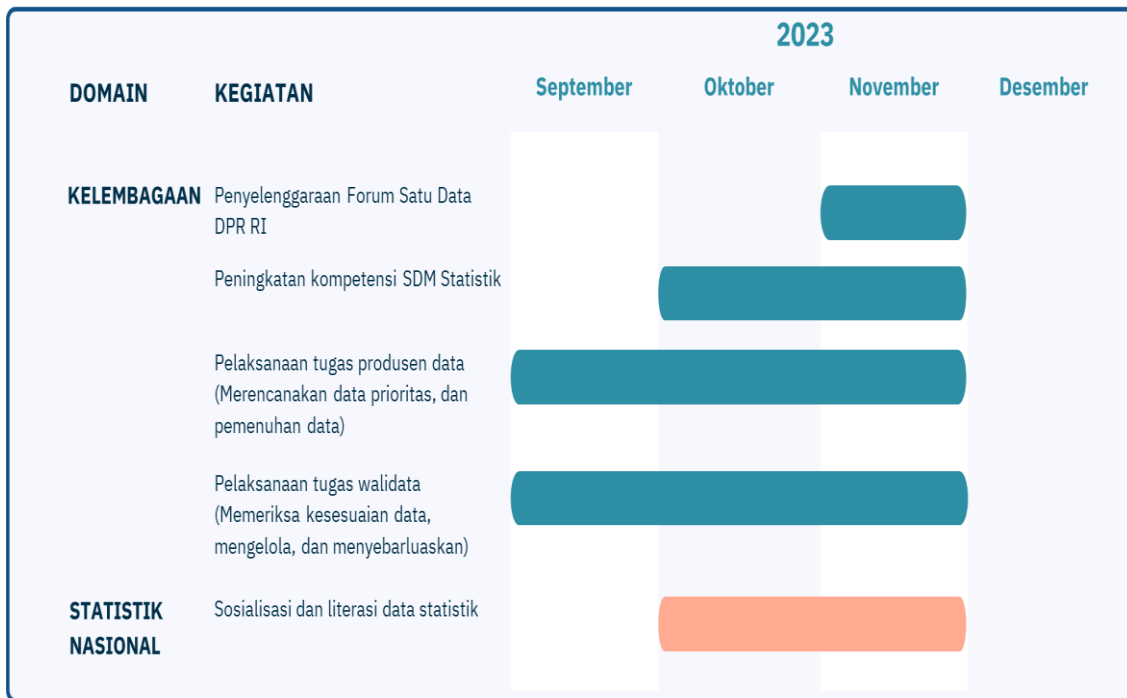
12. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
Badan Pusat Statistik	-	2,46	Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Berkoordinasi dengan BPS dalam rangka penggunaan aplikasi penilaian Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah lapsing FGD dengan BPS		1			Telah Terlaksana Dokumen koordinasi dengan BPS terkait data sektoral: Undangan dan lapsing rakor dengan BPS dan unit kerja terkait (12 Juni 2023) Workshop aplikasi Rekomendasi Statistik BPS (22 Juni 2023)
Membentuk tim evaluasi penyelenggara statistik sektoral	Jumlah SK tim evaluasi penyelenggara statistik sektoral	1				Telah Terlaksana SK Tim Penilai Internal Data Statistik Sektoral
Melakukan identifikasi (screening) kegiatan statistik sektoral	Data statistic sektoral yang memenuhi kategori untuk dijadikan penilaian pada EPSS		1			Telah Terlaksana Dokumen hasil pemetaan data statistik sektoral DPR RI Tahun 2023
Melaksanakan penilaian EPSS dan submit pada aplikasi	Jumlah indicator dan data dukung pada penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan statistic sektoral			1		Telah Terlaksana Hasil Penilaian EPSS Tahun 2023

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan. Berdasarkan keterangan dari narasumber BPS bahwa terdapat data di internal DPR RI yang termasuk dalam kategori data sektoral yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tugas dan pokok K/L lainnya sebagai data bersama. Untuk itu telah dilakukan penilaian mandiri pada bulan Juli dengan nilai sebesar 2,46 dari 5 dengan kategori “Cukup”.

Kegiatan yang akan dilakukan guna mencapai target hasil penilaian tingkat kematangan Data Statistik Sektoral:



Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Ttazrms4BDp8Jd8>

13. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
LKPP	9,9	71	Biro Umum

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Sosialisasi pemanfaatan sistem pengadaan	Jumlah Sosialisasi pemanfaatan sistem pengadaan surat edaran tentang pemanfaat sistem pengadaan	1				Telah Terlaksana Penginputan RUP 2023 pada Aplikasi SiRUP
Pendampingan pemanfaatan sistem pengadaan	Jumlah rekomendasi hasil pendampingan	2	1			Telah Terlaksana Kegiatan 2 -4 Maret 2023 Kegiatan 8-10 Juni 2023 Kegiatan 21-23 Agustus 2023
Pengajuan pengurangan jumlah SDM JFT PPBJ ke LKPP, semula 23 orang menjadi 5 orang	Jumlah Surat pengajuan ke LKPP	1	1	1		Telah Terlaksana Rekomendasi Formasi Pengelola Barang Jasa Jabfung PBJ Perhitungan ulang JFT PBJ Surat Permohonan Rekomendasi Formasi JF PBJ.pdfvvy
FGD Strategi Pemenuhan Jumlah SDM JFT PPBJ	Jumlah rekomendasi hasil FGD			2	2	Telah Terlaksana Kegiatan 20-22 Sept 2023 Surat Tugas
Penyerahan dokumen dan sertifikat standar LPSE ke LKPP untuk dinilai	Jumlah Penyampaian dokumen tingkat kematangan 9/9 variabel, dan 17 Standar LPSE		13		13	Telah Terlaksana Eviden indikator 3
Pendampingan pengisian dan penyerahan kelengkapan dokumen dan standar LPSE oleh LKPP	Jumlah rekomendasi hasil pendampingan			1	2	Surat undangan pendampingan maturitas UKPBJ
Pelaksanaan survey internal atas pemahaman UKPBJ	Jumlah pelaksanaan survey internal atas pemahaman UKPBJ				1	Hasil Survei UKPBJ DPRRI
Reviu APIP tentang implementasi tugas dan fungsi UKPBJ	Jumlah rekomendasi hasil reviu APIP				1	Permohonan reviu APIP Disposisi permohonan reviu atas implementasi tugas dan fungsi UKPBJ

Penilaian ITKP diambil dari aplikasi LPSE oleh LKPP setiap tahunnya. ITKP perlu menjadi perhatian karena menjadi prioritas utama dalam perubahan Road Map RB Setjen DPR RI mengingat penilaian Tahun 2022 masih rendah sebesar 9,90 dari nilai 100 dan hasil sementara tahun 2023 mendapat nilai sebesar 47.18. Adapun Indikator penilaian terdiri dari:

I. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, bobot 30%

a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) (10%)

Penilaian sementara Tahun 2023 masih 0

Basis data RUP TA 2023 datanya ditarik pada tanggal 1 April 2023 oleh LKPP. Setjen DPR RI telah melakukan pengumuman pada aplikasi SiRUP sebesar Rp615 Milyar dari anggaran PBJ sebesar Rp4,9 Triliun.

PPK di lingkungan Setjen DPR RI belum melakukan penginputan seluruh RUP pada aplikasi SiRUP. Hal ini mengakibatkan bobot nilai untuk SiRUP Setjen DPR RI masih 0, karena RUP yang diinput kurang dari 50% dari pagu anggaran PBJ.

b. E-Tendering (Tender Seleksi/Tender Cepat) (5%)

Penilaian sementara Tahun 2023 memperoleh nilai 4,10

Basis data realisasi dan RUP TA 2022 datanya ditarik pada tanggal 31 Januari 2023 oleh LKPP. e-Tendering tidak dapat mencapai nilai 5% dikarenakan pada TA 2022 terdapat beberapa tender pengadaan yang batal dilaksanakan sehingga bobot nilai untuk e-Tendering Setjen DPR RI masih sebesar 4,1%.

c. E-Purchasing, bobot 4%

Penilaian sementara Tahun 2023 masih 0

Basis data adalah penggunaan Katalog Elektronik TA 2022 yang datanya ditarik oleh LKPP pada tanggal 31 Januari 2023. Nilai e-Purchasing masih 0 dikarenakan para PPK yang telah menyelesaikan paket pekerjaan secara elektronik tidak melakukan pencatatan pada aplikasi e-katalog sampai dengan tahap serah terima paling lambat tanggal 31 Januari Tahun 2023.

d. Toko Daring, bobot 1%

Penilaian sementara Tahun 2023 memperoleh nilai 1

Toko Daring bobot nilainya sudah tercapai sebesar 1 %

e. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing, bobot 5%

Penilaian sementara Tahun 2023 masih 0

Basis data SPSE TA 2022 yang datanya ditarik oleh LKPP pada tanggal 31 Januari 2023. Nilai e-Kontrak masih 0 dikarenakan para PPK tidak melakukan penginputan data kontrak untuk seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan pada fitur e-Kontrak di aplikasi SPSE.

f. E-Kontrak, bobot 5%

Penilaian sementara Tahun 2023 masih 0

Basis data SPSE TA 2022 yang datanya ditarik oleh LKPP pada tanggal 31 Januari 2023. Nilai e-Kontrak masih 0 dikarenakan para PPK tidak melakukan penginputan data kontrak untuk seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan pada fitur e-Kontrak di aplikasi SPSE.

Basis data SPSE (transaksional dan pencatatan) dan RUP TA 2022 yang datanya ditarik oleh LKPP pada tanggal 31 Januari 2023. Bobot nilainya masih 0 dikarenakan pada TA. 2022 pengadaan barang/jasa yang nilainya dibawah Rp.200 juta oleh para PPK tidak dicatat pada aplikasi SPSE dan tidak diinput RUPnya pada aplikasi SiRUP.

1. Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan:

a) SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan)

$$\frac{\text{Nilai pagu RUP 2022}}{\text{Nilai Belanja Pengadaan 2022}} \times 100\% \times \text{Bobot}$$

b) e-Tendering

$$\frac{\text{Nilai pagu realisasi eTendering 2021}}{\text{Nilai pagu RUP eTendering 2021}} \times 100\% \times \text{Bobot}$$

c) e-Purchasing

$$\frac{\text{Jumlah Paket ePurchasing selesai 2021}}{\text{Jumlah Paket ePurchasing aktif 2021}} \times 100\% \times \text{Bobot}$$

d) Non e-Tendering & Non e-Purchasing

$$\frac{\text{Nilai pagu realisasi pengadaan langsung dan penunjukan langsung 2021}}{\text{Nilai pagu RUP pengadaan langsung dan penunjukan langsung 2021}} \times 100\% \times \text{Bobot}$$

e) e-Kontrak

$$\frac{\text{Jumlah paket yang dicatatkan dalam eKontrak 2021}}{\text{Jumlah paket eTendering + non eTendering & non ePurchasing transaksional 2021}} \times 100\% \times \text{Bobot}$$

II. Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barjas, bobot 30%

Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ skor sementara sebesar 6.52 dikarenakan belum terpenuhinya JFT PBJ dimana rekomendasi dari LKPP JFT PBJ pada Setjen DPR RI adalah sebanyak 23 yang terdiri dari 15 orang JFT PBJ Pertama, 7 orang JFT PBJ Muda dan 1 orang JFT PBJ Madya, namun sampai saat ini JFT PBJ yang ditempatkan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa baru ada 5 orang JFT PBJ Pertama.

2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

$$\frac{\text{Jumlah JF PPBJ}}{\text{Formasi JF PPBJ}} \times 100\% \times \text{Bobot}$$

III. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barjas (UKPBJ), bobot 40%

Tingkat Kematangan UKPBJ skor sementara 35.56

Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk membentuk UKPBJ. Indikator tingkat kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai level 3 (proaktif) dengan total variabel sebanyak 9 variabel, saat ini 8 variabel telah terpenuhi dan telah selesai diverifikasi dokumen-dokumen pendukungnya tinggal 1 variabel lagi yang masih dalam proses verifikasi dan validasi data oleh LKPP. Gambaran Tingkat Kematangan UKPBJ pada Setjen DPR RI Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

No.	Domain	Variabel	Level	Status	Aksi
1)	Proses	Manajemen Pengadaan	Proaktif	Pembaharuan	Ubah kirim
2)	Proses	Manajemen Penyedia	Proaktif	Pembaharuan	Ubah kirim
3)	Proses	Manajemen Kinerja	Proaktif	Terisi	Ubah

No.	Domain	Variabel	Level	Status	Aksi
					kirim
4)	Proses	Manajemen Resiko	Proaktif	Terverifikasi	Perbarui
5)	Kelembagaan	Pengorganisasian Kelembagaan	Proaktif	Terverifikasi	Perbarui
6)	Kelembagaan	Tugas/Fungsi Kelembagaan	Proaktif	Terverifikasi	Perbarui
7)	SDM	Perencanaan Pengadaan	SDM Proaktif	Terverifikasi	Perbarui
8)	SDM	Pengembangan Pengadaan	SDM Proaktif	Revisi	Perbarui
9)	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Proaktif	Terisi	Ubah kirim

Sumber Data dari LKPP

3. Tingkat Kematangan UKPBJ

$$\frac{\text{Capaian kematangan proaktif}}{\text{Total variabel (9)}} \times \text{Bobot}$$

Dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik Tahun 2023 pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diperlukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan perolehan skor indikator dalam penilaian ITKP.

Salah satu optimalisasi perolehan skor ITKP Tahun 2023 khususnya untuk Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan, ditentukan berdasarkan pengisian data melalui sistem.

Untuk mencapai tujuan tersebut Biro Umum Setjen DPR RI melakukan langkah-langkah dengan menetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

1. INDIKATOR PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN

Angka untuk Pemanfaatan Sistem Pengadaan Tahun 2023 sudah final, maka yang perlu dilakukan adalah perbaikan dan peningkatan skor Tahun 2024, untuk itu akan dilakukan:

- Pendampingan kepada PPK untuk melakukan penginputan e-tendering, e-purchasing, non e-tendering dan non e-purchasing serta e-kontrak ke dalam aplikasi SPSE;
- Bimtek penginputan RUP Tahun 2024 ke dalam aplikasi SIRUP kepada PPK sehingga pengumuman RUP 2024 secara keseluruhan dapat diumumkan pada bulan Januari 2024.

2. INDIKATOR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI SDM PBJ

Sesuai rekomendasi LKPP, Setjen DPR RI akan melakukan Analisa Beban Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi JFT PBJ yang ada saat ini.

3. INDIKATOR TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ

Untuk mencapai level 3 proaktif harus dicapai level kematangan 9/9. Saat ini Setjen DPR RI telah mencapai level kematangan 8/9. Dalam rangka memenuhi kekurangan 1 variabel lagi, seluruh dokumen telah dipenuhi dan saat ini sedang dalam proses verifikasi dan validasi oleh LKPP sehingga level 3 proaktif diharapkan tercapai pada Desember 2023.

Selain itu, untuk menuju level 3 proaktif juga harus dipenuhi 17 standar LPSE. Saat ini Setjen DPR RI telah memperoleh 12 sertifikat standar LPSE, sedangkan 5 standar LPSE lagi masih dalam proses verifikasi dan validasi dokumen.

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/SZsSx4EkAeRNoep>

14. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset:

a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
Kemenkeu	93,66	95	Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Sosialisasi terkait revisi anggaran	Jumlah Laporan Sosialisasi	1			1	Telah Terlaksana Sosialisasi terkait revisi anggaran
Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran per triwulan	Jumlah Laporan Monev BURT	1	1	1	1	Telah Terlaksana Laporan Pelaksanaan Anggaran
Melakukan koordinasi terkait rencana pengisian RDP dengan Biro Keuangan dan Kemenkeu	Jumlah Laporan Singkat rapat koordinasi				1	Telah Terlaksana Melakukan koordinasi terkait rencana pengisian RDP dengan Biro Keuangan dan Kemenkeu
Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas membahas capaian output	Jumlah Laporan capaian output per triwulan	1	1	1	1	Telah Terlaksana Laporan caput
Sosialisasi pengisian Capaian Output	Jumlah Laporan Sosialisasi Capaian Output	1			1	Telah Terlaksana Kegiatan sosialisasi caput
Penyampaian to do list mingguan ke seluruh PPK dan staf PPK	Jumlah Surat Penyampaian Penyelesaian To Do List	12	12	12	12	Telah Terlaksana TDL
Monitoring bulanan IKPA	Jumlah dokumen Monitoring IKPA Bulanan		1	3	3	Telah Terlaksana Rapor IKPA bulanan
Laporan Evaluasi IKPA Triwulanan dan rencana tindaklanjutnya setiap triwulan	Jumlah dokumen Monitoring IKPA Triwulanan	1	1	1	1	Telah Terlaksana Rapor IKPA Triwulan
Sosialisasi IKPA ke seluruh unit kerja	Jumlah lapping kegiatan Sosialisasi IKPA	1	1			Telah Terlaksana Sosialisasi IKPA
FGD dengan Direktorat PA terkait perubahan aturan, kebijakan, dll	Jumlah lapping Kegiatan FGD	1				Telah Terlaksana Kegiatan FGD

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pengumpulan, updating dan penyampaian halaman III DIPA	Jumlah Surat Penyampaian Updating Data	1	1	1	1	Telah Terlaksana Surat

Penilaian dilakukan langsung dalam sistem aplikasi Kemenkeu. Hasil penilaian IKPA diperoleh nilai 94,26.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : OKTOBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	Nilai	100.00	73.28	96.48	94.38	97.88	98.89	100.00	99.85	95.70	100%	95.70
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	7.33	19.30	9.44	9.79	9.89	5.00	24.96			
			Nilai Aspek	86.64		97.53					99.85			

Saat ini sedang dilakukan pengembangan Aplikasi DigitAll untuk menunjang pencapaian IKPA. Terkoneksinya aplikasi SAKTI pada Aplikasi DigitAll hingga level eselon III.

Anggaran Setjen: 1.613.982.690.000
Realisasi Setjen: 1.060.791.009.723
Prosentase setjen: 65,73



Anggaran Dewan: 4.484.229.865.000
Realisasi Dewan: 3.086.378.676.206
Prosentase: 68,83

Rencana vs Realisasi Per Pengenal Export Rekap Rencana

Bulan

Copy Excel PDF CSV Print Search:

Bagian	Pagu Anggaran	Rencana	Realisasi	Prosentase Realisasi	Prosentase GAP
BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI I	31.500.000	20.316.732	29.861.000	94,80	46,98
BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI I	0		0	0,00	0,00
BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI I	55.608.000	35.865.803	26.760.000	48,12	-25,39
BAGIAN SEKRETARIAT	31.500.000	20.316.732	31.500.000	100,00	55,04

 Anggaran Setjen: 1.613.982.690.000 Realisasi Setjen: 1.060.791.009.723 Prosentase setjen: 65,73	 Anggaran Dewan: 4.484.229.865.000 Realisasi Dewan: 3.086.378.676.206 Prosentase: 68,83
--	---

Realisasi Per Bagian							Export
Copy Excel PDF CSV Print							Search: <input type="text"/>
Biro	Bagian	Satker	Pagu Anggaran	Realisasi	Prosentase		
BIRO PERSIDANGAN I	BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI I	001030	39.428.579.000	29.207.001.400	74,08		
BIRO PERSIDANGAN I	BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI II	001030	37.964.721.000	23.805.751.931	62,70		
BIRO PERSIDANGAN I	BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI III	001030	27.392.760.000	15.361.217.403	56,08		
BIRO PERSIDANGAN I	BAGIAN SEKRETARIAT	001030	26.565.788.000	16.862.376.180	63,47		

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/yWPt7L7Y7PCWBWn>

b. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
Kemenkeu	3,60	3,65	Biro Keuangan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Melakukan rekonsiliasi BMN dengan internal maupun eksternal	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMN	3	0	2	0	Pendapatan dari pengelolaan BMN berada diatas target
Menyampaikan Laporan (LBP, Wasdal dan RKBMN) tepat waktu	Jumlah laporan yang disampaikan tepat waktu	3	1	2	1	Laporan (LBP dan Wasdal) disampaikan H-3 dari deadline. Sedangkan RKBMN masih blm diperhitungkan karena disampaikan di Oktober
Peningkatan tindak lanjut BMN rusak berat	Jumlah Usulan Penghapusan ke KPKNL Jakarta 1	3	8	2	2	Barang rusak berat yang diusulkan penghapusan lebih besar dari yang dirubah status
Melakukan tindak lanjut temuan BPK	Jumlah temuan BPK terkait aset ditindaklanjuti	0	1	2	1	Temuan BPK tahun 2022 terkait BMN seluruhnya telah ditindaklanjuti

Perolehan IPA Tahun 2022 mendapatkan nilai sebesar 3,60. Salah satu kendala dalam penilaian IPA adalah parameter yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahun dan tidak ada monitoring per bulan secara resmi sehingga K/L harus memproyeksikan sendiri terkait pengukuran yang ada.

Parameter	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP terkait BMN di K/L	4	5%	0.2
Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN	4	15%	0.6
Ketepatan waktu penyampaian Laporan dan RKBMN	2.8	10%	0.28
Asuransi BMN	4	15%	0.6
Tindak lanjut Pengelolaan BMN	3.2	15%	0.49
Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN	4	15%	0.6
Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan	4	15%	0.6
Penggunaan BMN sesuai ketentuan	4	10%	0.4

Nilai IPA Tahun 2023 Setjen DPR RI memperoleh nilai 3,6.

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/s4M3bfDir4BZ4TD>

c. Opini BPK

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
BPK	WTP	WTP	Biro Keuangan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Melakukan Sosialisasi dan FGD atas Perubahan Ketentuan yang berpengaruh pada Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Bahan Sosialisasi kepada Unit Kerja	1	-	1	-	Telah Terlaksana
Melakukan rekonsiliasi Internal dan Eksternal secara rutin	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	4	3	4	3	Telah Terlaksana
Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan kegiatan	1	-	1	-	Telah Terlaksana
Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Data Keuangan	Persentase pembangunan Aplikasi Pengolah Data Keuangan terhubung dengan SAKTI	10%	30%	30%	30%	Telah Terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Peningkatan Kualitas SDM Penyusun Laporan Keuangan	Pelatihan Data Analitik dan Analisa Laporan Keuangan	-	1	1	-	Telah Terlaksana
Peningkatan Awareness Stakeholder terkait transaksi berpengaruh terhadap laporan keuangan	Booklet dan Infografis Informasi Keuangan (terbit bulanan)	-	1	3	3	Penggabungan Beberapa Terbitan akibat restrukturisasi Organisasi
Koordinasi dengan Inspektorat terkait Pendampingan Reviu	Jumlah Pernyataan Telah Direviu dan CHR	1	-	1	-	Telah Terlaksana
Penyediaan Konsultasi bagi unit kerja terkait penggunaan akun, pengelolaan tagihan	Persentase pelaksanaan Laporan dan Konsultasi	25%	25%	25%	25%	Telah Terlaksana
Penyusunan Risk Control matriks pada transaksi utama Unit Kerja yang berpotensi mempengaruhi Laporan Keuangan	Jumlah laporan Risk Control Matriks	1	-	-	-	Telah Terlaksana
Kegiatan Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan pada transaksi utama Unit Kerja	Persentase Pelaksanaan dan Penilaian PIPK	30%	-	30%	40%	Telah Terlaksana

Progres Rencana Aksi pencapaian opini BPK sampai dengan bulan Juli 2023, antara lain telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mempertahankan Opini BPK atas Laporan Keuangan TA 2023. Namun ada beberapa kegiatan yang mengalami pengunduran jadwal dan baru dilaksanakan pada Semester II TA 2023. Dalam menghadapi kendala pencapaian opini BPK “WTP” dengan melakukan perbaikan dan pengendalian internal transaksi utama, perbaikan transaksi dan pencatatan. Pencapaian opini BPK sangat dipengaruhi pelaksanaan anggaran oleh unit kerja. Pastikan **PAS** (Pengendalian Intern Memadai, *Adequate Disclosure* (diungkap secara benar), Sesuai SAP dan peraturan yang berlaku).

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/LbBxdXMctr44r8T>

d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
BPK	86,75%	94,61%	Inspektorat Utama

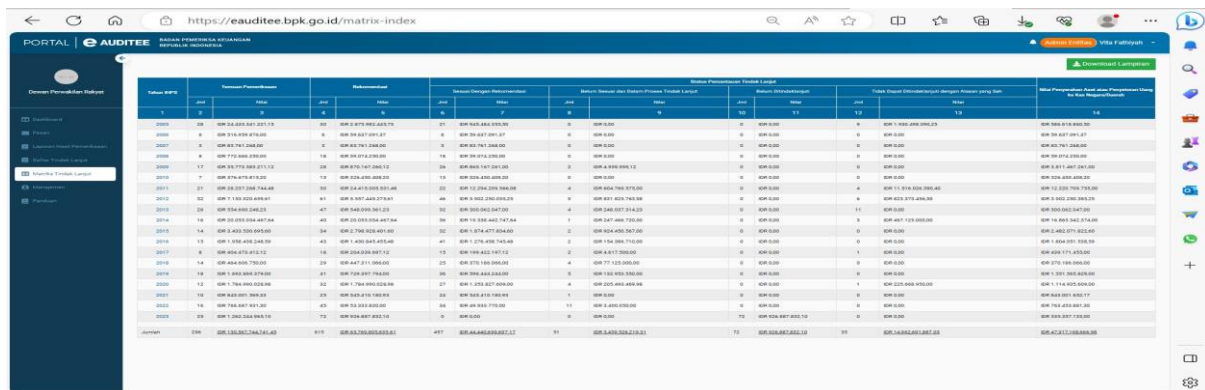
Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester 1	Jumlah Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil	0	0	1	0	Telah terlaksana LAPORAN PEMANTAUAN TLHP BPK SMT I

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	Pemeriksaan BPK RI Semester 1					2023
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 60 hari	Jumlah Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 60 hari	0	0	0	1	Telah terlaksana signed-2023917-Laporan Pemantauan (60 Hari) TLHP BPK RI LK 2022
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPR RI semester 2	Jumlah Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPR RI semester 2	0	0	1	0	Telah terlaksana LAPORAN PEMANTAUAN TLHP BPK SMT II 2022

Sampai dengan September (semester I 2023), TLHP BPK telah mencapai 90,61%.

Rekapitulasi rekomendasi BPK yang sedang proses tindak lanjut untuk menjadi status 1, status 2 dan status 4 (+/- 10%) dapat dilihat pada link berikut ini: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/apps/onlyoffice/s/YxTJwMdedXTBC83?fileId=21869066>

Tinjau Penyelesaian Temuan BPK dalam Aplikasi SIPTL BPK



Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Dyrfsoi8owWFA6n>

15. Penguatan Sistem Merit, Manajemen Talenta, Kinerja Pegawai dan Jabatan Fungsional

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
KASN	345,5	355,5	Biro SDMA

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pendampingan, penguatan SM Bersama KASN	Jumlah Laporan pendampingan	1	1	1	1	Telah Terlaksana Pendampingan SM
Sosialisasi terhadap Pejabat Pengawas	Jumlah Laporan sosialisasi	1			1	Telah Terlaksana Laporan Kegiatan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pendampingan pengisian SKP di e-kinerja	Jumlah dokumen Seluruh unit kerja mengisi SKP	1				Telah Terlaksana Pendampingan SKP
Pembuatan Video Tutorial pengisian SKP untuk mempermudah pegawai mengisi SKP pada Aplikasi e-kinerja	Jumlah Video Tutorial pengisian SKP			1		Masih dalam proses pembuatan Video tutorial
Sosialisasi PP 94/2021 terkait Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan sosialisasi				1	Telah Terlaksana Dokumentasi sosialisasi
Pemenuhan Diklat Pegawai minimal 20 JP/orang	Jumlah pegawai yang melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai 20JP/orang	150	250	250	100	Telah Terlaksana Daftar nama pegawai yang sudah memenuhi 20JP
Membuat aplikasi cuti online yang terintegrasi dengan SIASN	Jumlah Aplikasi Cuti Online oleh seluruh pegawai				1	Proses sudah berjalan Rapat Probis
Pengembangan Aplikasi PERISAI untuk JF Analis APBN, Analis Penatauan PUUL, dan Analis Legislatif	Persentase pembentukan Layanan Sistem Informasi Jabatan Fungsional			50%	50%	Telah Terlaksana SS Aplikasi PERISAI
Pembentukan Organisasi Profesi JF Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif	Persentase pembentukan Organisasi IKAPLI (Ikatan Perisalah Legislatif Indonesia)			50%	50%	Telah Terlaksana SK Pengesahan IKAPLI Akta Pendirian Perkumpulan IKAPLI
Penyusunan peraturan-peraturan Jabatan Fungsional	Persentase penyusunan Persekjen tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional (Pasca PermenpanRB No.1 Tahun 2023)			50%	50%	Telah Terlaksana 1 RaPersekjen Juklak JF Setjen DPR RI (tambahan Bab Sistem Informasi)
<i>Updating</i> data secara berkelanjutan bagi Pejabat Administrator sebagai <i>piloting project</i>	Jumlah data manajemen talenta Pejabat Administrator		1			Telah Terlaksana Laporan MT dan data 64 Pejabat Administrator
Benckmarking best practice ke kementerian/Lembaga yang sudah	Jumlah Laporan benchmarking		1			Telah Terlaksana Laporan Benchmarking

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
dikecualikan dari seleksi terbuka						
Koordinasi Aplikasi Simata dengan KASN	Jumlah Surat rekomendasi		1			Telah Terlaksana Surat

Nilai sistem merit yang diperoleh pada Tahun 2022 adalah sebesar 345,5 dengan predikat Sangat Baik. Terkait sistem merit, telah menindaklanjuti rekomendasi Tahun 2022 dan dilakukan pengisian LKE sistem merit yaitu dengan menambahkan data dukung terbaru. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 180/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, menetapkan penerapan Sistem Merit di Setjen DPR RI pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan nilai 363, dan indeks 0,89.



Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/8TFmbJEyAFXQt7Z>

16. Pelaksanaan Core Value ASN

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
KemenPANRB	60,7%	75%	Pusbangkom SDM Legislatif

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pembuatan SE Sekjen Penggunaan Logo BerAKHLAK dan Bangsa Melayani Bangsa	Jumlah SE Sekjen Penggunaan Logo BerAKHLAK dan Bangsa Melayani Bangsa		1			Telah Terlaksana Surat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Menyelenggarakan Kuis BerAKHLAK dan Bangsa Melayani Bangsa di Portal/Sirajin	Jumlah pelaksanaan kuis berakhlak di portal Setjen DPR RI			1		Telah Terlaksana Ss kuis nodin publikasi kuis berakhlak
Melaksanakan sosialisasi budaya kerja ASN BerAkhlak	Jumlah kegiatan Sosialisasi BerAKHLAK dan Bangsa Melayani Bangsa			1		Telah Terlaksana Undangan
Buku Saku Panduan Perilaku BerAKHLAK	Jumlah buku saku		1			Telah Terlaksana
Pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai bentuk bangga melayani bangsa	Jumlah Pegawai yang menerima penghargaan				3	Telah Terlaksana

Kegiatan ini merupakan survei yang dilaksanakan oleh KemenpanRB, antara lain : Survei Indeks Berakhlak dengan sasaran pada seluruh pegawai/ASN sebagai responden, dan Survei Employee Engagement dengan minimal responden 140 orang dengan komposisi pejabat eselon 1 sampai 4, pejabat fungsional dan pelaksana. Tahun ini survei akan dilakukan mulai tanggal 2 s.d 15 Oktober 2023. Tahun lalu Setjen DPR mendapatkan award sebagai Best Starter, meskipun dari 1500 pegawai, yang mengisi survei hanya 97 orang. Sementara untuk survei Employee Engagement tahun lalu Setjen DPR tidak sempat mengikuti karena aplikasi sudah ditutup. Hasil penilaian Tahun 2022 Setjen DPR RI mendapatkan nilai Cukup Sehat dengan range 50% - 74,9% dengan arti bahwa pegawai sudah mengimplementasikan nilai-nilai BerAkhlak dalam perilaku kerja sehari-hari. Namun dari 6 aspek yang dinilai, terdapat aspek Harmonis yang nilainya masih dibawah 50%. Tanggal 4 Oktober 2023 Pusbangkom menyelenggarakan Sosialisasi kepada seluruh pegawai sekaligus ada sesi untuk mengisi kedua survei tersebut.



Pusbangkom SDM Legislatif mengadakan quiz kepada seluruh PNS di Setjen DPR RI dalam rangka internalisasi *Core Values* ASN BerAkhlak. Pemberian apresiasi kepada pegawai PNS Setjen DPR RI pemenang quiz BerAkhlak dengan kategori 3 orang nilai tertinggi dan 10 orang

nilai tertinggi kedua diberikan pada acara Money Anggaran dan Kinerja tanggal 5 Desember 2023.



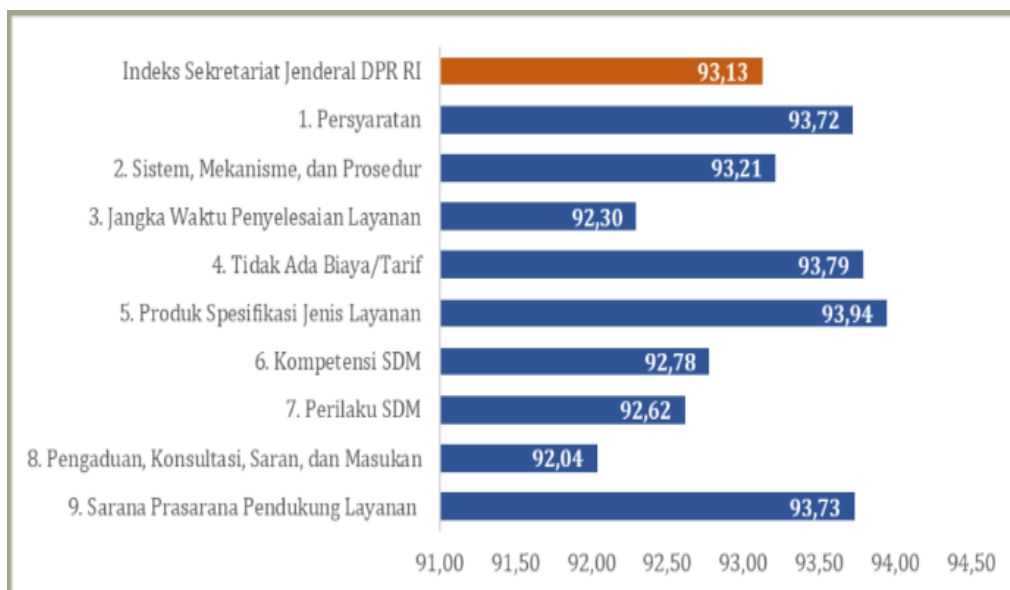
Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/B5r5YFXzf8gikpi>

17. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima:
a. Survei Kepuasan Masyarakat

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
KemenPANRB	82,757	93,00	Pusat Analisis Keparlemenan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Peningkatan indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Setjen DPR	Jumlah pelaksanaan survei kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Setjen DPR dari tahun sebelumnya			1		Telah Terlaksana <u>Laporan SKM</u>
Tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Anggota DPR RI					1	Telah Terlaksana Tinjau SKM
Penyusunan prioritas rekomendasi secara kelembagaan	Persentase proses penyusunan prioritas rekomendasi yang harus dilaksanakan			100%		Telah Terlaksana <u>Laporan SKM</u>
Pelaksanaan rekomendasi hasil survey kepuasan Anggota DPR RI	Persentase proses penyusunan tindak lanjut rekomendasi hasil survey kepuasan Anggota DPR RI	25%	50%	70%	85%	Telah Terlaksana <u>Laporan SKM</u>

Telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar 93,13. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat telah disampaikan kepada Kemendagri tanggal 15 September 2023.



Tindak lanjut hasil survei:

ANGGOTA DPR RI



LAYANAN PERSIDANGAN

- Bahan dari Mitra Kerja diserahkan tidak tepat waktu
- Informasi kepastian jadwal dan bahan rapat tidak hanya dikirim ke Anggota tetapi juga ke staf Anggota
- Penyesuaian jadwal sidang komisi dan paripurna keramahmatan
- Memperhatikan kecepatan dan ketepatan informasi
- Saat rapat malam, makan SAA, agar dibantu Keseteman
- Perlu dioptimalkan peningkatan penanganan pengaduan masyarakat
- Risalah rapat jika belum siap, dishare, agar dapat dikirimkan dalam bentuk rekaman
- Seluruh proses pembahasan RRU agar dapat secara aktif difasilitasi perkembangan di laman DPR RI
- Perlu SOP yang jelas mengenai mekanisme akses masuk ke ruang persidangan



LAYANAN RUMAH JABATAN

- Pelayanan Ruang Anggota, Rumah Jabatan, dan Wisma Griya Sabha Kopo perlu diperbaiki dari sisi waktu penyelesaian pengaduan, produk layanan yang diberikan, hingga kualitas layanan yang diberikan
- Tingkatkan kecepatan merespons dan menindaklanjuti layanan
- Peningkatan kualitas RJA DPR RI
- Perlu dilakukan pengecekan berkala seluruh infrastruktur RJA
- Perawatan rumah dinas perlu ditingkatkan
- layanan dan fasilitas di RJA sangat di bawah standar
- Kualitas pemangangan dan penggantian gardan, perlu diperbaiki kerjanya
- RJA terbelang fasilitas yang sangat rapuh
- Perlu dibangun Satandar Pelayanan dan dukungan SDM yang mumpuni dalam penyelenggaraan wisma DPR RI



SUMBER DAYA MANUSIA

- Perlu dilakukan pelatihan SDM agar sesuai zaman dan dapat memenuhi kebutuhan dan peningkatan kinerja DPR RI
- Transferansi dan Sumber Daya Manusia sebagai garda utama semua kebijakan
- Perlu peningkatan rasa memiliki lembaga sehingga SDM Keseteman dapat menjadi bagian dari marketing DPR RI
- Perlu ditingkatkan pelayanan sosial khususnya ketika ada tamu dari wilayah IT
- SDM administrasi dan keahlian perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan kursus-kursus
- SDM administrasi perlu diberikan pemahaman terkait updating regulasi yg sesuai tupokinya
- SDM diharapkan lebih lincah dan profesional
- Pelatihan bagi peningkatan profesionalitas SDM yang mengakomodir perkembangan informasi dan teknologi

MITRA KESETJENAN DPR RI



LAYANAN KESEHATAN

- Peningkatan profesionalitas dan keramahan, khususnya petugas di FO
- Peningkatan skill keahlian bagi tenaga medis dalam menangani keluhan-keluhan yang membutuhkan penanganan cepat
- Perlu dibuat reservasi online dan bisa menjadi rujukan dengan meningkatkan digitalisasi kesehatan
- Pertambahan jam praktik spesialis dan jenis spesialis yang belum ada
- Dokter spesialis agar hadir sesuai jadwal dan tepat waktu
- Menambah fasilitas photo gigi
- Untuk kegawatdaruratan agar dilengkapi dengan uang operasi kecil
- Melengkapi staf medis dengan peralatan komputer per staf IPC
- Instalasi perisai baru, perbaikan ragam alat dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana
- Merah pemeriksaan pasien dapat dilakukan lebih mendalam sehingga pengobatan bisa lebih efektif
- Memperbaharu peralatan kesehatan di yankee sejalan dengan perkembangan teknologi
- Agar dapat difasilitasi kudu men vitamin yang baik dan variatif, masalah minyak ikan
- Berharap pemerataan fasilitas Dokter Spesialis Ruli Kalamin
- Perlu masuk dari kelas jarkes agar dibedakan, ditambah perusahan yankee
- Peningkatan pelayanan kesehatan di kopo



LAYANAN PERJALANAN DINAS

- Perlu penambahan bungalow dan perluasan wisma kopo
- kemudahan akses pemijaman bagi ASN, digitalisasi online untuk pemijaman dan reservasi
- pemeliharaan wisma ditingkatkan, sarana prasarana diperbaiki, fasilitas pendukung lainnya ditingkatkan
- Peningkatan fasilitas wifi di wisma kopo
- meningkatkan fasilitas olahraga
- Menambah fasilitas pujasera di lingkungan wisma kopo
- Fasilitas ramah bagi disabilitas
- Meningkatkan kecepatan respons penanganan pengaduan, disamping membuka saluran pengaduan
- Fasilitas kolam renang agar dimulai jam 05 s.d. jam 19, agar bisa dimanfaatkan di sela-sela kesibukan rapat
- Menambah lampu penerangan di dinding sekeliling wisma
- Menginformasi pemijaman Anggota sehingga tidak dimanfaatkan bagi yang tidak berhak, sesuai rhungin dibatasi maksimal 2 bungalow per Anggota
- Meningkatkan performa petugas pemelihara bungalow dan petugas kebersihan
- Meningkatkan profesionalisme dan keramahan petugas wisma termasuk petugas pengamanan dalam
- Akses pintu masuk dan keluar di perluas
- Menambah fasilitas memasak di tiap bungalow
- Menambah fasilitas khusus karaoke



LAYANAN PERJALANAN DINAS

- Peningkatan SDM yang handal dan keramahmatan
- Memperhatikan kecepatan dan ketepatan informasi
- Perlu dioptimalkan peningkatan penanganan pengaduan masyarakat
- Risalah rapat jika belum siap, dishare, agar dapat dikirimkan dalam bentuk rekaman
- Seluruh proses pembahasan RRU agar dapat secara aktif difasilitasi perkembangan di laman DPR RI
- Perlu SOP yang jelas mengenai mekanisme pengajuan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang disosialisasikan dengan baik, serta mempercepat proses tindaklanjut termasuk verifikasi
- Menambah dan meningkatkan SDM terkait perjalanan dinas
- Menambah waktu dan loket pelayanan khususnya ketika diwaktu-waktu strategis
- Peningkatan ruang pelayanan sehingga lebih luas
- Mempercepat pengurusan, kemudahan pelayanan, serta kesesuaian kunjungan kerja di Dapil

MASYARAKAT UMUM



LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Kualitas arsip dalam bentuk soft file agar ditingkatkan kualitas gambarnya
- Perlu peningkatan inovasi PPID dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi, sehingga dapat diperluas dalam mendukung penguatan riset nasional
- Perlu sosialisasi tentang mekanisme kerja Anggota DPR RI disertai update masa sidang dan masa reses sehingga masyarakat yang berkunjung untuk menemui wakilnya di DPR RI, tidak terkendala
- Berharap semua proses pembahasan RUU dapat di update secara luas dan periodik ke depan memanfaatkan semua laman DPR RI
- Pemberkasan dan pengarsipan bahan-bahan agar dilakukan dengan teknologi yang lebih baik



LAYANAN PUSTEKINFO

- Menyediakan tampilan museum dan letak gedung atau ruangan secara 3D yang bisa digeser-geser untuk mendukung efisiensi waktu jika ingin menuju ke suatu gedung atau ruangan di lingkungan Setjen DPR RI
- Pelayanannya ringkas dengan website yang terintegrasi, tanpa harus mengisi formulir di word seperti instalasi lain
- Progress harian juga di update (misalkan alur masih terputus). Saran perbaikan: agar bagian lain juga memiliki tanggungjawab atas data yang diminta, akan lebih baik jika dicantumkan estimasi waktu pelayanan) sehingga data tersebut diterbitkan ke publik. All in all, semua pelayanan baik dan pelayanannya pun menyenangkan! Terima kasih PPID Setjen DPR RI!
- Kedepan agar semua proses pembahasan RUU dapat diupdate secara rutin di laman DPR, tidak hanya RUU tertentu saja
- Kesesuaian informasi yang diberikan oleh PPID dengan pengaluan pemahaman masyarakat, agar dipastikan tepat
- peningkatan kapasitas wifi dan diperbanyak khususnya untuk beberapa spot untuk baca-baca kalo di perpustakaan



LAYANAN PENGAMANAN DALAM

- Tentang perbedaan setiap orang saat ingin masuk ke ruang sidang Komisi X, ada orang yang dimintai KTPnya buat ditahan tetapi ada juga yang tidak. Mungkin bisa dievaluasi lagi.
- sudah cukup mungkin birokrasinya lebih di penjelasan saja runtutannya agar lebih diketahui
- Dalam segi koordinasi waktu dalam suatu acara terutama daring
- Bagian koordinasi antar pihak pengamanan yang ada di DPR dengan pihak pengamanan yang ada di kementerian, dll) atau anggota dewan yang menghadiri undangan ke dalam gedung DPR, agar tidak menjadi miskomunikasi.

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Z2w7XFJTkf9iZTn>

b. Indeks Pelayanan Publik

Leading Sector	Realisasi 2022	Target 2023	Penanggung Jawab
KemenPANRB	4,31	4,33	Biro Protokol dan Humas

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Menyelenggarakan Evaluasi maklumat pelayanan dan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen hasil evaluasi maklumat pelayanan dan standar pelayanan	1				Terlaksana 100% https://bit.ly/IPPEvaluasiSP
Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah laporan FKP			3		Terlaksana 80% https://bit.ly/IPPFKP
Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM)	Jumlah laporan hasil SKM			3		Terlaksana 100% https://bit.ly/IPPSKM
Melakukan perbaikan maklumat pelayanan dan standar pelayanan	Jumlah Penetapan Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan hasil perbaikan			3		Terlaksana 50% (Perbaikan Maklumat) https://bit.ly/IPPMaklumatSP
Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil FKP dan SKM	Jumlah dokumen Rencana Tindak Lanjut			1		Terlaksana 50% (RTL SKM) https://bit.ly/IPPRTL SKM

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pelaksanaan RTL	Jumlah Dokumen pelaksanaan RTL				1	Terlaksana 100% https://bit.ly/IPPTinjutRTL

Tahun 2022 telah dilakukan penilaian terhadap layanan persidangan di Deputy Persidangan dengan perolehan nilai 4,31 (A-). Rekomendasi yang disampaikan telah ditindaklanjuti dan laporan tindak lanjut telah disampaikan kepada KemenpanRB.

Link eviden tindak lanjut 2022 <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZSa8q4AScYJpZLK>

Link video tindak lanjut <https://bit.ly/videotinjutIPP2022>

Untuk Tahun 2023 telah terpilih 3 layanan di Deputy Administrasi yaitu :

- a. Layanan Jasa di Bagian Layanan Kesehatan;
- b. Layanan Barang di Bagian Wisma;
- c. Layanan Administrasi di Bagian Perjalanan.

Telah terbit Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 24 November 2023, menetapkan hasil PEKPPP Setjen DPR RI dengan nilai rata-rata sebesar 4.40, kategori A-.

23	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI	Bagian Perjalanan Biro Keuangan	4,46	A-	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma : Pengelolaan Wisma DPR RI	4,24	A-	Bagian Layanan Kesehatan Biro Umum	4,5	A-	4,40	A-
----	---	---------------------------------	------	----	--	------	----	------------------------------------	-----	----	------	----

B. Reformasi Birokrasi Tematik

RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintah (*debottlenecking*) yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif. Pelaksanaan RB Tematik dilakukan untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam hal ini sasaran tematik dan indikatornya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L.

DPR RI memiliki intervensi yang penting dalam mendukung tujuan pembangunan, yaitu mengurangi kemiskinan, menjaga inflasi, meningkatkan investasi, meningkatkan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, dan peningkatan produk dalam negeri. Dalam melaksanakan intervensi tersebut, DPR RI didukung oleh suatu sistem pendukung yaitu Setjen DPR RI.

Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Berdasarkan hal tersebut, maka tugas Setjen DPR RI tidak bersentuhan langsung dengan RB Tematik. Namun demikian, DPR RI mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam penyelesaian isu strategis dan pencapaian prioritas pembangunan nasional. Dalam hal ini, Setjen DPR RI memberikan dukungan keahlian berupa scientific evidence kepada DPR RI sehingga dalam pengambilan keputusan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Dukungan tersebut berupa produk-produk analisis, kajian, ataupun Naskah Akademik yang dihasilkan oleh unit kerja di bawah Eselon 1 (pusat) di lingkungan Badan Keahlian DPR RI. Dengan adanya dukungan dari Setjen DPR RI, khususnya Badan Keahlian DPR RI, tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam lima tema reformasi birokrasi diharapkan akan tercapai.

Secara umum, realisasi capaian sasaran dan indikator tematik per 30 September 2023 dalam mendukung fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPR RI telah sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2023.

1. Tematik Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana individu atau keluarga tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Indikator untuk mengukur kemiskinan antara lain: garis kemiskinan, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, kesenjangan kemiskinan, keparahan kemiskinan, dan pengeluaran per kapita. Sasaran indikator pembangunan tahun 2023 tingkat kemiskinan adalah 7,5-8,5% dan indeks rasio gini sebesar 0,375-0,378. Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang kompleks di Indonesia karena isu kemiskinan terkait erat dengan sektor lain seperti tingkat pendidikan, derajat kesehatan, perumahan dan infrastruktur, pertanian, lingkungan dan perlindungan sosial.

Setjen DPR RI memiliki peran penting dalam memberi dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI dalam rangka mendukung pemerintah untuk merealisasikan target penurunan kemiskinan. Dukungan substansi diberikan oleh Setjen DPR RI kepada DPR RI dalam kegiatan berikut:

1. Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU), pendampingan pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR RI dalam

Judicial Review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI terkait pengentasan kemiskinan.

2. Penyediaan dukungan analisis/kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN.
3. Penyediaan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Sasaran tematik kemiskinan pada tahun 2023 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait pengentasan kemiskinan.
- 2) Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN.
- 3) Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Indikator dari ketiga sasaran tematik tersebut adalah:

- 1) Persentase Naskah Akademik dan RUU, UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU yang terkait pengentasan kemiskinan, dengan capaian 100% per 30 September 2023.
- 2) Jumlah analisis/kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN dengan capaian 140% per 30 September 2023.
- 3) Jumlah analisis/kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah, dengan capaian 134% per 30 September 2023.

Capaian Sasaran dan Indikator Tematik Kemiskinan Per 30 September 2023

Sasaran Tematik	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi Per 30 Sept 2023	Persentase Realisasi Per September 2023
Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait pengentasan kemiskinan	Persentase Naskah Akademik dan RUU, UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU yang terkait pengentasan kemiskinan	100%	100%	100%
Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	Jumlah analisis/kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pembahasan	5	7	140%

Sasaran Tematik	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi Per 30 Sept 2023	Persentase Realisasi Per September 2023
	dan penetapan APBN			
Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan pengentasan kemiskinan	Jumlah analisis/kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah	23	31	134%

Rincian dan penjelasan realisasi indikator tematik kemiskinan terlampir dalam lampiran 1 dan lampiran 2.

2. Peningkatan Investasi

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang menarik bagi investor. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan investasi yang menjadi hambatan bagi pertumbuhan investasi di Indonesia, antara lain: ketidakpastian hukum yang sering terjadi di Indonesia membuat investor ragu untuk melakukan investasi di Indonesia; birokrasi yang rumit dan prosedur yang panjang; dan infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan, pelabuhan, dan bandara yang membuat biaya investasi menjadi lebih tinggi dan kurang menarik bagi investor.

Setjen DPR RI memberikan dukungan substansi kepada DPR RI dalam kegiatan berikut:

1. Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU), pendampingan pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR RI dalam *Judicial Review* UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI terkait investasi.
2. Penyediaan dukungan analisis/kajian terkait investasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN.
3. Penyediaan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan investasi.

Sasaran tematik investasi pada Tahun 2023 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait investasi.
- 2) Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait investasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN.
- 3) Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan investasi.

Indikator dari ketiga sasaran tematik tersebut adalah:

- 1) Persentase Naskah Akademik dan RUU, UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU yang terkait investasi, dengan capaian 100% per 30 September 2023.
- 2) Jumlah analisis/kajian terkait investasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN, dengan capaian 150% per 30 September 2023.
- 3) Jumlah analisis/kajian terkait investasi dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah, dengan capaian 107% per 30 September 2023.

Capaian Sasaran dan Indikator Tematik Investasi Per 30 September 2023

Sasaran Tematik	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi Per 30 Sept 2023	Persentase Realisasi Per September 2023
Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait investasi	Persentase Naskah Akademik dan RUU, UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU yang terkait investasi	100%	100%	100%
Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait investasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	Jumlah analisis/kajian terkait investasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	4	6	150%
Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan investasi	Jumlah analisis/kajian terkait investasi dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah	14	15	107%

Rincian dan penjelasan realisasi indikator tematik kemiskinan terlampir dalam lampiran 1 dan lampiran 2.

3. Pengendalian Inflasi

Ketidakstabilan dan tingginya inflasi di Indonesia merupakan permasalahan ekonomi yang seringkali terjadi dan dapat berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan tingginya inflasi antara lain: kenaikan harga komoditas, meningkatnya permintaan uang, dan ketidakstabilan nilai tukar. Dukungan substansi dari Setjen DPR RI diberikan karena DPR RI memiliki peran penting dalam menstabilkan inflasi di Indonesia.

Setjen DPR RI memberikan dukungan substansi kepada DPR RI dalam kegiatan berikut:

1. Pendampingan pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR RI dalam Judicial Review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI terkait inflasi.
2. Penyediaan dukungan analisis/kajian terkait inflasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN.
3. Penyediaan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan inflasi.

Sasaran tematik inflasi pada Tahun 2023 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya dukungan pendampingan pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait inflasi.
- 2) Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait inflasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN.
- 3) Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan inflasi.

Indikator dari ketiga sasaran tematik tersebut adalah:

- 1) Persentase UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU yang terkait inflasi, dengan capaian 100% per 30 September 2023.
- 2) Jumlah analisis/kajian terkait inflasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN, dengan capaian 100% per 30 September 2023 dengan capaian 100% per 30 September 2023.
- 3) Jumlah analisis/kajian terkait inflasi dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah, dengan capaian 146% per 30 September 2023.

Capaian Sasaran dan Indikator Tematik Inflasi Per 30 September 2023

Sasaran Tematik	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi Per 30 Sept 2023	Persentase Realisasi Per September 2023
Tersedianya dukungan Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait inflasi	Persentase UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU yang terkait inflasi	100%	-	-
Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait inflasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	Jumlah analisis/kajian terkait inflasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	3	3	100%

Sasaran Tematik	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi Per 30 Sept 2023	Persentase Realisasi Per September 2023
Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan inflasi	Jumlah analisis/kajian terkait inflasi dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah	15	22	146%

Rincian dan penjelasan realisasi indikator tematik inflasi terlampir dalam lampiran 1 dan lampiran 2.

4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Digitalisasi administrasi pemerintahan merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. DPR RI memiliki peran penting dalam mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan. Dalam rangka mendukung peran DPR RI dalam digitalisasi administrasi pemerintahan, maka perlu dipersiapkan kapabilitas layanan teknologi informasi yang secara spesifik mengolah data terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan.

Setjen DPR RI memberikan dukungan kepada DPR RI dalam kegiatan berikut:

1. Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU), pendampingan pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR RI dalam *Judicial Review* UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI terkait digitalisasi administrasi pemerintahan.
2. Penyediaan dukungan analisis/kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN.
3. Penyediaan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintahan.
4. Penyediaan layanan teknologi informasi pendukung fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang terintegrasi.

Sasaran tematik digitalisasi administrasi pemerintahan pada Tahun 2023 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait digitalisasi administrasi pemerintahan.
- 2) Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN.
- 3) Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintahan.
- 4) Tersedianya layanan teknologi informasi pendukung fungsi legislasi, anggaran dan

pengawasan yang terintegrasi.

Indikator dari keempat sasaran tematik tersebut adalah:

- 1) Persentase Naskah Akademik dan RUU, UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU yang terkait digitalisasi administrasi pemerintahan, dengan capaian 100% per 30 September 2023.
- 2) Jumlah analisis/kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN, dengan capaian 150% per 30 September 2023.
- 3) Jumlah analisis/kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah, dengan capaian 240% per 30 September 2023.
- 4) Indeks Kepuasan DPR RI atas layanan teknologi informasi, dengan capaian 107% per 30 September 2023.

Capaian Sasaran dan Indikator Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Per 30 September 2023

Sasaran Tematik	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi Per 30 Sept 2023	Persentase Realisasi Per September 2023
Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait digitalisasi administrasi pemerintahan	Persentase Naskah Akademik dan RUU, UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU yang terkait digitalisasi administrasi pemerintahan	100%	100%	100%
Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	Jumlah analisis/kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	3	3	100%
Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintahan	Jumlah analisis/kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah	5	11	240%

Sasaran Tematik	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi Per 30 Sept 2023	Persentase Realisasi Per September 2023
Tersedianya layanan teknologi informasi pendukung fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang terintegrasi	Indeks Kepuasan DPR RI atas layanan teknologi informasi	3,20	3,77	107%

Rincian dan penjelasan realisasi indikator tematik digitalisasi administrasi pemerintahan terlampir dalam lampiran 1 dan lampiran 2.

5. Penggunaan Produk Dalam Negeri

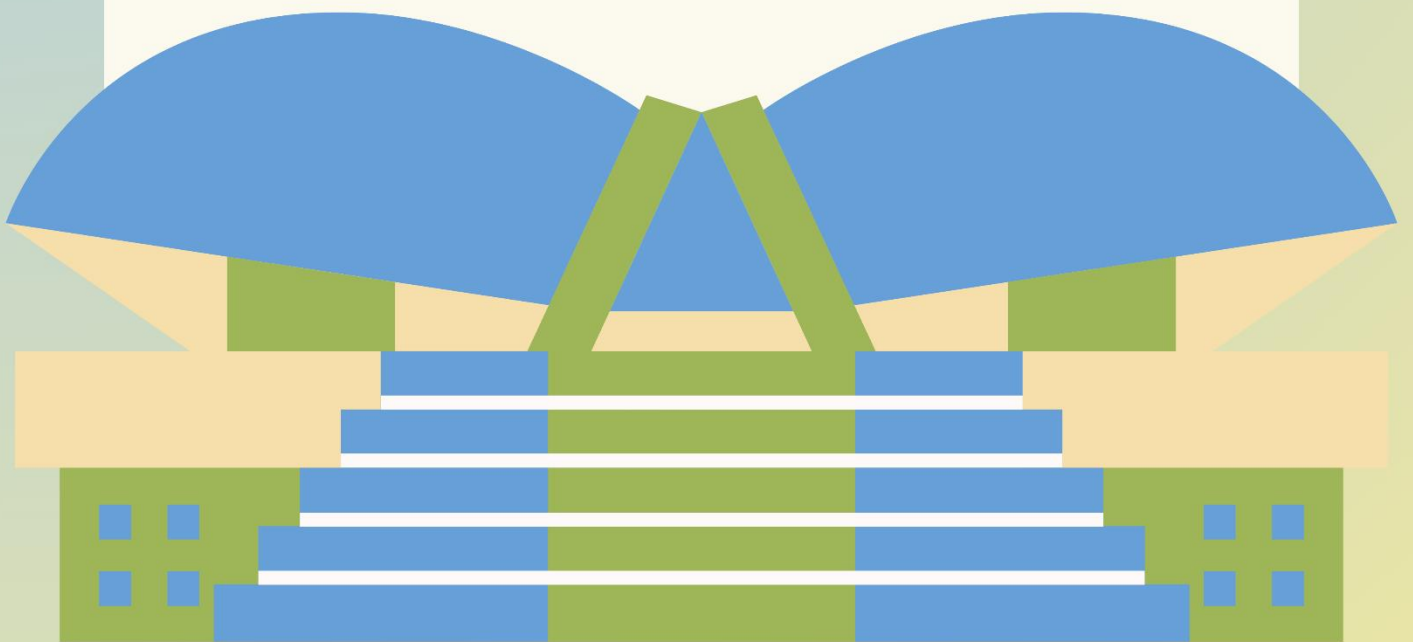
DPR RI memiliki peran penting dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Setjen DPR RI turut memberikan dukungan pada saat DPR RI melakukan kegiatan berikut:

1. Menjalankan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penggunaan produk dalam negeri.
2. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi, serta memfasilitasi perbedaan penafsiran tingkat komponen dalam negeri.

Sasaran tematik penggunaan produk dalam negeri pada Tahun 2023 yang ditetapkan adalah tersedianya anggaran belanja barang/jasa minimal 40% untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Indikator sasaran tematik penggunaan produk dalam negeri adalah persentase penggunaan produk dalam negeri. Per 18 September 2023, Pencadangan PDN dalam Rencana umum pengadaan barang/jasa Tahun 2023 di Sekretariat Jenderal DPR RI sebesar 91%.

PENUTUP

Bab IV



A. KESIMPULAN

Pelaksanaan program terkait Reformasi Birokrasi di Setjen DPR RI Tahun 2023, merupakan proses penyempurnaan dan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi sebelumnya. Dengan ditetapkan Road Map RB penajaman, maka diharapkan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis sehingga dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Setjen DPR RI Tahun 2023 berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian-capaian yang dihasilkan sesuai target atau melebihi target yang sudah ditentukan. Setjen DPR RI juga berkomitmen untuk terus menerus memperbaiki kualitas pelayanan publik, baik untuk Anggota DPR RI maupun kepada masyarakat langsung.

Melalui optimalisasi di RB General dan RB Tematik diharapkan pelaksanaan RB Setjen DPR RI semakin mendapat kemajuan seiring perbaikan di berbagai aspek pelaksanaan RB. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan RB, Setjen DPR RI menindaklanjuti saran perbaikan yang masuk, baik dari Kementerian PANRB sebagai evaluator nasional RB, Kementerian/Lembaga Tingkat meso sebagai evaluator eksternal, maupun dari Inspektorat Utama sebagai evaluator internal RB. Selain itu, guna dapat meningkatkan manfaat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Setjen DPR RI melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas rencana aksi dan bukti dukung.

Dan yang paling penting adalah bahwa seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di Setjen DPR RI perlu memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

B. REKOMENDASI

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi/saran/masukan dari pengarah RB Setjen DPR RI.

1. Nilai RB merupakan salah satu indeks utama dan penting bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, oleh karena itu penting bagi tiap unit kerja yang terkait dengan indikator RB untuk mengawal apa saja yang sudah di komitmenkan/targetkan. Apabila nilainya masih jauh dari yang ditargetkan, maka diharapkan untuk membuat justifikasi alasan tidak terpenuhi dengan yang diperjanjikan. Apabila masih dalam proses penilaian, diharapkan unit kerja terkait untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait penilaian.
2. Terkait pembangunan Zona Integritas (ZI), diharapkan semua unit kerja di Setjen DPR RI untuk melakukan pembangunan ZI dan untuk melakukan pembangunan dan persiapan selama satu tahun sebelum diajukan ke Kementerian PANRB. Untuk unit kerja yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), didorong untuk melanjutkan pembangunan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dimohon untuk Inspektorat Utama tetap melakukan pendampingan dan disampaikan kepada Kementerian PANRB bahwa di Setjen

- DPR RI tetap ada keberlangsungan upaya dari unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK.
3. Terkait indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), diharapkan Tahun 2024 adanya upaya agar terpenuhinya JFT PBJ dimana rekomendasi dari LKPP JFT PBJ pada Setjen DPR RI adalah sebanyak 23 yang terdiri dari 15 orang JFT PBJ Pertama, 7 orang JFT PBJ Muda dan 1 orang JFT PBJ Madya, namun sampai saat ini JFT PBJ yang ditempatkan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa baru ada 5 orang JFT PBJ Pertama. Selain itu, aspek penilaian dalam ITKP yakni indikator pemanfaatan sistem pengadaan, indikator kualifikasi perlu disosialisasikan lebih intensif dan menghimbau PPK dan Staf PPK untuk aktif menginput semua pengadaan barang dan jasa ke dalam aplikasi Sirup.
 4. Untuk indikator yang target 2024 hanya naik sedikit diatas target 2023, untuk mengevaluasi lagi target tersebut agar dapat menetapkan target 2024 yang lebih optimis.
 5. Mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan Data Statistik Sektor.
 6. Terus dilakukan upaya untuk berkomunikasi dengan BPK terhadap penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK agar bisa mencapai 100%.

PENGHARGAAN

Selamat kepada
Indra Iskandar
Sekretaris Jenderal DPR RI

Atas penghargaan yang diraih dari
INI ONESIA PR TOP LEADER AWARDS 2023
Diselenggarakan oleh Warta Ekonomi
Sebagai **Top Public Relations Leader 2023 for Developing Macroeconomics in Indonesia to Pursue Equal Welfare** kategori Government



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR: KEP-58/KPN.1207/2023
DIBERIKAN KEPADA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
(001012)
SEBAGAI
PERINGKAT III
SATKER DENGAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN TERBAIK SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023
Kategori Pagu Besar
Jakarta, 26 Juli 2023
Kepala KEPN Jakarta VII
Vicensia Retnasari

#GSMS
Government Social Media Summit
memberikan penghargaan kepada

DPR RI
sebagai
PEMENANG
pada **GSM Award 2022** untuk kategori Most Active (Lembaga)
Jakarta, 11 Januari 2023

Adieb Haryadi
Ketua Dewan Pengurus
Government Social Media Summit

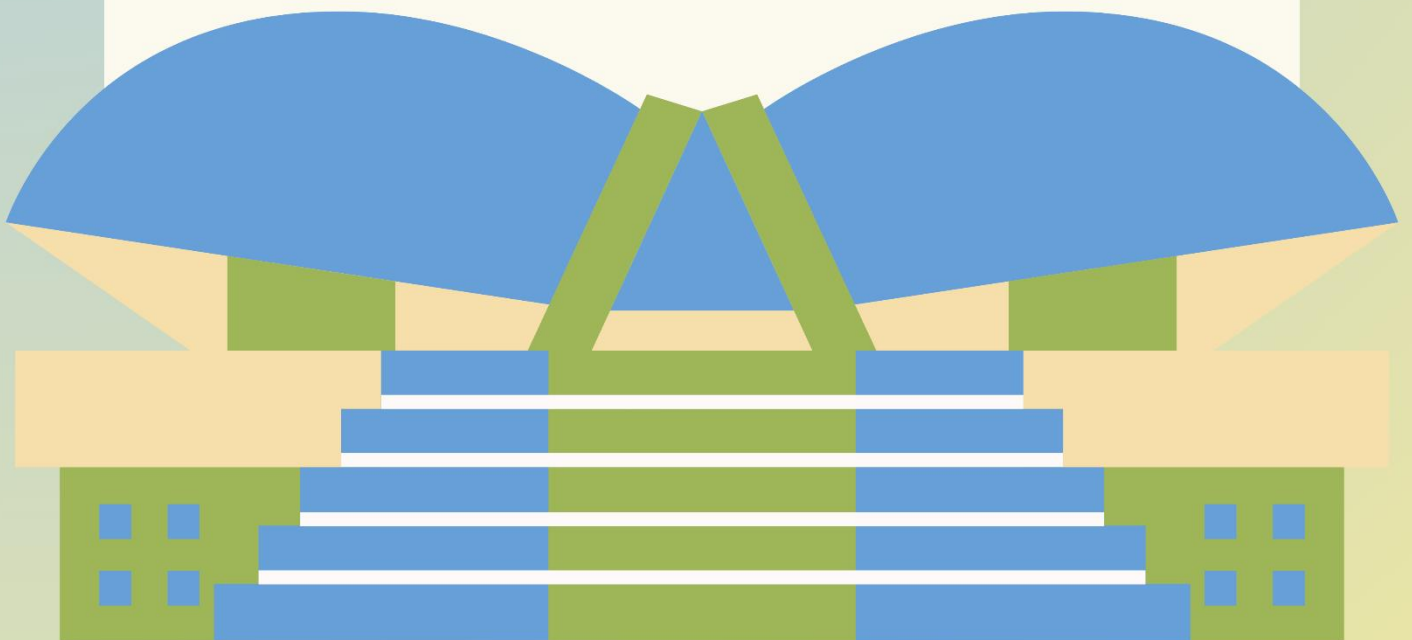


PIAGAM PENGHARGAAN
DIBERIKAN KEPADA
Dewan Perwakilan Rakyat
ATAS KEBERHASILAN MERAHAI
PERINGKAT KEEMPAT
KINERJA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022
KATEGORI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DENGAN PAGU SEDANG
DENGAN NILAI 94,71 (SANGAT BAIK)
JAKARTA, 05 MEI 2023
MENTERI KEUANGAN
SRI MULYANI INDRAMATI

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENGHARGAAN
No. 1449/1/PPM.00/III.2023
DIBERIKAN KEPADA
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Atas Prestasinya Menjadikan Perpustakaan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia sebagai Rujukan Nasional
Akreditasi Perpustakaan
Jakarta, 6 Maret 2023
Kepala Perpustakaan Nasional RI
Muhammad Syarif Bando



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1
BUKTI DUKUNG RB TEMATIK

I. PENGENTASAN KEMISKINAN

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait pengentasan kemiskinan	Naskah Akademik dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional	https://drive.google.com/drive/folders/19iTrJWA0mY4J1kUwp6wn_KblbToyqWGc?usp=share_link			x	
	Naskah Akademik dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	https://drive.google.com/drive/folders/1g-G8ZoHXSwYvPHSY_PamJ4ojTfcVRnoM?usp=share_link			x	
	Naskah Akademik dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat	https://drive.google.com/drive/folders/1PhVA-CpdupR_qTeph_PJPgbQ9Azr7J9Q?usp=share_link			x	
	Naskah Akademik dan RUU tentang Pengelolaan Zakat	https://drive.google.com/drive/folders/1WTSi1HNZ4WJhnKC1k2_FtZpvbNeED_Ub?usp=drive_link			x	
	Naskah Akademik dan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	https://drive.google.com/drive/folders/1pG8faFDX_XiEBLsbVzCTZICce70enlCm?usp=drive_link			x	
	Naskah Akademik dan RUU tentang Wakaf	https://drive.google.com/drive/folders/1U2ZSa5wp5dzJ4-DRnGVHS9JlvhFHQ1KG?usp=drive_link			x	

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	https://drive.google.com/drive/folders/1vxp_RDYyOvtyTMXH_C3gAD3EgOxcSmWJ?usp=drive_link			x	
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	https://drive.google.com/drive/folders/1Rz0jfm5ZIDup9xRWcooMSQgGWw-sdV7R?usp=drive_link	x			
	Konsep Keterangan DPR atas Perkara Nomor 45/PUU-XXI/2023 Pengujian UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	https://docs.google.com/document/d/1vh_69XeigS5AN2dznJlbNtTuu8kAC24/edit?usp=drive_link&oid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true		x		
Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” dalam Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UIRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk			x	
	Akselerasi Penurunan Prevelansi Stunting “ dalam Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UIRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk			x	
	Reformasi Subsidi Dan Kompensasi Energi” dalam Masukan PA3KN atas Nota Keuangan RAPBN 2024	https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drive_sdk			x	
	Program Perlindungan Sosial’ dalam Masukan PA3KN atas Nota Keuangan RAPBN 2024	https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drive_sdk			x	

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
		sdk				
	Penggunaan Dana Desa Sudah Saatnya Diprioritaskan Untuk Pemberdayaan Masyarakat” dalam Masukan PA3KN atas Nota Keuangan RAPBN 2024	https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5-IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drive_sdk			x	
	Perlindungan Sosial” dalam Telaahan atas Arah Kebijakan Fiskal dalam KEM PPKF	https://drive.google.com/file/d/1ABDDfLTpYIAyv-muhUyURxPr2eTq9z0Yj/view?usp=drivesdk		x		
	Kajian Pagu Indikatif Kementerian Sosial	https://drive.google.com/file/d/1AyhPxKca0bmp-afEKi2wQSQ7lcupe6cai/view?usp=drivesdk		x		
	Analisis/kajian tentang Upah Pekerja dalam Prospek Kesejahteraan: Perspektif UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan Perppu Cipta Kerja	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-1-M-2023.pdf	x			
	Analisis/kajian tentang Peran Infrastruktur Dalam Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/policy_brief/Policy%20Brief-28-1-M-2023.pdf	x			
	Analisis/kajian tentang Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia Pascapandemi	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/policy_brief/Policy%20Brief-28-1-M-2023.pdf	x			
	Analisis/kajian tentang Pentingnya Transparansi dalam Pembentukan RUU	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-9-I-P3DI-Mei-2023-		x		

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
	Kesehatan	1957.pdf				
	Analisis/kajian tentang Kebijakan Impor Beras dalam Pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-XV-7-I-P3DI-April-2023-1947.pdf		x		
	Analisis/Kajian tentang Target Penurunan Kemiskinan Ekstrim 0% Pada 2024	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Juni-2023-242.pdf		x		
	Analisis/kajian tentang Transformasi Sistem Pangan Global Untuk Pengelolaan Pangan Berkelanjutan di Indonesia	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-April-2023-236.pdf		x		
	Analisis/kajian tentang Hilirisasi Sektor Perikanan dan Kelautan dengan Memberdayakan Koperasi Nelayan	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Februari-2023-36.pdf	x			
	Analisis/kajian tentang Perlunya Satu Data Pangan	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Januari-2023-189.pdf	x			
	Analisis/kajian tentang Memperkokoh Keterkaitan	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-	x			

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
	Ketahanan Pangan dan Energi	PUSLIT-Januari-2023-236.pdf				
	Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tebu” dalam Buletin APBN edisi 2/2023	https://drive.google.com/file/d/1A2Z-17F6Kme4gX2VFBMXwF7vDZ-FAXeg/view?usp=drivesdk	x			
	Pernyataan Menpan RB Pintu masuk evaluasi anggaran kemiskinan dalam Sekilas APBN ed11/2023	https://drive.google.com/file/d/19XAIa-be7m3J5gfCSd224HsQgoHFEz56/view?usp=drivesdk	x			
	Akuntabilitas Data Keluarga Penerima Manfaat Aplikasi e-PKH” dalam Kajian Akuntabilitas ed 2/2023 hlm 13	https://drive.google.com/file/d/1C7E-spJgD0gBqyxsviJr-xAXKVuY-Cu1/view?usp=drivesdk	x			
	Akuntabilitas Pelaksanaan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT” dalam Kajian Akuntabilitas ed 3/2023 hlm 13	https://drive.google.com/file/d/1CL9Ps95-pjHz71zScftbGONOV84DNCNA/view?usp=drivesdk	x			
	Mungkinkah Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2023? Dalam Sekilas APBN ed 20/2023	https://drive.google.com/file/d/19hzU536EVXbAd29DNEtSwA3hvJq_gZji/view?usp=drivesdk	x			
	Anggaran Bansos Turun, Angka Putus Sekolah naik” dalam Sekilas APBN ED 31/2023	https://drive.google.com/file/d/1BA5nZWT0z7IQWUrLejn6yGuGfkff3vVy/view?usp=drivesdk		x		
	Angka putus Sekolah naik, Alarm Evaluasi Program Indonesia Pintar” dalam Sekilas APBN edisi 32/2023	https://drive.google.com/file/d/1C-0CckX2vNrI0nF78MwI5ywfpeZkjHiE/view?usp=drivesdk		x		

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
		=drivesdk				
	Optimisme Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dalam Menanggulangi Kemiskinan” dalam Kajian untuk Komisi VIII	https://drive.google.com/file/d/1CkSGieAcZj67B7RKaap8yEY9pUSkCzAm/view?usp=drivesdk		x		
	Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2022 Kementerian Sosial- Mitra Komisi II: Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 Lanjutan Tahun 2022 (Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara	https://drive.google.com/file/d/1AO5QIJPuUsNyGHYbNKnC0ulJlrvZ49/view?usp=drivesdk		X		
	Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	https://drive.google.com/file/d/1j1oaNk0K8be1LKpxr8Wp6RgpYYSjhnF/view?usp=drive_link			x	
	Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	https://drive.google.com/file/d/1b_CzXnXbXnziUcELKMx6bdkugByWa7w3/view?usp=drive_link		x		

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
	Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	https://drive.google.com/file/d/1c0cRUo4-9CLJNfuQuGdk2PEolcOleM7d/view?usp=drive_link	x			
	Analisis/kajian tentang Poin-Poin Krusial Perubahan Undang-Undang tentang Desa	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-XV-13-I-P3DI-Juli-2023-212.pdf			x	
	Analisis/kajian tentang Produksi Sapi dalam Negeri dan Kebijakan Swasembada Sapi	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-XV-12-II-P3DI-Juni-2023-182.pdf			x	
	Analisis/kajian tentang Pentingnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-XV-15-I-P3DI-Agustus-2023-242.pdf			x	
	Analisis/kajian tentang Stabilisasi Harga Beras	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-September-2023-234.pdf			x	
	Analisis/kajian tentang Peluang Membangun Ketahanan Pangan di Tengah El Nino	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-189.pdf			x	

II. PENGENDALIAN INFLASI

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
Tersedianya dukungan Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait inflasi						
Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait inflasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	Asumsi Dasar Ekonomi makro : Inflasi” dalam masukan PA3KN dalam Nota Keuangan RAPBN 2024	https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5-IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drive_sdk			X	
	Asumsi Dasar Ekonomi Makro : Inflasi: dalam Tinjauan atas Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal	https://drive.google.com/file/d/1CVeX9-uTvav8tB4L7RowFGD8WWIWHudb/view?usp=drivesdk		X		
	Mengendalikan Inflasi Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Ekonomi Dan Daya Beli Masyarakat” dalam Kajian Isu Strategis Pembangunan Tahun 202	https://drive.google.com/file/d/1CRoFM8JGFBp5Lsc7aq9qac3W_mywk7Hw/view?usp=drivesdk			X	
Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait	Analisis/kajian tentang Mengatasi Gejolak Inflasi Menjelang Ramadhan	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Maret-2023-219.pdf	X			

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
dengan inflasi	Analisis/kajian tentang Tren Menurunnya Surplus Neraca Perdagangan Indonesia	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Maret-2023-234.pdf	x			
	Analisis/kajian tentang Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Faktor Pendukungnya	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2023-249.pdf	x			
	Analisis/kajian tentang Mewaspada Dampak Kenaikan Suku Bunga Acuan terhadap Sektor Riil	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Januari-2023-219.pdf	x			
	Analisis/kajian tentang Ancaman Krisis Utang di Tengah Risiko Resesi Global	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Januari-2023-213.pdf	x			
	Analisis/kajian tentang Daya Tahan Ekonomi Indonesia dalam Mengantisipasi Resesi Global	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-1-M-2023.pdf	x			
	Analisis/kajian tentang Catatan DPR Terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 2024	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-XV-10-II-P3DI-Mei-2023-163.pdf		x		

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
	Analisis/kajian tentang Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 dan Strategi Kebijakan	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-XV-8-II-P3DI-April-2023-224.pdf		x		
	Analisis/kajian tentang Antisipasi Kenaikan Harga Komoditas Pangan Saat Bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-XV-6-II-P3DI-Maret-2023-220.pdf	x			
	Analisis/kajian tentang Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 di Tengah Perlambatan Perekonomian Global	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-XV-3-I-P3DI-Februari-2023-213.pdf	xx			
	Analisis/kajian tentang Neraca Perdagangan dan Struktur Ekspor Indonesia	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-XV-2-II-P3DI-Januari-2023-234.pdf	x			
	Analisis/kajian tentang Strategi Stabilisasi Ekonomi Di Tengah Ancaman Resesi Global	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-XV-1-I-P3DI-Januari-2023-249.pdf	x			
	Analisis/kajian tentang Surplus Fiskal 2023: Momentum Genjot Perekonomian di Era Endemi	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Juni-2023-216.pdf		x		

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
	Analisis/kajian tentang Premi Restrukturisasi Perbankan Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Krisis Keuangan	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Juni-2023-219.pdf		x		
	Pengendalian Inflasi Volatile Food” dalam Buletin APBN edisi 14/2023	https://drive.google.com/file/d/1Dh160pJMvWYLZGCrXQ-h2cUXy0mlSeMB/view?usp=drivesdk			x	
	Harga Beras Naik: Benarkah Ketersediaan Beras yang tidak Banyak?’ dalam Sekilas APBN edisi 7/2023	https://drive.google.com/file/d/1BoJbqRQBRoXT51Dk1Gef1RA9mJaHiMjo/view?usp=drivesdk	x			
	Harga Beras Melambung dan masih selalu Impor: Kemana Larinya Kedaulatan Anggaran?” dalam Sekilas APBN edisi 12/2023	https://drive.google.com/file/d/1BiAextiFhV2ExWwUmJLFr3IUSgWQp2Ja/view?usp=drivesdk	x			
	Mewaspadaai Guncangan Akibat Keruntuhan Bank Besar di AS” Dalam Sekilas APBN edisi 24/2023	https://drive.google.com/file/d/1BR0d2mEOiv_r pS3uIVF4P3Ce5E4xfG9F/view?usp=drivesdk		x		
	“Dampak Krisis Perbankan AS dan Mitigasinya Terhadap Perekonomian Indonesia” dalam Sekilas APBN edisi 26/2023	https://drive.google.com/file/d/1BMtQEGVspvbenAhcrlplodNdkLv4s2F/view?usp=drivesdk		x		
	Ancaman El Nino dan Potensi Peningkatan inflasi Indonesia” dalam Sekilas APBN edisi 33/2023	https://drive.google.com/file/d/1BBJ_bS9zTWqET7TkfQLAq19BD1L-HTu/view?usp=drivesdk		x		
	Analisis/kajian tentang Rancangan APBN Tahun	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/l				

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
	Anggaran 2024 untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi	nfo%20Singkat-XV-16-II-P3DI-Agustus-2023-245.pdf				
	Analisis/kajian tentang Stimulus Fiskal RAPBN 2024	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Agustus-2023-216.pdf				

III. PENINGKATAN INVESTASI

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait investasi	Naskah Akademik dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional	https://drive.google.com/drive/folders/10gUKxLL-U-RUNgNHvx711ticZF8uGw3hG?usp=share_link			x	
	Naskah Akademik dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	https://drive.google.com/drive/folders/1B9Mllhc3Q9bq_pNsQ8Xbvqc9YSRvUB2l?usp=share_link			x	
	Naskah Akademik dan RUU tentang Industri Strategis Perkebunan	https://drive.google.com/drive/folders/1P2ak0CE81zuMNU-GQ5IJTi39RNW5kyhT?usp=share_link			x	
	Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	https://drive.google.com/drive/folders/1VWQ0ysT61QVIGFI5BC9Y5Uos-oUqPfMr?usp=share_link			x	
	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen	https://drive.google.com/drive/folders/1IHNJOINdgOGwxghoFLBtBU2Tx10VzJbz?usp=share_link		x		
	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1aZJBbCZ0Xdf-AM8ouMaHUdBDd8eaKKDg?usp=share_link	x			
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang	https://drive.google.com/drive/folders/1kpgRvjY	x			

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	AAXRPS4feL94-0jlqBLeI7cW9?usp=drive_link				
	Keterangan DPR atas Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	https://docs.google.com/document/d/1QTZmjJSNKMch5hGIMn-ew95X-x5KwNs/edit?usp=drive_link&oid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true			x	
	Keterangan DPR atas Perkara Nomor 5 dan 6/PUU-XXI/2023 Pengujian formil Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	https://drive.google.com/file/d/1sctulFktl1JMm8sJyGbeK1SamY3WxAU0/view?usp=drive_link	x			
	Keterangan DPR atas Perkara Nomor 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023 Pengujian formil UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	https://drive.google.com/file/d/16CntclhFVVmy3iXqBIL8T4ZERFB_QVrY/view?usp=drive_link			x	
	Keterangan DPR atas Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 Pengujian formil UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	https://drive.google.com/file/d/1eFYbAsAA_7U857DnF4FG3u5P2wDHQ2E9/view?usp=drive_link			x	
	Konsep keterangan DPR atas Perkara Nomor 11/PUU-XXI/2023	https://docs.google.com/document/d/1IFeHsd9D2DE-VjlfOwlro8fT---jBWWd/edit?usp=drive	x			

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
	Pengujian Materiil UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true				
	Konsep keterangan DPR atas Perkara 14/PUU-XXI/2023 Pengujian formil Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	https://docs.google.com/document/d/1vdkwIk9PeOKwY-eylHdPucj_IYuP9efF/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true	x			
	Konsep Keterangan DPR atas Perkara Nomor 18/PUU-XXI/2023 Pengujian UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	https://docs.google.com/document/d/1CrlhhPbrf_QQW9nEMP0fgBL0foK_Y_3me/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true	x			
	Konsep Keterangan DPR atas Perkara Nomor 38/PUU-XXI/2023 Pengujian formil dan materiil UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	https://docs.google.com/document/d/1INdHJrgu_aGj28w1QzmNZF2IOj4l0D_ef/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true		x		
	Konsep Keterangan DPR atas Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 Pengujian UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	https://docs.google.com/document/d/1TxZqAxL6-rcshmssnWoFg3B7d8qUT7f5/edit?usp=drive_link&ouid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true		x		

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
	Konsep keterangan DPR atas perkara nomor 52/PUU-XXI/2023 Pengujian KUHD	https://docs.google.com/document/d/1YSHePS8H0nbKuTKFhj-DIOP5F0hCyty-/edit?usp=sharing&oid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true		X		
	Konsep Keterangan DPR atas perkara nomor 83/PUU-XXI/2023 Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	https://docs.google.com/document/d/1aeqvplW MJ3Sm8w3KYdSIhFxsrehizmNj/edit?usp=sharing&oid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true			X	
	Konsep keterangan DPR atas perkara nomor 84/PUU-XXI/2023 Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	https://docs.google.com/document/d/1ThWtFcluktc2S6RjKDKIj9kTaVZFf01T/edit?usp=drive_link&oid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true			X	
	Konsep keterangan DPR atas perkara nomor 112/PUU-XXI/2023 Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	https://docs.google.com/document/d/1H6S5RywJK4reofjlgLRab-8bbKF65VFW/edit?usp=drive_link&oid=111904602966679007255&rtpof=true&sd=true			X	
Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait investasi dalam proses pembahasan dan penetapan	Kajian Pagu Indikatif Badan Koordinasi Penanaman Modal - Mitra Kerja Komisi VI	https://drive.google.com/file/d/1D0YAnPV68XX FECpe377wb8DXiZVfYcEo/view?usp=drivesdk		X		
	Strategi Mencapai Target Investasi 2024 Melalui Online Single Submission 2.0” dalam Masukan PA3KN atas Nota	https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5 IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drive			X	

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
APBN	Keuangan RAPBN 2024	sdc				
	Creative Financing Dalam Pembangunan Infrastruktur” dalam Masukan PA3KN atas Nota Keuangan RAPBN 2024	https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5_IS5rkcyCKyn9Ls-i8jThoL/view?usp=drive_sdk			X	
	Kebijakan Insentif Perpajakan, Perbaikan Kemudahan serta Kepastian Usaha Guna Meningkatkan Investasi” dalam dalam Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UIRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk			X	
	Hilirisasi SDA” dalam Telaahan atas Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/1ABDDfLTpYIAyvuhUyURxPr2eTq9z0Yj/view?usp=drivesdk		X		
	Percepatan Pembangunan infrastruktur Guna Mendorong Investasi serta Peningkatan Kapasitas produksi dan Daya Saing dalam dalam Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/19yqcg-3h2OV7_UIRjFb1WBB71TE_WmOF/view?usp=drivesdk				
Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan investasi	Analisis/kajian tentang Perkembangan Investasi di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-2-J-2023.pdf		X		
	Analisis/kajian tentang Kepastian Hukum Realisasi Investasi Non-APBN Pembangunan Ibu Kota Negara	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-V-2-J-2023.pdf		X		
	Analisis/kajian tentang Upaya Peningkatan Investasi melalui	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/		X		

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
	Kawasan Ekonomi Khusus Lido	Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-April-2023-241.pdf				
	Analisis/kajian tentang Komitmen Investasi Hulu Migas Indonesia 2023	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Januari-2023-235.pdf	x			
	Analisis/kajian tentang Perppu Cipta Kerja: Kepastian Hukum bagi Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha?	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Januari-2023-216.pdf	x			
	Analisis/kajian tentang Perppu Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Investasi	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Januari-2023-195.pdf	x			
	Peran Kemendagri dalam Perbaikan Iklim Investasi di Daerah” dalam kajian Akuntabilitas ed 3/2023 hlm 3	https://drive.google.com/file/d/1CfeCG4xslcmC2PVuZrPeUOYeDgnFLHWD/view?usp=drivesdk	x			
	Anomali Investasi, tantangan Ketenagakerjaan Indonesia	https://drive.google.com/file/d/1CeSU-QKNJFJolylLlgqqkDZH7klsWlyw/view?usp=drivesdk	x			
	Peta Jalan Industri TPT Indonesia : Penting untuk Segera ada Agar Mampu Kembali Berdaya” Dalam sekilas APBN edisi 6/2023	https://drive.google.com/file/d/1Bx2-f2a5w11B0yM0wPCoPXQr6xsYMtI7/view?usp=drivesdk	x			

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
	“80% Pembiayaan Infrastruktur IKN berasal dari Swasta, Bagaimana tantangannya?” dalam Sekilas APBN edisi 18/2023	https://drive.google.com/file/d/1BfrS4ZH4P7ukpW0dC42NIVd9IblNsDDv/view?usp=drivesdk	x			
	Perkembangan Investasi di Daerah dan Perlunya Pemerataan Investasi Antar Wilayah” dalam BIB Ed. 1 2023	https://drive.google.com/file/d/1E3fxRvA_381_YLD8fmDc7sB4-uOC5lpV/view?usp=drivesdk	x			
	Analisis Insentif Fiskal Hulu Migas, Harus Memikat Agar Pertumbuhan Investasi Tidak Melambat	https://drive.google.com/file/d/1EX63j-BQQnJCxNSOWZU0NK87200KPZQR/view?usp=drivesdk		x		
	Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2022 : Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Kegiatan Diplomasi Ekonomi di Bidang Investasi Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	https://drive.google.com/file/d/1E0Zn9dbfOB8U7LI31JhNZRgayt4mQJC-/view?usp=drivesdk		x		
	Analisis/kajian tentang Tantangan Investasi Energi Baru dan Energi Terbarukan Menuju Indonesia <i>Net Zero Emission</i>	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-XV-11-I-P3DI-Juni-2023-228.pdf			x	

IV. DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait digitalisasi administrasi pemerintahan	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	https://drive.google.com/drive/folders/1t4ecm1K-Hoa6KMcl0Z-YOk1WRa1sYa3a?usp=drive_link	x			
	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	https://drive.google.com/drive/folders/1iv0W5DeWTMYyl3omSVSUXbZ-E7qJ7tKO?usp=drive_link	x			
	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1mCK1Rt3SPAJSQsWE1zXf38QRtVQs-1Ut?usp=share_link	x			
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	https://drive.google.com/drive/folders/1LsR9Wa9P8G8z7IDWu5ITPhtKxqi5UexJ?usp=drive_link	x			
	Naskah Akademik dan RUU tentang Satu Data Indonesia	https://drive.google.com/drive/folders/1Rb78WCxRFoN9GzROfkld3m9x2Gb1ntaL?usp=share_link			x	
	Keterangan DPR atas Perkara Nomor 108 dan 110/PUU-XX/2022 Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	https://drive.google.com/file/d/1QQNvLKMaKKjaUKVI8q2NRBvtCL0vjT2B/view?usp=drive_link	x			

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	PNBP Polri: Buah Manis Dari Perbaikan Organisasi Dan Digitalisasi Layanan dalam Masukan PA3KN dalam Nota Keuangan RAPBN 20	https://drive.google.com/file/d/1CUo1kW-S5-IS5rkcyCKyn9Ls-i8iThoL/view?usp=drivesdk			X	
	Kajian Pagu Indikatif Kementerian Kominfo-Mitra Komisi I DPR RI	https://drive.google.com/file/d/1E5dlHYAA-YsyO8b2-DKexN34-EHzDfedZi/view?usp=drivesdk		X		
	Kajian Pagu Indikatif Kementerian Pan-RB-Mitra Komisi II	https://drive.google.com/file/d/1EXKBTHV-XVbOE2IDpD015adZsWQaWQFpg/view?usp=drivesdk		X		
	Analisis/kajian tentang Pelindungan Data Pribadi Pada Aplikasi JMO	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2023-181.pdf		X		
	Analisis/kajian tentang Digitalisasi Sistem Keuangan untuk Peningkatan Inklusi Keuangan Kawasan ASEAN	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Maret-2023-249.pdf	X			
	Analisis/kajian tentang Pariwisata Digital: Disrupsi dan Pemanfaatan Teknologi untuk Pariwisata	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2023-210.pdf	X			
	Penguatan SPBE dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	https://drive.google.com/file/d/1E8GM55LMyR-i-uNrwpx0_8qIKqMM		X		

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
	(Buletin APBN, Ed. 12/2023)	PU9/view?usp=drive_sdk				
	IHPS					
	Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	https://drive.google.com/file/d/1bPQieh6xUihwWnyq5c8ywnUF4dVt4pz0/view?usp=drive_link		x		
	Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	https://drive.google.com/file/d/1c0cRUo4-9CLJNfuQuGdk2PEolcOleM7d/view?usp=drive_link	x			
	Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	https://drive.google.com/file/d/11OpK8Sk8ZlfS8ArxcU41cgBA0qElb-6t/view?usp=drive_link			x	
	Analisis/kajian tentang Digitalisasi Pendidikan Indonesia	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/policy_brief/Policy%20Brief-28-1-M-2023.pdf			x	
	Analisis/kajian tentang Pemutusan Akses Platform Digital yang Memuat Konten Indoktrinasi dan Radikalisme	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-181.pdf			x	
	Analisis/kajian tentang Transformasi Ekonomi Digital	https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-181.pdf			x	

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
	di Indonesia	ekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Agustus-2023-2047.pdf				
	Digitalisasi Sistem Kesehatan	https://drive.google.com/file/d/13g5UKzJOtWyQGOICsdRAShek_4m3wPe/view?usp=sharing				
Dukungan Teknologi Informasi	Tersedianya layanan teknologi informasi pendukung fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang terintegrasi	https://drive.google.com/file/d/1FaQluG-D-XTsGiU6M8PDFRsAZKVG0PPI/view?usp=drivesdk				

V.PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Sasaran Tematik	Jenis Bukti Dukung	Link	Periode Triwulan			
			1	2	3	4
Tersedianya anggaran belanja barang/jasa minimal 40% untuk produk dalam negeri	Tampilan dashboard perencanaan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada aplikasi SIRUP Setjen DPR RI TA. 2023	Dashboard SIRUP 2023 > RUP K/L (google.com)	✓	✓	✓	✓

LAMPIRAN 2
KETERANGAN BUKTI DUKUNG REALISASI PER 30 SEPTEMBER 2023

A. TEMATIK KEMISKINAN

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait pengentasan kemiskinan	1. Naskah Akademik dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional 2. Naskah Akademik dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. Naskah Akademik dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat 4. Naskah Akademik dan RUU tentang Pengelolaan Zakat 5. Naskah Akademik dan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak 6. Naskah Akademik dan RUU tentang Wakaf 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 9. Konsep Keterangan DPR atas Perkara Nomor 45/PUU-XXI/2023 10. Pengujian UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	1. Dalam Pasal 3 Draft RUU tentang Kewirausahaan Nasional dijelaskan tujuan dari penyelenggaraan kewirausahaan nasional yakni menciptakan Wirausaha baru yang kreatif dan inovatif; meningkatkan kualitas dan kapasitas Wirausaha; meningkatkan skala usaha; dan menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja. Dari tujuan tersebut terlihat bahwa RUU ini dapat mengentaskan kemiskinan. 2. Dalam Pasal 3 huruf c Draft RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa tujuan pengaturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yakni untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi Pelaku Usaha. Dari tujuan ini maka dengan adanya iklim usaha yang sehat akan membuka lapangan pekerjaan dan dapat mengentaskan kemiskinan. 3. Dalam Pasal 3 huruf d Draft UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat antara lain meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan.

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>4. Dalam Konsideran huruf b RUU tentang Pengelolaan Zakat tercantum bahwa tujuan dilaksanakan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya hal ini dipertegas pula dalam Pasal 3 huruf a bahwa penyelenggaraan pengelolaan zakat bertujuan mengentaskan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Bab II, Bagian Keempat Penyaluran, Paragraf 3 Pendayagunaan, mengatur mengenai pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan fakir dan miskin.</p> <p>5. Dalam Pasal 3 RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak diatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak diantaranya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusia yang unggul merupakan salah satu bentuk untuk dapat mengentaskan kemiskinan.</p> <p>6. Dalam Pasal 42 RUU tentang Wakaf dijelaskan bahwa dalam upaya mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; kemajuan dan peningkatan ekonomi; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya. Peruntukan wakaf ini sebagai bentuk untuk membantu pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan peruntukan harta benda wakaf.</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>7. Pasal 65 ayat (4) terkait tanggung jawab pemerintah atas pemenuhan gizi keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Selanjutnya Pasal 189 huruf e dan f terkait kewajiban rumah sakit untuk menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, serta melaksanakan fungsi sosial antara lain memberikan fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin. Kemudian pada Penjelasan Pasal 11 terkait ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terluar, terpencil, dan termiskin.</p> <p>8. Dalam Pasal 3 UU tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja diatur bahwa salah satu tujuan pembentukan Perpu ini adalah untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja, menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.</p> <p>9. Pemohon mengajukan pengujian UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tepatnya pada ketentuan Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan yang berbunyi “Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan”. Pemohon beranggapan ketentuan tersebut inkonstitusional karena Pemohon yang merupakan salah satu Pelaku Usaha Perkebunan dan juga sebagai Penerima Manfaat</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			mendalilkan memiliki hak untuk mengetahui alokasi Pembiayaan Usaha Perkebunan yang bersumber dari Penghimpunan Dana Pelaku Usaha Perkebunan.
2.	Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” dalam Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024 2. Akselerasi Penurunan Prevelansi Stunting “ dalam Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024 3. Reformasi Subsidi Dan Kompensasi Energi” dalam Masukan PA3KN atas Nota Keuangan RAPBN 2024 4. Program Perlindungan Sosial’ dalam Masukan PA3KN atas Nota Keuangan RAPBN 2024 5. Penggunaan Dana Desa Sudah Saatnya Diprioritaskan Untuk Pemberdayaan Masyarakat” dalam Masukan PA3KN atas Nota Keuangan RAPBN 2024 6. Perlindungan Sosial” dalam Telaahan atas Arah Kebijakan Fiskal dalam KEM PPKF 7. Kajian Pagu Indikatif Kementerian Sosial 	<p>Analisis yang disusun merupakan bentuk dukungan kepada anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi anggaran pada proses pembahasan dan penetapan APBN yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Substansi analisis yang diberikan mencakup beberap hal antara lain: pengentasan kemiskinan ekstrim, akses air minum layak dan sanitasi layak, perlindungan sosial, pagu indikatif kementerian/lembaga yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan, subsidi, bantuan sosial, dan kebijakan lainnya.</p> <p>Berapa ringkasan kajian/analisis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya anggaran kemiskinan yang tidak sejalan dengan hasil penurunan kemiskinan perlu dievaluasi. Di 2015, jumlah penduduk miskin sebanyak 28,51 juta jiwa dengan rata-rata garis kemiskinan (menurut provinsi) sebesar Rp4,48 juta per orang per tahun. Anggaran kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah melalui APBN sebesar Rp230,79 triliun atau setara Rp8,32 juta per orang per tahun. Apabila berasumsi alokasi Rp8.322.809 per orang per tahun tersebut diserahkan secara tunai ke seluruh penduduk miskin, maka seharusnya Indonesia sudah zero kemiskinan, karena alokasi anggarannya sekitar 1,8 kali lipat dari garis kemiskinan. Realitanya

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>tidak demikian, angka kemiskinan di 2016 masih 27,76 juta atau hanya turun 750ribu jiwa. Kontradiksi alokasi anggaran kemiskinan per orang di 2015 dengan realita angka kemiskinan di 2016 inilah yang menjadi dasar yang solid untuk mengevaluasi total berbagai anggaran program pengentasan kemiskinan. Terlebih lagi, fenomena kotradiktif ini terus berlanjut sepanjang 2015-2022. Alokasi anggaran kemiskinan per orang per tahun lebih besar di atas 1,5 kali lipat rata-rata garis kemiskinan per orang per tahun.</p> <p>2. Target angka kemiskinan dalam APBN tidak pernah tercapai. Untuk itu, Badan Anggaran DPR RI perlu meminta pemerintah untuk dapat memenuhi target angka kemiskinan yang di tetapkan dalam APBN 2024. Badan Anggaran DPR RI juga meminta kepada kepada pemerintah agar tidak hanya mengejar angka kemiskinan secara agregat nasional saja. Pemerintah juga harus mampu memperkecil disparitas capaian angka kemiskinan antar provinsi dan antar kabupaten/kota di setiap regional pulau di Indonesia, serta memperkecil indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan.</p> <p>3. Guna menanggapi inclusion error dan disparitas distribusi energi bersubsidi, maka penguatan data yang akurat dan memiliki profil terhadap pengguna yang detail mutlak untuk dibangun. Dalam rangka memitigasi dampak ketidakpastian global terhadap alokasi subsidi dan kompensasi energi, maka peningkatan bauran energi harus dilakukan. Bauran energi salah satunya dengan</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>mengoptimalkan sumber daya energi baru terbarukan (EBT) yang terdapat di Indonesia, mempersingkat masa operasi pembangkit listrik fosil, pengembangan EBT kepastian hukum, pemberian insentif fiskal maupun non fiskal, adanya skema pendanaan investasi yang mudah dan cepat, Selain meningkatkan bauran energi, pelaksanaan tariff adjustment juga sebaiknya dilakukan untuk menekan alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi. Penyesuaian tarif ini sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan APBN dan kondisi perekonomian serta daya beli masyarakat.</p> <p>4. Alokasi anggaran terbesar ditujukan kepada program dukungan manajemen yaitu sebesar 48,48 persen dari total belanja Kementerian ESDM, yaitu sebesar Rp3.285 miliar. Alokasi anggaran untuk program energi dan ketenagalistrikan menempati urutan kedua yaitu sebesar 31,93 persen dari total belanja Kementerian ESDM, sebesar Rp2.163,7 miliar. Meskipun memiliki porsi nomor dua terbesar, namun jika dibandingkan dengan outlook di tahun 2023, alokasi program energi dan ketenagalistrikan mengalami penurunan sebesar 31,65 persen. Seyogyanya alokasi anggaran untuk program energi dan ketenagalistrikan minimal sama dengan dukungan manajemen, karena subsidi Energi dan subsidi listrik menjadi bagian dari anggaran program energi dan ketenagalistrikan.</p> <p>5. Terkait dengan penghapusan eksmiskinan ekstrim,</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) memiliki sejumlah masukan kepada AKD DPR RI, antara lain:</p> <p>a. Sebagai tindak lanjut pepadanan dan sinkronisasi data antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mengeluarkan masyarakat-masyarakat yang seharusnya tidak berhak menerima program (inclusion error) dan memasukkan kelompokkelompok masyarakat yang seharusnya berhak menerima namun selama ini belum mendapatkan manfaat dari program-program eksisting.</p> <p>b. Pemerintah pusat terutama melalui Kemenko PMK maupun Sekretariat Wakil Presiden, perlu mendorong konvergensi dan keterpaduan antar program yang dilakukan oleh K/L dan Pemerintah daerah dengan didukung sistem dan mekanisme monitoring yang terintegrasi untuk memastikan setiap masyarakat miskin ekstrem dan masyarakat miskin mendapatkan program-program bantuan secara komprehensif.</p> <p>c. Pemerintah pusat terutama melalui Kemenko PMK maupun Sekretariat Wakil Presiden, perlu mendorong konvergensi dan keterpaduan antar program yang dilakukan oleh K/L dan Pemerintah daerah dengan didukung sistem dan mekanisme monitoring yang terintegrasi untuk memastikan setiap masyarakat miskin ekstrem dan masyarakat miskin mendapatkan program-program bantuan secara komprehensif</p> <p>6. Terkait penurunan prevalensi stunting, Pusat Analisis</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) memiliki sejumlah masukan kepada AKD DPR RI, antara lain: Pencegahan stunting perlu dilakukan secara optimal pada 3 (tiga) tingkatan fasilitas layanan Kesehatan,</p> <p>a. Perlu ada penguatan komitmen dan kepastian anggaran untuk kelima pilar Strategi Nasional (Stranas) percepatan penurunan prevalensi stunting yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting.</p> <p>b. Perlu pemberdayaan masyarakat dalam hal penganggaran atau pendanaan program pencegahan dan penurunan stunting, sehingga masyarakat mampu mencari alternatif pendanaan.</p> <p>c. Penguatan peran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sector percepatan penurunan stunting.</p> <p>d. Percepatan penyusunan aturan pelaksana dan penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.</p> <p>7. Terkait dengan tata kelola perlindungan sosial, terdapat beberapa catatan kebijakan yang disampaikan kepada Komisi VII DPR RI, antara lain:</p> <p>a. Perlu mengawal program pemerintah dalam membangun data kependudukan tunggal, atau satu data yang merupakan data integrasi yang dapat digunakan untuk berbagai program, termasuk bantuan sosial.</p> <p>b. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>konvergensi atau komplementaritas antar program Perlinsos adalah membuat regulasi yang mengatur tentang konvergensi program Perlinsos secara komprehensif</p> <p>c. Untuk mengatasi kesalahan penyaluran Bansos pemerintah yang tidak sesuai ketentuan, diperlukan upaya-upaya seperti desain pemrograman perlinsos, transformasi digital, dan koordinasi lintas sektor.</p>
3.	Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan pengentasan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis/kajian tentang Upah Pekerja dalam Prospek Kesejahteraan: Perspektif UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan Perppu Cipta Kerja 2. Analisis/kajian tentang Peran Infrastruktur Dalam Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional 3. Analisis/kajian tentang Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia Pascapandemi 4. Analisis/kajian tentang Pentingnya Transparansi dalam Pembentukan RUU Kesehatan 5. Analisis/kajian tentang Kebijakan Impor Beras dalam Pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah 6. Analisis/Kajian tentang Target Penurunan Kemiskinan Ekstrim 0% Pada 2024 7. Analisis/kajian tentang Transformasi Sistem Pangan Global Untuk Pengelolaan 	<p>Analisis yang disusun merupakan bentuk dukungan kepada anggota DPR RI dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan APBN yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Substansi analisis yang diberikan mencakup beberapa hal antara lain: target dan rencana kebijakan pengentasan kemiskinan, implementasi kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah, perlindungan sosial, pendidikan, upah pekerja, kesehatan dan kebijakan lainnya.</p> <p>Berapa ringkasan kajian/analisis antara lain:</p> <p>a. Untuk mewujudkan target 0% kemiskinan ekstrim di Indonesia pada tahun 2024, DPR RI melalui Komisi VIII yang memiliki fungsi pengawasan, dalam rapat kerja bersama pemerintah dapat segera: Mendorong kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan program bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang miskin ekstrim. <i>Up date</i> kesesuaian data sangat</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
		<p>Pangan Berkelanjutan di Indonesia</p> <p>8. Analisis/kajian tentang Hilirisasi Sektor Perikanan dan Kelautan dengan Memberdayakan Koperasi Nelayan</p> <p>9. Analisis/kajian tentang Perlunya Satu Data Pangan</p> <p>10. Analisis/kajian tentang Memperkokoh Keterkaitan Ketahanan Pangan dan Energi</p> <p>11. Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tebu” dalam Buletin APBN edisi 2/2023</p> <p>12. Pernyataan Menpan RB Pintu masuk evaluasi anggaran kemiskinan dalam Sekilas APBN ed11/2023</p> <p>13. Akuntabilitas Data Keluarga Penerima Manfaat Aplikasi e-PKH” dalam Kajian Akuntabilitas ed 2/2023 hlm 13</p> <p>14. Akuntabilitas Pelaksanaan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT” dalam Kajian Akuntabilitas ed 3/2023 hlm 13</p> <p>15. Mungkinkah Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2023? Dalam Sekilas APBN ed 20/2023</p> <p>16. Anggaran Bansos Turun, Angka Putus Sekolah naik” dalam Sekilas APBN ED 31/2023</p> <p>17. Angka putus Sekolah naik, Alarm Evaluasi Program Indonesia Pintar” dalam Sekilas APBN edisi 32/2023</p> <p>18. Optimisme Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dalam</p>	<p>dibutuhkan guna tercapainya program yang tepat sasaran</p> <p>b. Transformasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan keluar dari jebakan middle income trap. Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam membangun infrastruktur melalui berbagai kebijakan, termasuk kebijakan fiskal. Transformasi ekonomi diharapkan dapat menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki value added tinggi.</p> <p>c. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah harus selalu melakukan evaluasi terkait rencana impor beras, agar tidak merugikan petani dalam negeri serta memperbaiki peran dan cara kerja Bulog dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, DPR RI melalui Komisi IV dan VI perlu melakukan pengawasan terhadap upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ini.</p> <p>d. Kebijakan hilirisasi di sektor perikanan dan kelautan berpotensi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Melalui kebijakan ini, berbagai produk perikanan akan memiliki nilai tambah. Akan tetapi, kebijakan tersebut harus berdampak terhadap kesejahteraan nelayan. Untuk itu, pemberdayaan koperasi nelayan sebagai penyangga usaha sangat diperlukan. Sehubungan dengan itu, diperlukan dukungan dan perhatian dari DPR RI, khususnya Komisi IV, yang membidangi sektor perikanan dan kelautan dengan melakukan pengawasan dan dorongan terhadap pemerintah dalam upaya hilirisasi industri sektor ini tanpa melupakan</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
		<p>Menanggulangi Kemiskinan” dalam Kajian untuk Komisi VIII</p> <p>19. Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2022 Kementerian Sosial- Mitra Komisi II: Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan</p> <p>20. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Penanganan Covid-19</p> <p>21. Lanjutan Tahun 2022 (Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan</p> <p>22. Instansi Lain terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, D.I</p> <p>23. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara</p> <p>24. Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p> <p>25. Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang</p> <p>26. Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</p> <p>27. Analisis/kajian tentang Poin-Poin Krusial Perubahan Undang-Undang tentang Desa</p> <p>28. Analisis/kajian tentang Produksi Sapi dalam Negeri dan</p>	<p>berbagai upaya pembangunan sisi hulu dari sektor perikanan. Penguatan kelembagaan koperasi nelayan sangat diperlukan sehingga nelayan mempunyai daya tawar dan daya saing dalam pembangunan A industri perikanan.</p> <p>e. Banyak masyarakat miskin yang menjadi korban perdagangan orang karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga sehingga sistem edukasi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian pemerintah.</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 perlu diganti dengan pengaturan yang baru yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Pengaturan dalam UU pengumpulan uang dan barang ini menghambat pelaksanaan zakat dan pengumpulan bantuan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana maupun dalam upaya pengentasan kemiskinan.</p> <p>g. Diperlukan komitmen Pemerintah untuk memberikan ganti rugi bagi masyarakat yang telah direlokasi karena adanya bencana, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya selama ini.</p> <p>h. 8Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM khususnya Pekerja Sosial melalui program pelatihan dan proses rekrutmen yang sesuai dengan standar, peningkatan komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial, simplifikasi dan integrasi pendataan kesejahteraan sosial, sosialisasi penyusunan program kerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, dan mempermudah aksesibilitas DTKS.</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
		Kebijakan Swasembada Sapi 29. Analisis/kajian tentang Pentingnya Akselerasi Penurunan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat 30. Analisis/kajian tentang Stabilisasi Harga Beras 31. Analisis/kajian tentang Peluang Membangun Ketahanan Pangan di Tengah El Nino	

B. TEMATIK INVESTASI

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait investasi.	1. Naskah Akademik dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional 2. Naskah Akademik dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. Naskah Akademik dan RUU tentang Industri Strategis Perkebunan 4. Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan	1. Dalam Bab VII tentang penumbuhan Usaha di Draft RUU tentang Kewirausahaan Nasional diatur bahwa penumbuhan usaha yang dilakukan melalui kemudahan legalitas usaha, pembentukan zonasi usaha, dan dukungan promosi produk. 2. Dalam Pasal 3 RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan mengenai tujuan dari RUU ini yakni mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi Pelaku Usaha. 3. Dalam Pasal 18 RUU tentang Industri Strategis Perkebunan mengatur mengenai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendorong penanaman modal di bidang Industri Strategis Perkebunan untuk

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
		<p>dan Penguatan Sektor Keuangan</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p> <p>8. Keterangan DPR atas Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023</p> <p>9. Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>10. Keterangan DPR atas Perkara Nomor 5 dan 6/PUU-XXI/2023</p> <p>11. Pengujian formil Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p> <p>12. Keterangan DPR atas Perkara Nomor 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023</p> <p>13. Pengujian formil UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> <p>14. Keterangan DPR atas Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023</p> <p>15. Pengujian formil UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> <p>16. Konsep keterangan DPR atas Perkara Nomor 11/PUU-XXI/2023</p>	<p>memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur industri nasional dan peningkatan daya saing Industri Strategis Perkebunan.</p> <p>4. Dalam Pasal 4A mempertegas pembagian kewenangan antara kelembagaan Minyak dan Gas Bumi dalam hal ini BUK Migas sebagai pemegang kuasa usaha pertambangan dengan Pemerintah Pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan. Perubahan tata kelola Minyak dan Gas Bumi juga dimaksudkan untuk memperpendek rantai birokrasi, meningkatkan efisiensi biaya operasional di hulu, dan prioritas alokasi Minyak dan Gas Bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.</p> <p>5. Dalam UU tentang Landas Kontinen mengatur mengenai kegiatan di landas kontinen berupa eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam, hal ini dipertegas dalam Bab IV Kegiatan di Landas Kontinen khususnya di Bagian Ketiga Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Sumber Daya Alam.</p> <p>6. Dalam UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 229 BAB XVIII Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen diatur bahwa pelindungan konsumen di sektor keuangan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi investor dan mendorong peningkatan investasi.</p> <p>7. Untuk mendukung peningkatan investasi diatur dalam Bab III terkait Peningkatan Investasi dan Kegiatan Berusaha, yang</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
		<p>17. Pengujian Materiil UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</p> <p>18. Konsep keterangan DPR atas Perkara 14/PUU-XXI/2023</p> <p>19. Pengujian formil Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p> <p>20. Konsep Keterangan DPR atas Perkara Nomor 18/PUU-XXI/2023</p> <p>21. Pengujian UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p> <p>22. Konsep Keterangan DPR atas Perkara Nomor 38/PUU-XXI/2023</p> <p>23. Pengujian formil dan materiil UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</p> <p>24. Konsep Keterangan DPR atas Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023</p> <p>25. Pengujian UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> <p>26. Konsep keterangan DPR atas perkara nomor 52/PUU-XXI/2023</p> <p>27. Pengujian KUHD</p>	<p>meliputi Penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.</p> <p>8. Pengujian UU PWP3K terkait kepastian ijin pertambangan di pulau kecil dalam kasus konkrit dimana RT RW Kabupaten dibatalkan oleh Mahkamah Agung namun ijin investasi tetap ada dan berlaku namun tidak dapat dilakukan usaha pertambangan. Ketentuan yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU PWP3K yang mengatur mengenai pemanfaatan pulau kecil.</p> <p>9. Pengujian formil Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap UUD Tahun 1945. Pemohon mendalilkan pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merugikan masyarakat dan penyusunannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.</p> <p>10. Pengujian formil UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam pemeriksaan perkara ini, Mahkamah Konstitusi memanggil DPR untuk memberikan keterangan terhadap perkara perkara ini dalam waktu bersamaan sehingga keterangan DPR atas 4 perkara tersebut digabungkan.</p> <p>11. Pengujian formil UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Perkara ini tidak lepas dari perkara 40, 41, 46, dan</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
		<p>28. Konsep Keterangan DPR atas perkara nomor 83/PUU-XXI/2023</p> <p>29. Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</p> <p>30. Konsep keterangan DPR atas perkara nomor 84/PUU-XXI/2023</p> <p>31. Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</p> <p>32. Konsep keterangan DPR atas perkara nomor 112/PUU-XXI/2023</p> <p>33. Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</p> <p>34.</p>	<p>50/PUU-XXI/2023 yang telah dimulai pemeriksaannya terlebih dahulu oleh MK.</p> <p>12. Pengujian Materiil UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD Tahun 1945. Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan. ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan memberikan pengecualian terhadap Kreditor Separatis untuk mengeksekusi harta Debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun untuk melaksanakan eksekusi tersebut harus mengacu kepada Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU Kepailitan, sedangkan dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan tidak disertakan Pasal 59 UU Kepailitan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam tata cara pelaksanaan eksekusi serta mempersempit norma. Hal tersebut timbul akibat mayoritas Kreditor Separatis tetap beranggapan bahwa ketentuan Pasal 59 UU Kepailitan tidak berlaku berdasarkan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan. Sehingga anggapan Para Pemohon, bahwa Kreditor Separatis tidak perlu tunduk kepada batasan jangka waktu 2 (dua) bulan untuk mengeksekusi atau menjual aset apabila debitur telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi.</p> <p>13. Pengujian formil Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap UUD Tahun 1945. Pemohon mengajukan pengujian formil Perppu Cipta Kerja yang</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>pada intinya 1. Bahwa tidak ada kebutuhan hukum yang mendesak untuk diselesaikan secara cepat, 2. Bahwa tidak terdapat kekosongan hukum (rechtvacuum) yang harus dijawab dengan objek Perkara, bahwa Presiden Bersama dengan DPR memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk memperbaiki UU Cipta Kerja, 3. bahwa objek Perkara menciderai putusan mahkamah konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 terkait meaningful participation, dan 4. bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan pengabaian putusan MK dan merupakan pelanggaran konstitusi.</p> <p>14. Pengujian UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap UUD Tahun 1945. Pemohon mengajukan pengujian Materiil Pasal 34 ayat (2) UU JPH dan Pasal 48 angka 19 dan Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang berkaitan dengan mekanisme penerbitan sertifikat halal.</p> <p>15. Pengujian formil dan materiil UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap UUD Tahun 1945. Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf a UU HPP yang dianggap berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945.</p> <p>16. Pengujian UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945. Pemohon perkara ini terdiri atas 119 pemohon dan mengajukan pengujian terhadap Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 42 angka 5 Pasal 7 ayat (1), Pasal 42 angka 6 Pasal 10 ayat (2), Pasal 42 angka 7 Pasal 11 ayat (1), Pasal 42 angka 15 Pasal 23 ayat (2), Pasal 42 angka 23 Pasal 33 ayat (1), Pasal 42 angka 23 Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU 6/2023.</p> <p>17. Pengujian KUHD terhadap UUD Tahun 1945. Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 251 KUHD yang berketentuan “Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal” terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 karena menurut Pemohon Pasal 251 KUHD hanya menguntungkan penanggung, hal ini didasarkan bahwa tertanggung harus memberitahukan secara benar terkait keadaan tertanggung dimana posisi tertanggung lemah dan dapat dibohongi oleh Penanggung. Selain itu, isi klausula-klausula yang disisipkan Penanggung menggunakan bahasa yang sulit dimengerti dan Penanggung menjelaskan klausula isi polis dengan tidak jelas.</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>18. Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap UUD Tahun 1945. Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) dalam Pasal 2 Angka 13 UU 7/2021.</p> <p>19. Pengujian Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap UUD 1945 karena Pemohon beranggapan Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta terkait dengan membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan beserta sanksinya terkesan masih terlalu sempit dan belum bisa mengakomodir fakta atau fenomena yang terjadi saat ini dimana belum mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban penyedia layanan digital yang berbasis UGC.</p> <p>20. Konsep keterangan DPR atas perkara nomor 112/PUU-XXI/2023 Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap UUD Tahun 1945. Dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan sebagian besar materi UU Perasuransian dalam beberapa aspek dan Pasal 4 ayat (1) huruf n UU HPP bertentangan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.</p>
2.	Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait investasi dalam proses pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Pagu Indikatif Badan Koordinasi Penanaman Modal - Mitra Kerja Komisi VI 2. Strategi Mencapai Target Investasi 2024 Melalui Online Single 	<p>Analisis yang disusun merupakan bentuk dukungan kepada anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi anggaran pada proses pembahasan dan penetapan APBN yang berkaitan dengan investasi. Substansi analisis yang diberikan</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
	dan penetapan APBN	<p>Submission 2.0” dalam Masukan PA3KN atas Nota Keuangan RAPBN 2024</p> <p>3. Creative Financing Dalam Pembangunan Infrastruktur” dalam Masukan PA3KN atas Nota Keuangan RAPBN 2024</p> <p>4. Kebijakan Insentif Perpajakan, Perbaikan Kemudahan serta Kepastian Usaha Guna Meningkatkan Investasi” dalam dalam Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024</p> <p>5. Hilirisasi SDA” dalam Telaahan atas Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2024</p> <p>6. Percepatan Pembangunan infrastruktur Guna Mendorong Investasi serta Peningkatan Kapasitas produksi dan Daya Saing dalam dalam Kajian Isu Strategis Rencana Pembangunan Tahun 2024</p>	<p>mencakup beberap hal antara lain: pagu indikatif Kemnterian Investasi/BKPM, implementasi OSS, creative financing, dan kebijakan insentif perpajakan dikaitkan dengan investasi.</p> <p>Berapa ringkasan kajian/analisis antara lain:</p> <p>1. Terkait dengan peningkatan investasi, PA3KN menyampaikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Komisi VI DPR RI untuk dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM, antara lain:</p> <p>a. Kementerian Investasi/BKPM perlu melakukan kerja sama antara pemerintah baik itu pusat maupun daerah untuk mempermudah investor untuk merealisasikan investasinya.</p> <p>b. Kementerian Investasi/BKPM selain melakukan promosi juga perlu mengawal iklim investasi di Indonesia mulai dari tahap perizinan, financial closing, pembangunan, hingga sampai tahap produksi komersial. Kementerian Investasi/BKPM selain memfasilitasi investasi dengan nilai besar, perlu juga untuk memberikan fasilitasi terhadap investor menengah dan kecil.</p> <p>c. Kementerian Investasi/BKPM perlu meningkatkan jangkauan wilayah kegiatan penerbitan dan pembagian Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM perseorangan. Lebih lanjut Kementerian Investasi/BKPM perlu memberikan sosialisasi kemudahan OSS berbasis risiko bagi masyarakat di daerah.</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>d. Kementerian Investasi/BKPM perlu memastikan investasi di Indonesia turut mengimplementasikan tingkat penyerapan TKDN yang ketat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>e. Kementerian Investasi/BKPM perlu memastikan setiap investasi yang masuk ke Indonesia wajib memperhatikan pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal serta alih teknologi.</p> <p>2. Pemerintah perlu memastikan OSS 2.0 memiliki perimeter keamanan yang memadai sehingga aman dari peretasan oleh hacker. Selanjutnya, diperlukan perbaikan dalam hal penerapan aturan turunan dari UU Cipta Kerja serta memastikan OSS dilakukan oleh ASN dengan jabatan fungsional untuk mengurangi adanya risiko tour of duty. Terakhir, diperlukan political will dari masing-masing stakeholder khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi. Hal ini diperlukan agar cita-cita Indonesia menuju fase negara maju pada tahun 2045 tidak hanya sebatas di atas kertas.</p> <p>3. Selain menciptakan stabilitas ekonomi dan politik langkah perbaikan yang dapat dilakukan pemerintah guna menarik minat investor dalam berinvestasi di Indonesia dapat dimulai dari: Pertama, pemerintah perlu mendorong berbagai bauran kebijakan. Kedua, perbaikan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. Ketiga,</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>penguatan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Keempat, penguatan kelembagaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).</p>
3.	<p>Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan investasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis/kajian tentang Perkembangan Investasi di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya 2. Analisis/kajian tentang Kepastian Hukum Realisasi Investasi Non-APBN Pembangunan Ibu Kota Negara 3. Analisis/kajian tentang Upaya Peningkatan Investasi melalui Kawasan Ekonomi Khusus Lido 4. Analisis/kajian tentang Komitmen Investasi Hulu Migas Indonesia 2023 5. Analisis/kajian tentang Perppu Cipta Kerja: Kepastian Hukum bagi Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha? 6. Analisis/kajian tentang Perppu Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Investasi 7. Peran Kemendagri dalam Perbaikan Iklim Investasi di Daerah” dalam kajian Akuntabilitas ed 3/2023 hlm 3 8. Anomali Investasi, tantangan Ketenagakerjaan Indonesia 9. Peta Jalan Industri TPT Indonesia : Penting untuk Segera ada Agar 	<p>Analisis yang disusun merupakan bentuk dukungan kepada anggota DPR RI dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan APBN yang berkaitan dengan investasi. Substansi analisis yang diberikan mencakup beberapa hal antara lain: insentif fiskal hulu migas, kondisi capaian dan pemerataan investasi di daerah, perppu cipta kerja, dampak dari perppu cipta kerja terhadap investasi, determinan yang memengaruhi investasi, investasi IKN dan lain sebagainya.</p> <p>Ringkasan kajian/analisis, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. DPR RI dengan kewenangan konstitusionalnya menindaklanjuti untuk menerima atau mencabut Perppu Cipta Kerja. Keputusan DPR RI setidaknya mempertimbangkan indikator kepentingan memaksa yang diacu Presiden, urgensi Perppu Cipta Kerja, substansi pengaturan, output outcome yang dikaitkan dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta apakah Perppu Cipta Kerja tersebut dapat menjamin kepastian hukum yang bermuara pada peningkatan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan penciptaan lapangan kerja yang dapat menggerakkan perekonomian nasional. b. Komisi IV DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
		<p>Mampu Kembali Berdaya” Dalam sekilas APBN edisi 6/2023</p> <p>10. “80% Pembiayaan Infrastruktur IKN berasal dari Swasta, Bagaimana tantangannya ?” dalam Sekilas APBN edisi 18/2023</p> <p>11. Perkembangan Investasi di Daerah dan Perlunya Pemerataan Investasi Antar Wilayah” dalam BIB Ed. 1 2023</p> <p>12. Analisis Insentif Fiskal Hulu Migas, Harus Memikat Agar Pertumbuhan Investasi Tidak Melambat</p> <p>13. Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2022 : Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Kegiatan Diplomasi Ekonomi di Bidang Investasi Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta</p> <p>15. Analisis/kajian tentang Tantangan Investasi Energi Baru dan Energi Terbarukan Menuju Indonesia Net Zero Emission</p>	<p>memastikan pelaksanaan Perppu Cipta Kerja tidak menyimpang dari tujuan pembentukannya, yaitu mampu menciptakan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia, melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan UMK-M, serta memastikan peraturan pelaksana yang berkaitan pembangunan investasi, nantinya mampu menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif.</p> <p>c. Nilai investasi Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun demikian, masih ditemui berbagai kendala dalam meningkatkan investasi. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi investasi, yaitu: suku bunga, inflasi, nilai tukar, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, sarana dan prasarana, aturan perundang-undangan, kualitas sumber daya manusia, serta keadaan sosial budaya. Peran DPR RI sangat dibutuhkan untuk mengawasi efektivitas kinerja pemerintah dalam meningkatkan investasi. DPR RI dan pemerintah perlu duduk bersama untuk memikirkan solusi terbaik bagi permasalahan investasi ini. Selain itu, perlu disusun regulasi khusus dalam mendorong tumbuhnya investasi nasional yang sifatnya komprehensif dan mengikat sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi investor.</p> <p>d. Guna menarik investor nonAPBN, pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) dan kementerian terkait perlu mengadakan pendekatan dan dialog persuasif dengan investor</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			swasta serta menyertakan upaya untuk meminimalisasi kendala nonregulasi yang berpotensi pada ketidakpastian hukum. DPR RI melalui fungsi pengawasan di komisi terkait, terutama komisi yang membidangi investasi, infrastruktur, dan pertanahan, perlu memastikan investasi pembangunan di IKN berjalan secara kondusif dan memiliki kepastian hukum

C. TEMATIK INFLASI

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Tersedianya Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait inflasi.		
2.	Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait inflasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asumsi Dasar Ekonomi makro : Inflasi” dalam masukan PA3KN dalam Nota Keuangan RAPBN 2024 2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro : Inflasi: dalam Tinjauan atas Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 3. Mengendalikan Inflasi Dalam Rangka 	Analisis yang disusun merupakan bentuk dukungan kepada anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi anggaran pada proses pembahasan dan penetapan APBN yang berkaitan dengan inflasi. Substansi analisis yang diberikan mencakup beberap hal antara lain: keterkaitan el nino dengan inflasi, catatan terhadap penetapan inflasi dalam penyusunan RUU APBN 2024, serta catatan terhadap

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
		<p>Menjaga Stabilitas Ekonomi Dan Daya Beli Masyarakat” dalam Kajian Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024.</p>	<p>penetapan inflasi dalam APBN 2024.</p> <p>Berapa ringkasan kajian/analisis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait dengan inflasi terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian Badan Anggaran dan Komisi XI DPR RI untuk dilakukan oleh pemerintah, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. Integrasi kebijakan yang menyentuh dari sisi hulu hingga hilir, termasuk kebijakan pengelolaan stok pangan domestik, keterjangkauan harga pangan, serta distribusi di seluruh wilayah dapat mendorong terciptanya stabilitas harga hingga ke seluruh daerah. Proses distribusi yang didukung dengan infrastruktur dan teknologi yang terkini dibutuhkan untuk mewujudkan pasar yang lebih efisien. b. Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) khususnya Pemerintah Daerah perlu memerhatikan supply-demand pangan dengan melakukan perhitungan cadangan pangan dengan cepat, aktual dan tepat sehingga ketergantungan impor dapat dikurangi. c. Pengurangan anggaran subsidi pupuk dan fokus pada pemberian bahan organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu, juga mengurangi anggaran yang tidak pro-petani dan mengalokasikan ke riset untuk menemukan bibit/varietas unggul yang tahan terhadap perubahan iklim dan sarana prasarana pertanian yang lebih efektif serta lebih efisien melalui kerja sama

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>bersama petani, swasta dan akademisi. Dengan terkendalinya inflasi harga pangan di daerah, maka inflasi nasional pun dapat terjaga dan stabil.</p> <p>2. Alternatif kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam pengendalian inflasi, antara lain:</p> <p>a. Dalam menghadapi dampak climate change terhadap ketahanan pangan dan inflasi dari volatile food, maka koordinasi lintas sektor baik dalam mitigasi maupun adaptasi wajib dilakukan.</p> <p>b. Semakin dinamisnya kondisi global menuntut bauran kebijakan moneter, makroprudensial serta sistem pembayaran perlu semakin fleksibel.</p>
3.	Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan inflasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis/kajian tentang Mengatasi Gejolak Inflasi Menjelang Ramadhan 2. Analisis/kajian tentang Tren Menurunnya Surplus Neraca Perdagangan Indonesia 3. Analisis/kajian tentang Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Faktor Pendukungnya 4. Analisis/kajian tentang Mewaspada Dampak Kenaikan Suku Bunga Acuan terhadap Sektor Riil 5. Analisis/kajian tentang Ancaman Krisis Utang di Tengah Risiko Resesi Global 6. Analisis/kajian tentang Daya Tahan Ekonomi Indonesia dalam 	<p>Analisis yang disusun merupakan bentuk dukungan kepada anggota DPR RI dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan APBN yang berkaitan dengan inflasi. Substansi analisis yang diberikan mencakup beberapa hal antara lain: tata kelola pengendalian inflasi oleh kementerian teknis, inflasi dan ramadhan, inflasi dan daya tahan ekonomi, sinergitas menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan, serta kebijakan lainnya. Hasil kajian merekomendasikan, antara lain:</p> <p>a. Komisi XI DPR RI berperan untuk mengawasi kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah khususnya dalam mengantisipasi lonjakan inflasi menjelang Ramadan sampai Idulfitri. Komisi XI perlu mendorong pemerintah untuk bergerak lebih cepat menyiasati agar lonjakan inflasi tidak terjadi saat mulai memasuki bulan Ramadan, misalnya dengan</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
		<p>Mengantisipasi Resesi Global</p> <p>7. Analisis/kajian tentang Catatan DPR Terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 2024</p> <p>8. Analisis/kajian tentang Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 dan Strategi Kebijakan</p> <p>9. Analisis/kajian tentang Antisipasi Kenaikan Harga Komoditas Pangan Saat Bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023</p> <p>10. Analisis/kajian tentang Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 di Tengah Perlambatan Perekonomian Global</p> <p>11. Analisis/kajian tentang Neraca Perdagangan dan Struktur Ekspor Indonesia</p> <p>12. Analisis/kajian tentang Strategi Stabilisasi Ekonomi Di Tengah Ancaman Resesi Global</p> <p>13. Analisis/kajian tentang Surplus Fiskal 2023: Momentum Genjot Perekonomian di Era Endemi</p> <p>14. Analisis/kajian tentang Premi Restrukturisasi Perbankan Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Krisis Keuangan</p> <p>15. Pengendalian Inflasi Volatile Food” dalam Buletin APBN edisi 14/2023</p>	<p>menambah ketersediaan stok bahan pangan jauh hari sebelum Ramadan, lebih rutin melakukan operasi pasar, mengontrol distribusi pangan, dan menindak tegas penimbun bahan pangan. Selain itu, Komisi XI juga perlu mendorong Bank Indonesia untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi misalnya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).</p> <p>b. Dalam analisisnya penulis mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah secara terukur menetapkan prioritas belanja-belanja yang penting di tahun 2023 dan sangat diharapkan dapat menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan ekonomi global. Dikhawatirkan bila kondisi berlangsung lama akan berdampak terhadap kenaikan harga atau inflasi akibat gangguan pasokan dan distribusi, serta pelemahan ekonomi dari negara-negara lain. Implikasi kenaikan inflasi akan menurunkan kualitas pertumbuhan karena terjadi penurunan konsumsi masyarakat. Untuk itu, Indonesia tetap harus mencermati pertumbuhan ekonomi global seperti di India, Amerika, dan China. Ekonomi global cukup berpengaruh pada kebijakan ekonomi dalam negeri seperti ekspor. Bila resesi global berlanjut, maka potensi tersebut akan memengaruhi stabilitas, daya tahan, dan pemulihan ekonomi dalam negeri</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
		<p>16. Harga Beras Naik: Benarkah Ketersediaan Beras yang tidak Banyak?’ dalam Sekilas APBN edisi 7/2023</p> <p>17. Harga Beras Melambung dan masih selalu Impor: Kemana Larinya Kedaulatan Anggaran?’ dalam Sekilas APBN edisi 12/2023</p> <p>18. Mewaspadaai Guncangan Akibat Keruntuhan Bank Besar di AS” Dalam Sekilas APBN edisi 24/2023</p> <p>19. “Dampak Krisis Perbankan AS dan Mitigasinya Terhadap Perekonomian Indonesia” dalam Sekilas APBN edisi 26/2023</p> <p>20. Ancaman El Nino dan Potensi Peningkatan inflasi Indonesia” dalam Sekilas APBN edisi 33/2023</p> <p>21. Analisis/kajian tentang Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi</p> <p>22. Analisis/kajian tentang Stimulus Fiskal RAPBN 2024.</p>	

D. TEMATIK DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Tersedianya dukungan penyusunan Naskah	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua	1. Pengaturan e-legislasi dalam Pasal 97B yang mengatur bahwa Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik dan

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
	Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait digitalisasi administrasi pemerintahan.	atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 5. Naskah Akademik dan RUU tentang Satu Data Indonesia 6. Keterangan DPR atas Perkara Nomor 108 dan 110/PUU-XX/2022 7. Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan. Selain itu dalam pengaturan partisipasi Masyarakat dalam Pasal 96 ayat (2) yang memberikan ruang bagi Masyarakat untuk memberikan masukan terhadap setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara luring (online). 2. Dalam Pasal 1 angka 2 UU tentang PDP dijelaskan mengenai definisi Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Selain itu dalam penyelenggaraan digitalisasi administrasi pemerintahan oleh pemerintah sebagai Pengendali Data Pribadi perlu diselenggarakan secara akutabel sebagaimana tercantum dalam asas UU tentang PDP. 3. Pasal 22 Angka 22 UU tentang P2SK mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan mengatur penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek dengan menggunakan jasa penyelenggara system elektronik (securities crowdfunding) guna memperluas akses UMKM untuk mendapatkan pendanaan dari Pasar Modal. 4. Pasal 176 yang mengatur Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam perubahan Pasal 350 UU Pemda yang diarahkan untuk memperkuat layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, antara lain melalui pengaturan sistem perizinan berusaha secara elektronik (OSS). 5. Dalam Pasal 2 RUU tentang

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>Satu Data Indonesia diatur bahwa salah satu tujuan pengaturan Satu Data Indonesia untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar-instansi pusat, antar-instansi daerah, dan/atau antara instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, dan pengendalian pembangunan. Selanjutnya dalam Bab VIII diatur mengenai infrastruktur Satu Data Indonesia yang memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>6. Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap UUD Tahun 1945. Pemohon Perkara 108 mengajukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 UU PDP sedangkan Pemohon Perkara 110 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (1) UU PDP. Permasalahan dalam perkara ini diantaranya adalah anggapan ketiadaan keterlibatan badan hukum dalam pengendalian dan pemrosesan data pribadi merugikan Pemohon karena Pemohon menjadi tidak dapat menunjuk suatu badan hukum untuk memproses data pribadinya sehingga berpotensi terjadi kebocoran data, selain itu frasa “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” dalam Pasal 15 ayat (1) UU PDP menjadi tidak jelas.</p>
2.	Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNBPN Polri: Buah Manis Dari Perbaikan Organisasi Dan Digitalisasi Layanan dalam Masukan PA3KN dalam Nota Keuangan RAPBN 20 2. Kajian Pagu Indikatif Kementerian 	<p>Analisis yang disusun merupakan bentuk dukungan kepada anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi anggaran pada proses pembahasan dan penetapan APBN yang berkaitan digitalisasi administrasi pemerintahan. Substansi analisis yang diberikan mencakup beberapa hal antara lain:</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
	dan penetapan APBN	Kominfo-Mitra Komisi I DPR RI 3. Kajian Pagu Indikatif Kementerian Pan-RB-Mitra Komisi II	<p>dukungan anggaran Kementerian Kominfo, dukungan anggaran KemenpanRB, penguatan SPBR, digitalisasi PNBPN, dan lainnya.</p> <p>Berapa ringkasan kajian/analisis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hingga saat ini inovasi layanan publik berbasis digital masih dianggap tidak efektif, tidak efisien, dan tidak user friendly. Terdapat lebih dari 27.000 aplikasi pemerintahan yang tidak saling terintegrasi. Berdasarkan data SP4N-Lapor Tahun 2020 – 2022 terhadap pelaksanaan pelayanan publik berbasis elektronik, ditemukan bahwa 10.799 laporan mengeluhkan bahwa pelayanan publik digital tidak dapat diakses/dibuka, tidak bisa login, atau terdapat error/bug. Beberapa hal yang perlu didorong Komisi II DPR RI, melalui KemenpanRB untuk mengoptimalkan SPBE, diantaranya: Pertama, Memastikan e-government memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak tumpang tindih. Diperlukan harmonisasi antar regulasi yang mengatur terkait layanan publik berbasis digital untuk menjamin implementasinya dapat berjalan efektif dan efisien baik di tingkat pusat, maupun daerah. Kedua, Meningkatkan literasi digital pada SDM pengelola SPBE, baik di pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Ketiga, Mendorong integrasi sistem antar pelayanan publik digital. Keempat, Meningkatkan sistem keamanan pada pelayanan publik yang menggunakan kanal digital. 2. Pembangunan dan penguatan Infrastruktur TIK

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>menjadi salah satu Prioritas Nasional dan komponen dalam mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Pembangunan infrastruktur tahun 2024. Sasaran dan Indikator utama dalam prioritas tersebut yakni meningkatnya layanan infrastruktur TIK. Komisi I DPR RI perlu mendorong pemerintah, terutama melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk: (1) pengintegrasian tata kelola informasi dan komunikasi publik di kementerian/lembaga/daerah (K/L/D), (2) penyusunan dan implementasi strategi komunikasi publik terkait kebijakan pemerintah yang mampu menjangkau daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Transmigrasi (4T) dan mengoptimalkan penggunaan media pemerintah, (3) penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan, terutama di wilayah 4T, (4) peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika serta optimalisasi pendidikan dan pelatihan talenta digital, (5) peningkatan literasi TIK masyarakat, serta (6) penguatan peran lembaga independen bidang kominfo dan kapasitas SDM media dan jurnalis.</p>
3.	Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan digitalisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis/kajian tentang Pelindungan Data Pribadi Pada Aplikasi JMO 2. Analisis/kajian tentang Digitalisasi Sistem Keuangan untuk Peningkatan Inklusi Keuangan Kawasan ASEAN 3. Analisis/kajian tentang Pariwisata Digital: 	<p>Analisis yang disusun merupakan bentuk dukungan kepada anggota DPR RI dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan APBN dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan digitalisasi administrasi pemerintahan. Substansi analisis yang selain penguatan SPBE, hasil yang dikaji, ringkasannya antara lain:</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
	administrasi pemerintahan.	<p>Disrupsi dan Pemanfaatan Teknologi untuk Pariwisata</p> <p>4. Penguatan SPBE dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan (Buletin APBN, Ed. 12/2023)</p> <p>5. IHPS</p> <p>6. Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik</p> <p>7. Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</p> <p>8. Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat</p> <p>9. Analisis/kajian tentang Digitalisasi Pendidikan Indonesia</p> <p>10. Analisis/kajian tentang Pemutusan Akses Platform Digital yang Memuat Konten Indoktrinasi dan Radikalisme</p> <p>11. Analisis/kajian tentang Transformasi Ekonomi Digital di Indonesia</p> <p>12. Analisis/kajian tentang Digitalisasi Sistem Kesehatan</p>	<p>a. Digitalisasi dalam sistem pembayaran erat kaitannya dengan inklusi keuangan. Dengan digitalisasi, kesenjangan inklusi dan daya tahan keuangan di kawasan ASEAN dapat diatasi. Indeks inklusi keuangan Indonesia, menurut data Global Financial Index 2021 mencapai 51,76%. DPR RI dalam hal ini Komisi XI perlu memberikan perhatian terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terutama di daerah terpencil. Hal ini sangat dibutuhkan untuk pemerataan akses keuangan dan mengatasi berbagai kesenjangan aksesibilitas keuangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>b. UU Kepariwisata belum mengatur pemanfaatan teknologi digital bagi pariwisata. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap UU Kepariwisata untuk melengkapi hal-hal yang belum diatur, merespons dinamika masyarakat, dan memenuhi kebutuhan hukum. Perubahan atas UU Kepariwisata telah masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2023. Dengan demikian, RUU Perubahan UU Kepariwisata memiliki peran penting untuk mengatur dan memastikan pemanfaatan teknologi untuk pariwisata</p> <p>c. Penerapan e-government dan SPBE yang semakin baik, akan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut dikarenakan, semakin tinggi penerapan digitalisasi dalam pemerintahan, akan mendorong</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>semakin terbukanya aktivitas dan kegiatan pemerintahan, sehingga akan memudahkan proses pengawasan dari berbagai pihak. Negara-negara dengan indeks e-government yang tinggi, cenderung memiliki indeks persepsi korupsi yang semakin baik. Belum terhubungnya sistem/aplikasi antar instansi pemerintahan saat ini juga berdampak terhadap pemborosan anggaran dalam APBN, dimana banyak sistem/aplikasi pemerintahan sejenis yang seharusnya bisa digabungkan, namun selama ini masih berjalan sendiri-sendiri di masing-masing instansi pemerintahan. Komisi II DPR RI perlu mendorong Pemerintah terutama KemenpanRB agar membuat aplikasi/sistem baru secara terpusat sebagai sistem master, untuk menggantikan sistem yang telah ada sebelumnya. Selain itu, integrasi sistem juga akan mengakibatkan meningkatnya sistem/aplikasi yang tidak termanfaatkan lagi di setiap instansi pemerintahan, yang menyebabkan aset yang tidak termanfaatkan semakin meningkat. Di sisi lain, Komisi II DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk memperkuat pertahanan cyber Indonesia. Sampai dengan tahun 2022, Indonesia masih menjadi negara yang cukup rentan terhadap serangan cyber. Oleh karena itu, integrasi sistem pemerintahan perlu diperkuat pula dengan penguatan cyber security di Indonesia.</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang tersebut, terdapat beberapa catatan yang disampaikan kepada alat kelengkapan dewan, antara lain:</p> <p>a. Dalam kajian ini ditemukan bahwa pengelolaan zakat harus berkesinambungan dan Baznas tengah membangun sistem pengelolaan zakat agar penyalurannya dapat menjangkau lebih luas, Disamping itu, dalam pelaporan pajak, zakat yang disetor dapat digunakan sebagai pengurang PKP pada perhitungan pajak pada tahun berjalan.</p> <p>b. Pembangunan sistem informasi dan data nasional masih terhambat adanya mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan dan akurasi data yang disampaikan. Pengumpulan data dan perlindungannya juga perlu menjadi perhatian khususnya dengan adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.</p> <p>c. Diperlukan koordinasi pihak-pihak yang terlibat untuk menyelaraskan data kebutuhan korban bencana dengan bantuan yang akan diberikan.</p> <p>d. Adanya PTSP dalam mekanisme perijinan menimbulkan kerancuan pemahaman masyarakat terkait kewenangan penerbitan SIP dan pencabutannya SIP dokter dan dokter gigi karena berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU Praktik Kedokteran kewenangan penerbitan SIP diterbitkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang Kabupaten/Kota (dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permenkes 2052/2011),</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>sedangkan dalam Perpres 97/2014 mengatur bahwa izin dikeluarkan oleh PTSP Kabupaten/Kota sehingga terjadi disharmoni pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran. Teknis pelaksanaan pemberian izin dan pencabutannya harus disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami regulasi dan pelaksanaannya.</p> <p>e. Sistem informasi perdagangan yang selama ini terlaksana masih tersebar dalam kementerian/Lembaga masing-masing yang menyediakan data informasi perdagangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Agar manfaat ekonomi digital dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah harus mempercepat proses transformasi digital. Percepatan tersebut dapat dilakukan jika kondisi prasyarat penting terpenuhi yaitu tersedianya SDM berkeahlian digital tinggi, infrastruktur digital yang merata, dan juga iklim usaha yang mendukung inovasi dan pertumbuhan perusahaan</p> <p>f. Dalam kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik ditemukan bahwa Pembangunan sistem informasi dan data nasional masih terhambat adanya mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan dan akurasi data yang disampaikan. Pengumpulan data dan perlindungannya juga perlu menjadi perhatian khususnya dengan adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.</p>

NO.	SASARAN TEMATIK	OUTPUT	KETERANGAN
			<p>g. Dalam Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disampaikan rekomendasi yang salah satunya berupa diperlukan koordinasi pihak-pihak yang terlibat untuk menyelaraskan data kebutuhan korban bencana dengan bantuan yang akan diberikan.</p> <p>h. Dalam Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditemukan bahwa pengelolaan zakat harus berkesinambungan dan Baznas tengah membangun sistem pengelolaan zakat agar penyalurannya dapat menjangkau lebih luas. Di samping itu, dalam pelaporan pajak, zakat yang disetor dapat digunakan sebagai pengurang PKP pada perhitungan pajak terutang pada tahun berjalan.</p>